

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021;

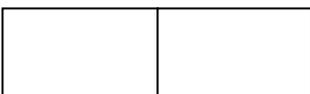
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten



Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

DAN

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan.



6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, Pemerintah Daerah, pemerintahan kecamatan dan nagari serta keterwakilan perempuan dan anak-anak dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

--	--

14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka deregulasi dan kerangka anggaran.
23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-

--	--

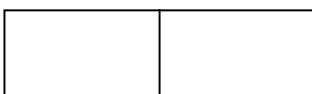
undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

24. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai

--	--

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
38. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
43. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi



dan memiliki ketrampilan dalam penerangan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.

44. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
45. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang yang lebih tinggi.
46. Kabupaten/Kota lainnya adalah Kabupaten/Kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
47. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
48. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
49. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
50. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

--	--

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan :

- a. penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Solok, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJM Nasional; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2016-2021 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

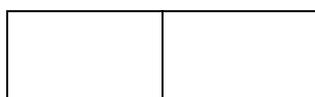
Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam :

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Solok; dan
- b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas



- dan Program Strategis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

BAB IV

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2016-2021

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI : Strategi dan Arah kebijakan
- Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2016

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

M. SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA
BARAT :

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2016

BUPATI SOLOK,

Dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

Dto

M. SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2016

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

M. SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

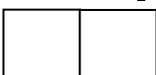
1.1 Latar Belakang

Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kemandirian dan kebebasan daerah dalam mengelola sumber daya sesuai potensi dan kebutuhan daerah yang pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, namun tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah serta berwawasan lingkungan yang sehat dan terkendali dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, Daerah diberikan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Kewenangan otonomi yang diberikan kepada Daerah adalah sebagai perwujudan dari azas desentralisasi dengan dua jenis urusan yakni; urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dibarengi dengan azas tugas pembantuan atau penugasan dari pemerintah dan diperkuat dengan pelaksanaan azas dekonsentrasi di tingkat provinsi, konsekwensinya memberikan tanggung jawab besar yang diemban oleh Pemerintah Daerah ke depan dalam rangka membangun daerah dan masyarakat secara keseluruhan. Namun tanggung jawab besar Pemerintah Daerah itu, disisi lain dihadapkan pula dengan berbagai keterbatasan sumber daya daerah terutama keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Dari berbagai keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah itu, agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu dapat terkelola secara jelas, terukur, transparan dan akuntabel serta dapat terlaksana secara efisien dan efektif memerlukan sebuah perencanaan pembangunan yang matang, terkoordinasi dan terarah dengan keluaran dalam bentuk *output*, *outcome*, *benefid* dan *impact* yang secara kuantitatif terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

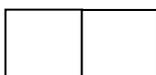
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus mengacu dan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem



Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, karena sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat maupun di Daerah dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mencakup beberapa pendekatan sekaligus merupakan kriteria dan unsur dalam rangkaian proses perencanaan, yakni, a. Teknokratik, pendekatan ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, b. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholders* terkait, c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan atau menjabarkan visi dan misi Pasangan Calon Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah; dan, d. Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), pendekatan ini dimaksudkan agar aspirasi tingkat bawah dengan kepentingan tingkat atas akan saling terakomodir secara jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Keempat pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut harus terakomodir sesuai dengan porsinya dan harus saling terkait serta saling mendukung satu sama lainnya.

Pendekatan dan unsur politis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa pasangan calon kepala daerah wajib menyusun visi dan misi serta program pembangunan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pencalonan dan sekaligus untuk ditawarkan kepada masyarakat guna meyakinkan wajib pilih untuk memilih pasangan calon kepala daerah terbaik. Selanjutnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditawarkan kepada masyarakat pemilih, harus terakomodir dalam dokumen perencanaan daerah yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal yang sama juga



ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen RPJMD tidak boleh lepas dan harus saling terkait dengan RPJMD Provinsi, Pembangunan lintas daerah dan RPJM Nasional, hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan keserasian, sinergitas, saling mendukung dan memperkuat hubungan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan mengedepankan atau memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat inovatif.

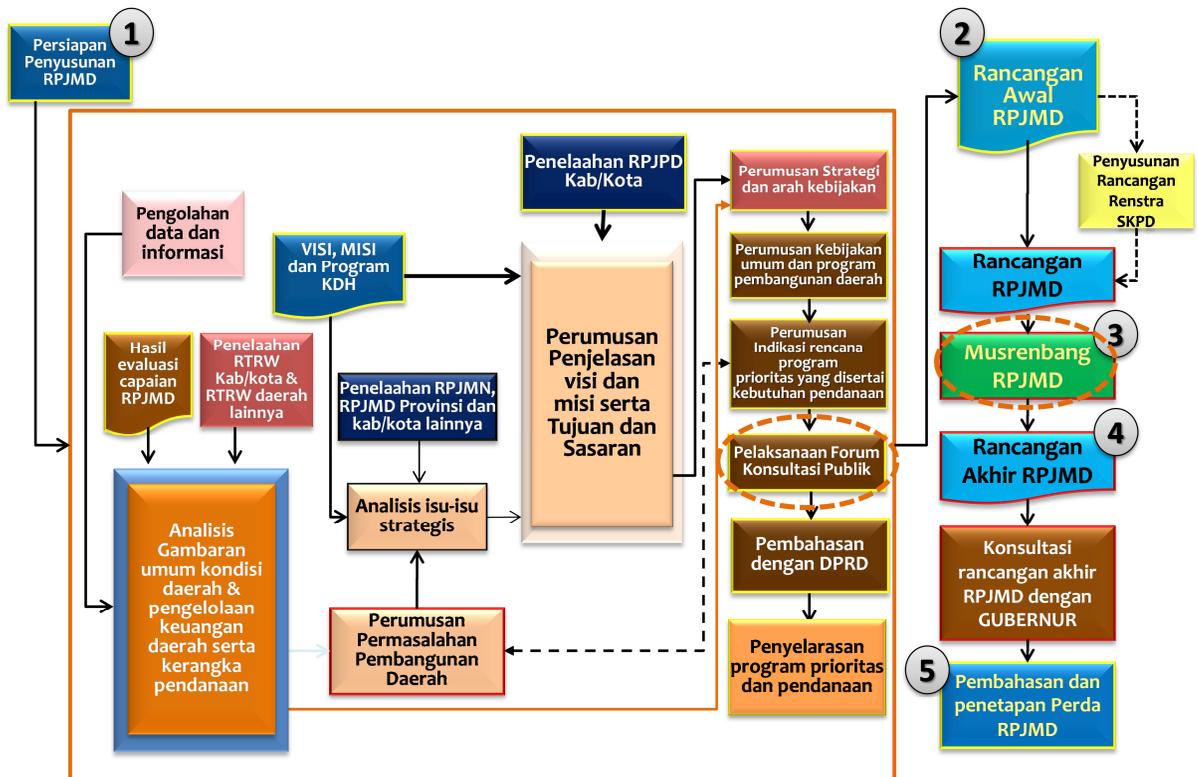
Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 adalah kesinambungan dari pembangunan lima tahun sebelumnya karena merupakan Tahap ketiga dari RPJP Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005, oleh karena itu arah pembangunan dan skala prioritas pembangunannya harus mengacu kepada arah pembangunan dan skala prioritas pembangunan yang tertuang pada dokumen RPJP tersebut.

RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk lima tahun, sehingga harus dapat mengakomodir semua potensi, kebutuhan dan kepentingan pembangunan daerah, begitu juga dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan daerah provinsi dan kepentingan nasional. Di samping itu, Pemerintah Daerah harus taat azas dan menaati semua aturan dalam mengimplementasikan serta menjabarkan lebih lanjut program dan kegiatan pembangunan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan dukungan sumber daya terutama dukungan dana sesuai kemampuan keuangan daerah.



Gambar 1.1

Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran



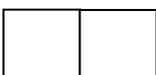
- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah urusan yang bersifat konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut, maka sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kedua urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi dasar

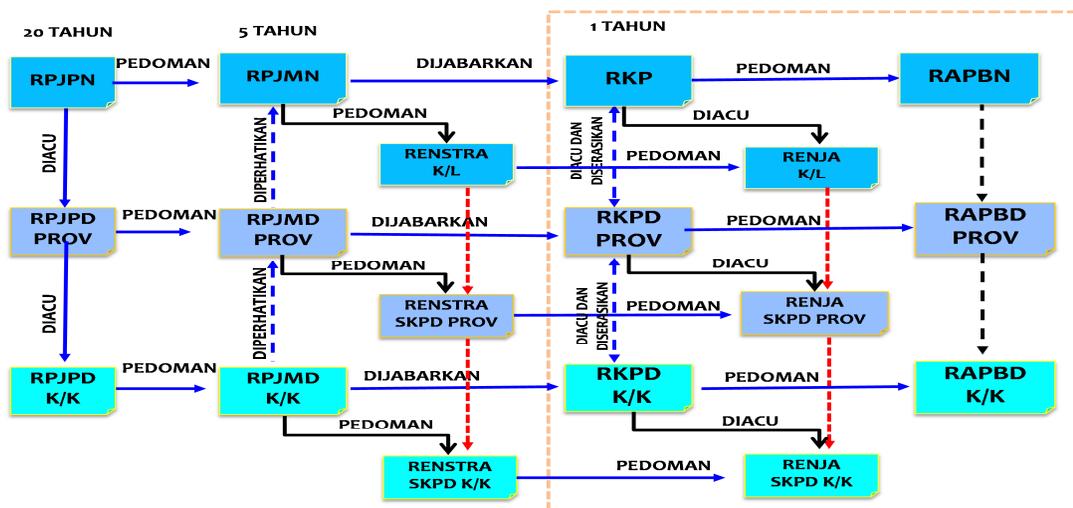


kewenangan otonomi bagi pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan atau penugasan dari pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip kewenangan otonomi tersebut, maka menjadi bahan dan pertimbangan utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Agar RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan pemerintah propinsi maka perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

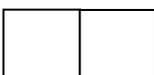
1. Hubungan RPJMD dengan RPJM Nasional

--	--

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di Daerah akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025 dan RPJM Nasional 2014-2019, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Keterkaitan
 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019
 Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021**

No Urut Prioritas	Nawacita/ Prioritas Pembangunan Nasional	No Urut Prioritas	Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok
1	Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN		
2	Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	10	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	7	Peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi
		8	Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran
4	Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.		
5	Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	1	Peningkatan partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan
		2	Peningkatan



			kualitas dan pemerataan pendidikan
		3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		4	Pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat
No Urut Prioritas	Nawacita/ Prioritas Pembangunan Nasional	No Urut Prioritas	Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok
6	Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	6	Penguatan kedaulatan pangan
7	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	5	Pengembangan pariwisata, UMKM dan investasi dan sektor ekonomi lainnya
8	Akan melakukan revolusi karakter bangsa	9	Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh Pemerintahan Nagari yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan
9	Akan mempertahankan Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.		

2. RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJPD Kabupaten Solok

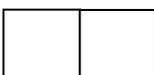
RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program jangka menengah daerah juga memuat visi, misi, arah dan kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka panjang. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD



dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Keterkaitan
 RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 dengan
 RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021**

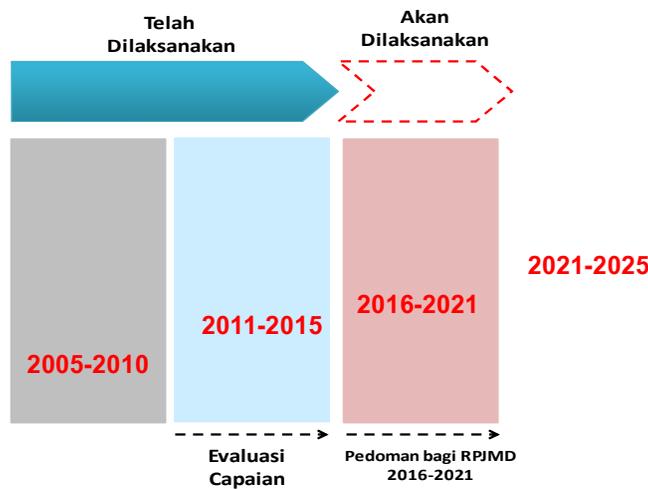
No Urut Misi	Misi RPJP	No Urut Misi	Misi RPJMD
1	Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang mandiri serta didorong oleh pemerintah daerah	3	Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
2	Mewujudkan Penataan Masyarakat Yang Mampu Menyelaraskan Kehidupannya dengan arus modernisasi dan globalisasi	1	Menyukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun
		2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
		4	Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
3	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Antisipatif, Fasilitatif, Profesional dan Proporsional, Transparansi dan Akuntabel	5	Memantapkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (good governance and clean government)
4	Mewujudkan Sarana dan Prasarana	3	Meningkatkan peluang dan akses ekonomi



			masyarakat yang lebih luas didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
--	--	--	---

Gambar 1.3
 Tahapan Pembangunan

Tahapan RPJPD Kabupaten Solok



3. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi

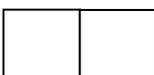
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam penyusunan dan pembahasan RPJMD, dimaknai perlunya keserasian dan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah Provinsi. Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi tentu lokusnya berada pada Daerah Kabupaten/Kota, di samping itu pelaksanaan asas dekonsentrasi berada di tingkat provinsi sebagai konsekuensi dari Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dibarengi pula dengan kewenangan otonomi yang bersifat konkuren. Secara eksternalitas hubungan RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi semakin kuat dan harus bersinergi antara pola perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi. Sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Solok dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam implementasinya akan saling mendukung dan mengisi serta memperkuat hubungan kabupaten

--	--

dengan provinsi yang pada gilirannya keberhasilan pembangunan Kabupaten Solok juga merupakan keberhasilan pembangunan provinsi, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterkaitan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok tahun 2016-2021

No Urut Prioritas	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	No Urut Prioritas	Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok
1	Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat	9	Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh Pemerintahan Nagari yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan
2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	10	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1	Peningkatan partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan
		2	Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan
4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5	Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis	6	Penguatan kedaulatan pangan
6	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi	5	Pengembangan pariwisata, UMKM dan investasi dan sektor ekonomi lainnya
7	Pengembangan Kemaritiman & Kelautan		
8	Penurunan Tingkat kemiskinan, Pengangguran, Daerah Tertinggal	8	Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran



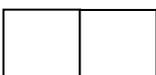
9	Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur	7	Peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi
10	Pelesatarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam	4	Pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat

4. RPJMD Kabupaten Solok dengan Renstra SKPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok.

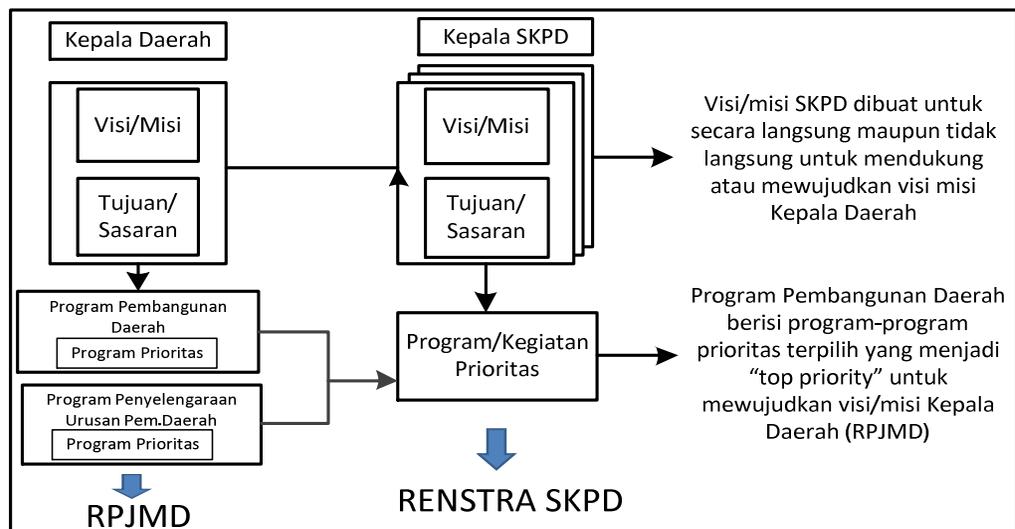
Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Bupati dan wakil Bupati dalam RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD tersebut



bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1-4
 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



5. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

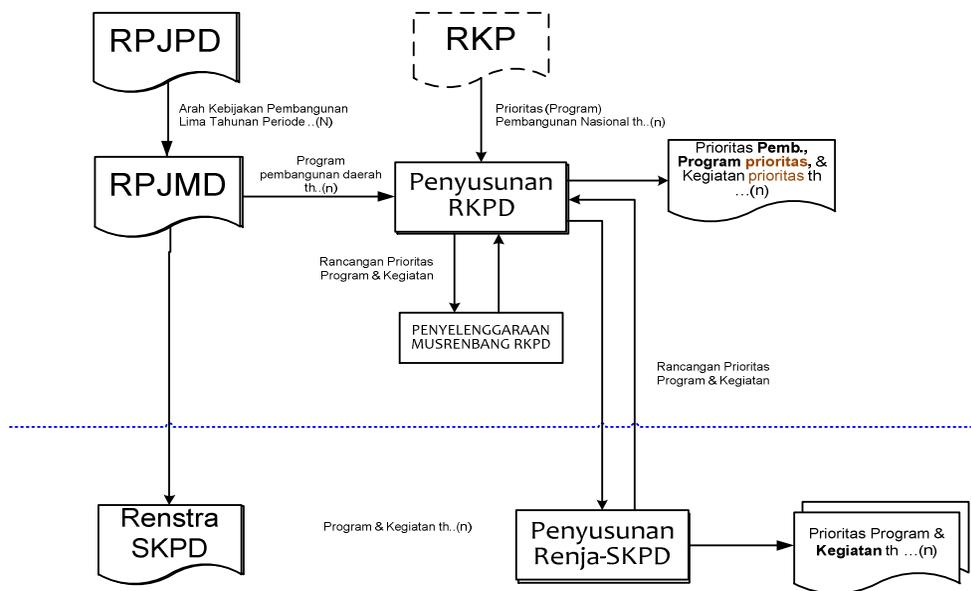
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Solok yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Solok yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta RPJM Nasional. Berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta

--	--

kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1-5
 Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

6. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok berpedoman pada RTRW Kabupaten Solok yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok



Tahun 2012-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok tersebut, Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Solok meliputi:

- a. pengembangan organisasi ruang yang efisien melalui susunan pusat kegiatan yang berhirarki mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten Solok;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana yang mengintegrasikan seluruh pusat kegiatan wilayah Kabupaten Solok dan memberikan layanan sebesar-besarnya bagi permukiman yang ada pada wilayah Kabupaten Solok;
- c. pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP dan menambah kawasan lindung sesuai kewenangan daerah;
- d. pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- e. perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan hutan ke kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan



keamanan negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- f. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

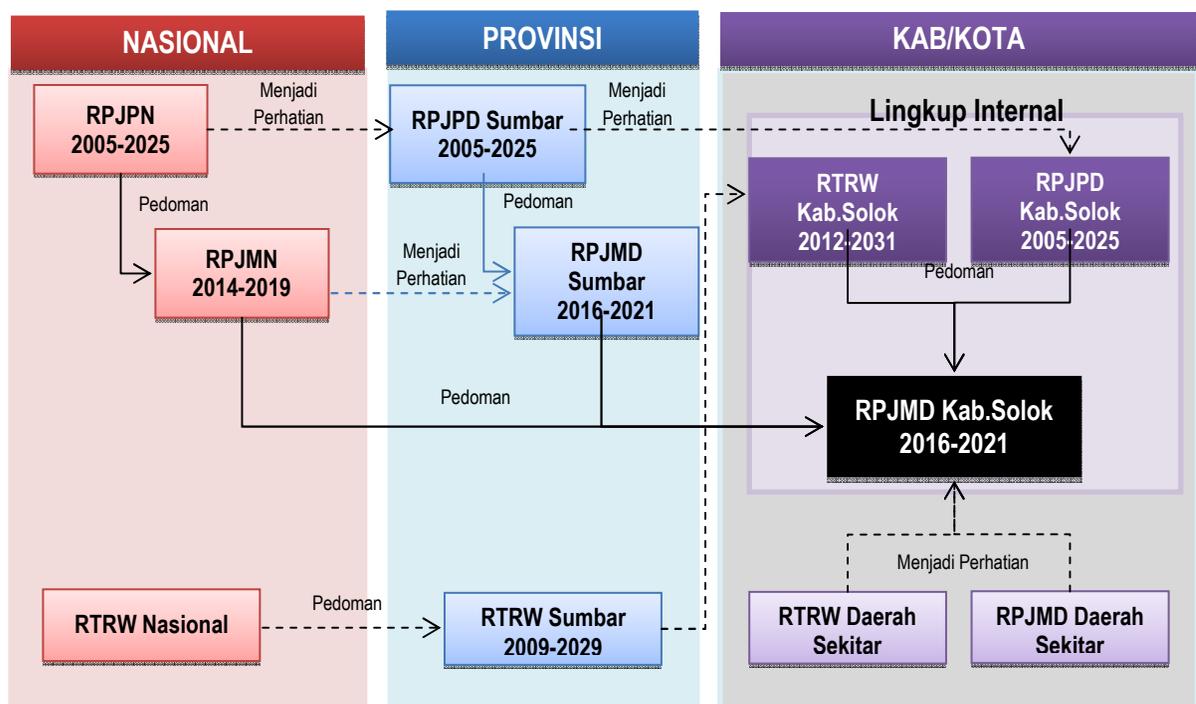
7. RPJMD Kabupaten Solok dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Solok, yaitu:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Solok; dan
- d. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

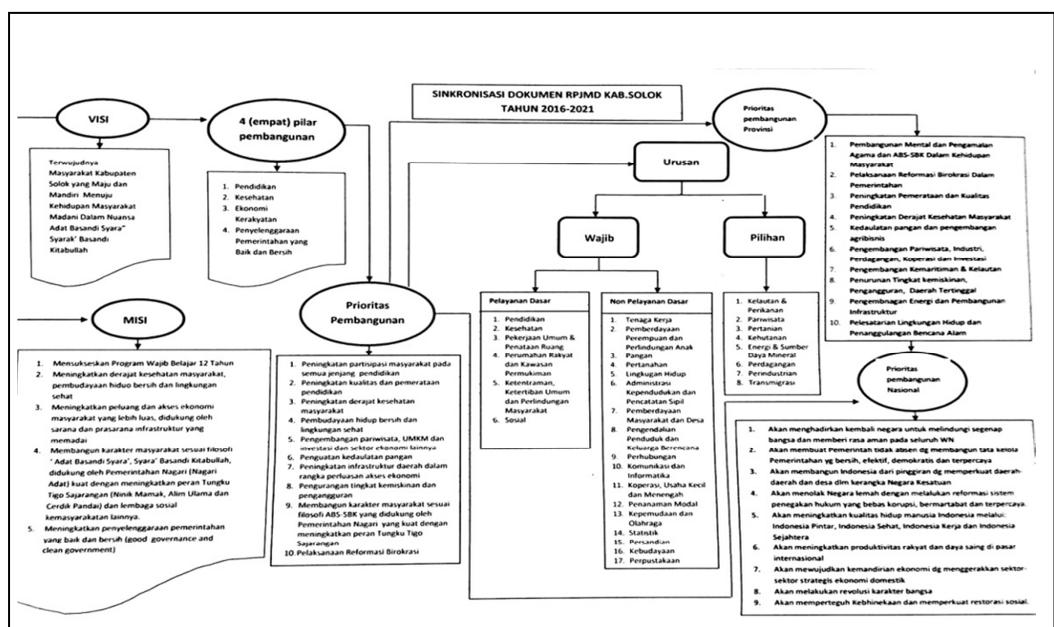
Skema hubungan antara RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.

Gambar 1-6
 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Solok dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR :
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

Dalam menyusun RPJMD ini selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/ kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Secara terperinci hubungan antar dokumen dapat dilihat pada gambar berikut ini :



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Solok mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 10 (sepuluh) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar hukum penyusunan,
- 1.3 Hubungan antar dokumen,
- 1.4 Sistematika penulisan,
- 1.5 Mmaksud dan tujuan

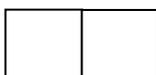


- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.1 Aspek geografi dan demografi
 - 2.2 Aspek kesejahteraan masyarakat,
 - 2.3 Aspek Pelayanan umum
 - 2.4 Aspek daya saing daerah,
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 - 3.1 Kinerja keuangan masa lalu
 - 3.2 Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu
 - 3.3 Kerangka pendanaan
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - 4.1 Permasalahan pembangunan
 - 4.2 Isu strategis
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Solok sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan Tahun 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling



melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola rencana dan pola pelaksanaan.

1.5.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 bertujuan sebagai berikut:

1. menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan daerah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat dan *stakeholders* (pemangku kepentingan) lainnya;
2. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, serta meningkatkan daya saing daerah dari berbagai bidang kehidupan masyarakat;
3. merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam menyusun Renstra SKPD periode 2016-2021;
4. merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan;
5. menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025;
6. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
7. menetapkan indikator kinerja SKPD sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Solok untuk tahun 2016-2021.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Geografi

Secara geografis Kabupaten Solok berada pada posisi 01°20'27" - 01°21'39" Lintang Selatan, 100°25'00" - 100°33'43" Bujur Timur dengan luas 373.800 Ha (3.738.00 Km²) dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan;
3. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang; dan
4. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.

Secara administratif Kabupaten Solok terbagi dalam 14 kecamatan, 74 Nagari dan 414 Jorong.

Kecamatan yang memiliki nagari terbanyak adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas masing-masing memiliki 9 nagari, sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari terkecil terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing-masing hanya



memiliki 2 nagari. Kecamatan yang memiliki jorong terbanyak adalah Kecamatan X Koto Diatas dengan jumlah 52 jorong dan kecamatan yang memiliki jorong paling sedikit adalah Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Junjung Sirih dengan jumlah masing-masing 11 jorong sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.1
Luas Wilayah Per-Kecamatan**

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	NAGARI	JORONG	LUAS DAERAH (HA)
1.	Pantai Cermin	S u r i a n	2	28	36.600
2.	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	4	39	43.900



3.	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	3	20	28.400
4.	Payung Sekaki	Kubang Nan Duo	3	11	39.200
5.	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	5	20	57.500
6.	Lembang Jaya	Bukik Sileh	6	43	9.400
7.	Danau Kembar	Sp. Tj. Nan IV	2	19	7.600
8.	Gunung Talang	Talang	8	40	38.500
9.	Bukit Sundi	Muaro Paneh	5	20	10.900
10.	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	9	28	17.100
11.	Kubung	Selayo	8	37	19.200
12.	X Koto Singkarak	Singkarak	8	46	25.113
13.	Junjung Sirih	Paninggahan	2	11	14.687
14.	X Koto Diatas	Tanjung Balik	9	52	25.700
	TOTAL		74	414	373.800

Sumber : Keputusan Bupati Solok Nomor 100-592-2012

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas adalah kecamatan Tigo Lurah dengan luas 57.500 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Danau Kembar dengan luas 7.600 Ha.

Demografi

Penduduk Kabupaten Solok Tahun 2015 berjumlah 363.684 jiwa atau naik sebesar 0,07% dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Solok Tahun 2014 yakni sebanyak 361.095 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk Kabupaten Solok terdiri dari 179.720 laki-laki dan 183.963 perempuan. Seperti halnya di wilayah lain di Sumatera Barat, penduduk laki-laki di Kabupaten Solok lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. *Sex ratio* penduduk Kabupaten Solok sebesar 98. Kecamatan Kubung memiliki proporsi jumlah penduduk yang paling besar yakni sebanyak 16,13 % atau 58.678 jiwa disusul Kecamatan Lembah Gumanti dengan proporsi sebesar 15,78% atau 57.392 jiwa. Kecamatan Payung Sekaki menjadi kecamatan dengan proporsi jumlah penduduk paling kecil yakni 8.302 jiwa atau 2,28%. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Solok menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Solok Tahun 2015 sebesar 97,29 jiwa/KM². Dengan kepadatan sebesar 97,29 jiwa/KM², artinya secara rata-rata setiap satu kilo meter persegi wilayah Kabupaten Solok ditempati oleh sekitar 98 jiwa. Kecamatan Kubung menjadi kecamatan dengan penduduk yang paling padat yakni 305,61 jiwa/KM² atau terdapat sekitar 306 jiwa penduduk dalam setiap KM² wilayah Kecamatan Kubung. Dengan



luas wilayah yang paling besar, Kecamatan Tigo Lurah mempunyai kepadatan penduduk yang paling kecil yakni sebesar 16,71 jiwa/KM². Kepadatan penduduk Kabupaten Solok, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan pada Tahun 2015

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
1.	Pantai Cermin	10.241	10.600	20.841	97
2.	Lembah Gumanti	28.848	28.544	57.392	101
3.	Hiliran Gumanti	8.474	8.364	16.838	101
4.	Payung Sekaki	4.174	4.128	8.302	101
5.	Tigo Lurah	4.988	5.077	10.065	98
6.	Lembang Jaya	13.319	13.501	26.820	99
7.	Danau Kembar	9.852	9.871	19.723	100
8.	Gunung Talang	24.569	24.917	49.486	99
9.	Bukit Sundi	11.391	12.205	23.596	93
10.	IX Koto Sei. Lasi	4.874	4.873	9.747	100
11.	Kubung	29.040	29.638	58.678	98
12.	X Koto Diatas	8.579	9.384	17.963	91
13.	X Koto Singkarak	15.654	16.559	32.213	95
14.	Junjung Sirih	5.717	6.302	12.019	91
	JUMLAH	179.720	183.963	363.684	98

Sumber : BPS Kabupaten Solok

Tabel 2.3
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Pada Tahun 2015

NO	KECAMATAN	LUAS DAERAH (Km2)	PENDUDUK	KEPADATAN
1.	Pantai Cermin	366,00	20.841	56,94
2.	Lembah Gumanti	459,72	57.392	124,84
3.	Hiliran Gumanti	263,28	16.838	63,95
4.	Payung Sekaki	364,50	8.302	22,78
5.	Tigo Lurah	602,50	10.065	16,71



6.	Lembang Jaya	99,90	26.820	268,47
7.	Danau Kembar	70,10	19.723	281,36
8.	Gunung Talang	385,00	49.486	128,54
9.	Bukit Sundi	109,00	23.596	216,48
10.	IX Koto Sungai Lasi	171,00	9.747	57,00
11.	Kubung	192,00	58.678	305,61
12.	X Koto Diatas	257,00	17.963	69,89
13.	X Koto Singkarak	295,50	32.213	109,01
14	Junjung Sirih	102,50	12.019	117,26
	JUMLAH	3.738,00	363.684	97,29

Sumber : BPS Kabupaten Solok

Selanjutnya untuk melihat data tentang jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Solok Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	19.985	19.261	39.246
5 – 9	19.777	19.194	38.971
10 – 14	18.405	17.795	36.200
15 – 19	16.525	15.972	32.497
20 – 24	13.498	13.297	26.795
25 – 29	14.427	13.945	28.372
30 – 34	12.532	12.980	25.512
35 – 39	11.860	12.246	24.106
40 – 44	10.688	11.422	22.110
45 – 49	9.975	10.798	20.773
50 – 54	9.199	10.053	19.252
55 – 59	8.414	8.847	17.261
60 – 64	5.745	5.930	11.675
65 – 69	3.479	4.122	7.601
70 – 74	2.574	3.451	6.025
74 +	2.638	4.650	7.288
Jumlah	179.721	183.963	363.684

Sumber : BPS Kabupaten Solok



Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun merupakan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Solok dengan jumlah penduduk sebanyak 39.246 orang dan diikuti dengan kelompok umur 5-9 Tahun sebanyak 38.971 orang.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan sistem yang baru dimana tahun dasar yang digunakan tidak lagi Tahun 2000 tapi Tahun 2010 maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok selama 5 (lima) Tahun terakhir mengalami fluktuatif sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4. Pada Tahun 2015 perekonomian Kabupaten Solok mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan Tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 10,06 %.

Tabel 2.5
Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,12	5,02	6,16	5,63	*5,79	**5,43

Sumber : BPS Kab. Solok

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

2.2.2. Pendapatan Perkapita

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	17,67	19,48	21,51	23,71	*26,02	**27,84

Sumber : BPS Kab. Solok

*Angka sementara

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan perkapita penduduk yang dihitung berdasarkan PDRB per Kapita terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 10,22 % pada



Tahun 2011, 10,46% pada Tahun 2012, 9,61% pada Tahun 2013, 12,10 % pada Tahun 2014 dan 2,34% pada Tahun 2015.

2.2.3. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok tergambar pada data-data jumlah Keluarga Prasejahtera (sangat miskin) dan Keluarga Sejahtera I (miskin) dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Solok Tahun 2010-2014

No	Klasifikasi Keluarga	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pra Sejahtera	8.979	8.357	9.105	9.637	8.855
2	Sejahtera I	18.966	18.346	18.427	19.454	18.715
3	Jumlah Keluarga	92.308	92.715	93.169	95.204	96.574
4	Persentase	30.27	28.80	29.55	30.56	28,55

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok

Pada Tahun 2014 jumlah persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Solok adalah 28,55%, angka ini jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2013 mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tidak lagi melakukan pendataan terhadap Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I, hal ini disebabkan karena adanya Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dimana instansi yang berwenang mengeluarkan data tentang kemiskinan adalah SKPD yang menangani urusan sosial.

Sementara jika dilihat dari indikator kemiskinan, maka dari Tahun 2010 s/d 2015 dapat terlihat perkembangan kemiskinan di Kabupaten Solok pada Tabel berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,25	88,81	89,97	89,74	90,58	*90,96



2	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	265.342	279.674	296.812	316.756	329.385	*345.955
3	Poverty Gap Index/ P_1 (%)	1,80	1,62	1,09	1,37	0,80	*0,02
4	Poverty Severity Index/ P_2 (%)	0,41	0,37	0,22	0,29	0,14	*0,09
5	Persentase Penduduk Miskin / P_0	11,75	11,19	10,03	10,26	9,42	*9,04

Sumber : BPS Kabupaten Solok

*Angka sementara

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah. Data pada Tabel 2.7 tersebut dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, penduduk di atas garis kemiskinan semakin meningkat walaupun sempat turun pada Tahun 2013. Dengan semakin meningkatnya penduduk yang berada di atas garis kemiskinan menandakan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Solok terus mengalami penurunan. Berdasarkan indikator *Poverty Gap Index/ P_1* dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014, penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan *Poverty Severity Index/ P_2* mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Walaupun Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mengalami penurunan namun pemerintah Kabupaten Solok masih harus terus berupaya agar pada tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk miskin semakin turun mengingat angka kemiskinan Kabupaten Solok masih di atas angka kemiskinan propinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Solok mencapai 9,04 % sedangkan angka kemiskinan propinsi Sumatera Barat sebesar 6,71%.



2.2.4. Pendidikan

Analisis kinerja urusan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dari aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum. Pada Aspek kesejahteraan masyarakat kinerja urusan pendidikan, indikator utama yang menjadi ukuran keberhasilan upaya pembangunan adalah angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi murni.

Perkembangan indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni di Kabupaten Solok dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Pendidikan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melek Huruf (%)	97,19	97,21	97,24	97,40	97,50	99,87
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,60	8,03	8,04	8,05	8,65	8,66
3	Angka Partisipasi Kasar (%) :						
	- APK SD/MI/Paket A	113,46	109,58	121,39	108,71	115,12	110,95
	- APK SMP/MTs/Paket B	84,02	82,11	83,27	83,71	93,86	93,25
	- APK SMA/SMK/MA/Paket C	50,88	56,11	54,96	56,83	55,27	59,16
4	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (%) :						
	- APT SD/MI/Paket A	28,17	26,24	25,40	28,50	29,29	28,49
	- APT SMP/MTs/Paket B	16,47	15,56	16,68	17,37	17,37	17,37
	- APT SMA/SMK/MA/Paket C	14,29	12,87	13,72	14,37	14,37	12,37
5	Angka Partisipasi Murni (%) :						
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,76	94,25	94,61	93,12	98,67	94,99
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	65,13	61,44	62,31	65,44	73,83	72,92
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	36,18	45,57	43,98	46,48	41,52	48,44

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



Berdasarkan Tabel 2.9 diatas dapat dilihat bahwa usaha pemerintah Kabupaten Solok untuk meningkatkan angka melek huruf menunjukkan hasil yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf yang terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian angka melek huruf Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 maka angka melek huruf Kabupaten Solok Tahun 2015 masih berada di bawah angka melek huruf Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yaitu sebesar 99,92%.

Dengan semakin meningkatnya angka melek huruf tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Solok yang buta huruf semakin berkurang dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, karena pertumbuhan penduduk terus mengalami kenaikan maka upaya peningkatan jumlah penduduk melek huruf masih perlu diupayakan untuk masa yang akan datang.

Pada Tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Solok baru mencapai 8,66 Tahun artinya setara dengan tingkat SLTP, angka ini berada di atas capaian rata-rata lama sekolah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yaitu 8,29 Tahun. Kenaikan rata-rata lama sekolah pertahun baru mencapai 0,2 tahun. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini didukung oleh program pemerintah Kabupaten Solok dalam bentuk pemberian bea siswa serta dari lembaga lainnya.

Selanjutnya adalah indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada Tahun 2015, APK pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014 walaupun mengalami turun pada Tahun 2013, sedangkan APK pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat dan APK pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat justru mengalami penurunan dibanding capaian pada Tahun 2014.

Pada Tahun 2015, seperti halnya Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar atau sederajat dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP atau sederajat mengalami penurunan dari capaian pada Tahun 2014, namun Angka Partisipasi Murni (APM) SMA atau sederajat mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014.

Berdasarkan perkembangan APK dan APM selama 5 tahun terakhir dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti



pendidikan pada jenjang pendidikan SD atau sederajat dan pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat sangat baik. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat menunjukkan partisipasi masyarakat yang masih kurang, kondisi ini diantaranya disebabkan oleh banyaknya masyarakat Kabupaten Solok mengirim anaknya untuk bersekolah di luar Kabupaten Solok seperti ke Kota Solok, Kota Padang, Kota Padang Panjang dan lain-lain. Dari data-data tersebut juga dapat dilihat bahwa APK maupun APM ditingkat pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan APK dan APM ditingkat pendidikan SLTP dan SLTA, hal ini merupakan dampak adanya program wajib belajar 9 Tahun.

Selanjutnya indikator urusan pendidikan juga dapat dilihat dari perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT). Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) pada jenjang pendidikan SD atau sederajat mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014. Sedangkan APT pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat tidak mengalami perubahan dan APT pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2014.

2.2.5. Kesehatan

Pada Aspek kesejahteraan masyarakat, kinerja urusan kesehatan ditunjukkan oleh indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, dan Persentase Balita Gizi Buruk. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial
Bidang Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kelangsungan hidup bayi (orang)	988,04	991,93	986,72	985,74	982,63	983,53
2	Angka usia harapan hidup (Tahun)	66,60	66,95	67,26	67,50	70,02	*70,02
3	Persentase balita gizi buruk	0,031	0,036	0,044	0,048	0,027	0,024

Sumber : Dinas Kesehatan

*Angka sementara



Pada bidang kesehatan dapat dilihat bahwa angka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mencapai umur 70,02 Tahun. Angka usia harapan hidup ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, ini menandakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Solok meningkat dari waktu ke waktu selama lima tahun terakhir. Capaian ini berada di atas capaian usia harapan hidup propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yaitu sebesar 68, 32 Tahun.

Kemudian jika dilihat dari indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, perkembangan indikator ini dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 terus mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2014 angka ini menjadi sebesar 982,63. Angka 982,63 menunjukkan bahwa dari 1.000 bayi yang lahir 982,63 orang hidup dan 17,37 bayi meninggal. Angka Kelangsungan Hidup Bayi yang terus mengalami penurunan ini sama artinya dengan semakin tingginya Angka Kematian Bayi. Kondisi ini pada Tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sehingga mencapai angka sebesar 983,53, dengan meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi berarti Angka Kematian Bayi justru mengalami penurunan. Sedangkan angka persentase balita gizi buruk mengalami penurunan sehingga pada Tahun 2015 menjadi sebesar 0,024% dengan jumlah balita gizi buruk berkurang dari 10 pada Tahun 2014 menjadi 9 pada Tahun 2015.

2.2.6. Tenaga Kerja

Perkembangan kinerja urusan Tenaga Kerja dapat dilihat dari indikator rasio penduduk yang berkerja. Perkembangan indikator tersebut dari Tahun 2011-2014 mengalami fluktuatif dan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 maka capaian Tahun 2015 mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada indikator Angkatan Kerja dan pada Tahun 2015 mencapai angka sebesar 170.984 orang. Kenaikan pada kedua indikator tersebut tidak diikuti oleh indikator rasio penduduk yang bekerja karena pada Tahun 2015 rasio penduduk yang bekerja justru mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini :

--	--

Tabel 2.11
Perkembangan Rasio Jumlah Penduduk yang Bekerja
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penduduk yang bekerja (Orang)	161.700	148.795	141.543	136.099	154.971	*164.191
2	Angkatan kerja (Orang)	166.775	158.284	148.611	144.350	160.679	*170.984
3	Rasio penduduk yang bekerja	96,95	94,01	95,24	94,28	96,44	*96,03

Sumber : BPS Kab. Solok

***Angka Sementara**

2.2.7. Kebudayaan

Analisis kinerja atas seni dan budaya dapat dilihat pada indikator jumlah grup kesenian. Perkembangan terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Kebudayaan di
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Grup Kesenian	160	165	170	175	177	177
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	6	6	6	6	6	5
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	3	2	2	2
4	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	64	65,71	71,43	85,71	89,19	94,59

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja di bidang kebudayaan dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung kelestarian budaya di Kabupaten Solok antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya serta pelestarian terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Kinerja di bidang ini tidak mengalami perkembangan yang tidak berarti, hal ini dapat dilihat dari persentase pelestarian Benda, Situs



dan Kawasan Cagar Budaya pada Tahun 2015 yang hanya meningkat dari 89,19 % menjadi 94,59%.

2.2.8 Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.13
Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Klub Olah Raga	25	25	25	98	98	98
2	Jumlah Gedung Olah Raga	14	14	14	63	63	54
3	Jumlah Organisasi Olah Raga	25	25	25	25	25	32
4	Jumlah Kegiatan Olah Raga	22	22	22	26	28	26
5	Jumlah Lapangan Olah Raga	196	196	196	563	563	481
6	Jumlah Organisasi Pemuda	51	51	51	51	51	18
7	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	2	10	10	12

**Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Berdasarkan data sebagaimana dilihat pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan olah raga di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh turunnya jumlah gedung olah raga dan lapangan olah raga. Hal yang sama juga terjadi dengan indikator kinerja pemuda, yang ditunjukkan dengan turunnya jumlah organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pendidikan

Pada Aspek Pelayanan Umum kinerja urusan pendidikan ditunjukkan oleh indikator angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio guru terhadap murid, sarana pendidikan dengan kondisi baik, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan dan kualifikasi guru. Perkembangan indikator Angka Partisipasi Sekolah yang



menunjukkan perbandingan jumlah anak yang sekolah dengan jumlah anak usia sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid pada bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah (%)	102,15	92,49	94,33	94,94	98,45	97,03
2	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah :						
	- SD/MI	1:139	1:159	1:158	1:161	1:148	1:131
	- SMP/MTs	1: 235	1:232	1:229	1:234	1:211	1:210
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1:15	1:13	1:14	1:14	1:13	1:13
4	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata	1:15	1:13	1:14	1:14	1:13	1:13

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan data Angka Partisipasi Sekolah dapat dilihat bahwa dari tahun 2011- 2014 angka ini mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,98% namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung sekolah mengalami penurunan. Penurunan ini juga ditunjukkan oleh rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah yang juga mengalami sedikit penurunan. Sedangkan perkembangan Rasio Guru terhadap Murid dan Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 nilainya tetap.

Selanjutnya pada pendidikan menengah, perkembangan Angka Partisipasi Sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah, Rasio Guru terhadap Murid dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.15
Perkembangan Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan Menengah
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah (%)	54,34	54,34	55,49	58,44	58,99	57,30



2	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	1:463	1:478	1:460	1:450	1:453	1:435
3	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9	1:17

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas dilihat bawah perkembangan Angka Partisipasi Sekolah dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan namun pada Tahun 2015 angka ini mengalami sedikit penurunan sehingga menjadi sebesar 57,30%. Seperti halnya Angka Partisipasi Sekolah pada pendidikan dasar, maka penurunan Angka Partisipasi Sekolah pada pendidikan menengah ini menunjukkan adanya sedikit penurunan daya tampung sekolah. Sedangkan jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, indikator ini menunjukkan tidak adanya perkembangan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014.

Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Solok selalu berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan kondisi bangunan sekolah di seluruh jenjang pendidikan agar layak pakai. Tabel 2.16 berikut menunjukkan perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Solok.

Tabel 2.16
Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	58,37	67,12	68,68	69,34	70,76	83,82
2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%)	77,73	75,25	75,42	75,49	75,35	76,91
3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik (%)		94,57	94,90	95,59	95,64	92,58

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kondisi bangunan sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi baik terus mengalami kenaikan dengan angka rata-rata sebesar 4,17% begitu juga dengan kondisi bangunan sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,41%. Sedangkan kondisi bangunan sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dari Tahun 2011-2014 terus mengalami kenaikan namun capaian pada Tahun 2015 mengalami



penurunan dengan angka yang hanya tercapai 92,58%. Belum maksimalnya peningkatan kondisi bangunan sekolah di Kabupaten Solok yang dalam keadaan baik disebabkan oleh alokasi dana untuk merehabilitasi dan membangun gedung sekolah yang terbatas sedangkan bangunan sekolah yang harus diperbaiki sangat banyak. Perbaikan dan pembangunan gedung sekolah tersebut sangat tergantung kepada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam rangka mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok maka berbagai kegiatan telah dilakukan sehingga APK PAUD dari tahun 2011 sampai Tahun 2015 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 13,47%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah siswa seluruhnya pada jenjang TK/RA/TPA/PAUD	7.570	9.790	12.217	14.851	14.974	17.743
2	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun	22.117	23.592	22.391	23.885	23.885	23.587
3	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	19,11	21,31	45,37	62,18	65,50	75,22

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Selanjutnya indikator kinerja urusan pendidikan pada aspek pelayanan umum juga ditunjukkan oleh indikator Angka Putus Sekolah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,42	0,28	0,27	0,21	0,57	0,25
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,01	0,18	0,16	0,15	0,23	0,15
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,47	0,08	0,06	0,05	0,70	0,29

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, baik ditingkat SD atau sederajat, SMP atau sederajat, maupun SMA atau sederajat, indikator Angka Putus Sekolah di Kabupaten Solok terus mengalami penurunan. Namun pada Tahun 2014 Angka Putus Sekolah disemua jenjang pendidikan justru mengalami kenaikan. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok sehingga beberapa kegiatan telah dilakukan sehingga angka ini pada tahun 2015 mengalami penurunan.

Berikutnya adalah indikator angka kelulusan dan angka melanjutkan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	99,56	99,89	99,99	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	96,70	93,35	96,67	99,24	99,35	99,92
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	92,05	98,03	98,93	99,12	99,06	99,94
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	98,31	98,42	86,29	84,77	89,07	89,69
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	88,85	59,86	68,40	70,83	64,04	65,08

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan untuk semua jenjang pendidikan selama 5 tahun terakhir cukup menggembirakan yaitu hampir semuanya mempunyai nilai di atas 95%. Angka Kelulusan pada tingkat SD atau Sederajat dan SMP atau sederajat terus mengalami kenaikan bahkan mulai Tahun 2014 Angka Kelulusan pada tingkat SD atau Sederajat telah mencapai 100%. Sedangkan ditingkat SMA atau sederajat Angka Kelulusan dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2014 menurun menjadi 99,06 dan kemudian dengan berbagai upaya yang telah dilakukan maka pada Tahun 2015 kembali naik menjadi 99,94%%.

Sementara indikator angka melanjutkan baik dari tingkat SD atau sederajat ke tingkat SMP atau sederajat maupun dari tingkat



SMP atau sederajat ke tingkat SMA atau sederajat mengalami fluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, angka melanjutkan dari tingkat SD atau sederajat ke tingkat SMP atau sederajat pada Tahun 2015 hanya mengalami sedikit kenaikan begitu juga dengan angka melanjutkan dari SMP atau sederajat ke SMA atau sederajat.

Rendahnya Angka Melanjutkan dari SMP atau sederajat ke SMA atau sederajat ini memberikan kontribusi terhadap rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Solok yaitu hanya sebesar 8,66 Tahun pada Tahun 2015.

Indikator lain yang tak kalah pentingnya untuk melihat kinerja urusan pendidikan pada Aspek Pelayanan Umum adalah kualitas guru sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20
Perkembangan Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1 Atau D-IV
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Guru SD/MI Yang Memiliki Ijazah S1/D4 (%)	32,48	34,60	43,36	61,49	74,02	91,44
2	Guru SMP/MTs Yang Memiliki Ijazah S1/D4 (%)	69,36	67,41	80,32	83,85	88,33	90,85
3	Guru SMA/MA/SMK Yang Memiliki Ijazah S1/D4 (%)	93,37	96,42	96,68	97,61	95,22	97,63

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Upaya untuk meningkatkan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV terus diupayakan antara lain dengan memberikan bantuan biaya untuk melanjutkan studi bagi guru-guru yang belum S1/D-IV dan memberikan kemudahan untuk izin belajar dari pihak terkait serta adanya kebijakan nasional untuk standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Upaya tersebut cukup berhasil hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV terutama untuk guru SD. Guru SD atau MI mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 34,60% pada Tahun 2011 menjadi 91,44% pada Tahun 2015.

Begitu juga dengan Guru SMP/MTs dimana pada Tahun 2011 jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV hanya sebesar 67,41% menjadi sebesar 90,85% pada Tahun 2015. Sedangkan perkembangan



jumlah Guru SMA/SMK/MA yang berkualifikasi S1/D-IV sangat lambat dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 bahkan mengalami penurunan pada Tahun 2014.

Selain meningkatkan kualitas guru, Pemerintah Kabupaten Solok juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlah guru yang sudah sertifikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan Guru Yang Sudah Sertifikasi
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	TK (Orang)	18	18	24	62	77	121
2	SLB (Orang)	3	4	5	7	8	10
3	SD (Orang)	805	835	1.289	1.579	1.732	2.250
4	SMP (Orang)	513	533	616	662	679	778
5	SMA (Orang)	281	286	293	300	325	332
6	SMK (Orang)	79	79	85	93	117	119
	Jumlah	1.699	1.755	2.312	2.703	2.938	3.610

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan perkembangan indikator lama sekolah dan angka melek huruf maka Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Solok dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu dari 71,73 pada Tahun 2011 meningkat menjadi 73,31 pada Tahun 2014 dan diperkirakan sebesar 73,89 pada Tahun 2015.

2.3.2. Kesehatan

Untuk melihat perkembangan kinerja pelayanan umum urusan wajib di bidang kesehatan dapat menggunakan indikator sebagaimana tertuang pada Tabel berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Indikator Pelayanan Umum Urusan Wajib
di Bidang Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	20,68	16,48	16,34	20,52	16,39	16,24
2	Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesri Per Satuan Penduduk	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,04



3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,002868	0,002835	0,0028116	0,002790	0,002769	0,002769
4	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,1836	0,14	0,14	0,10	0,11	0,1
5	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	1,3512	1,4006	1,2870	1,2835	1,1215	1,32
6	Cakupan Jorong UCI (%)	57,49	60,20	54,05	36,61	71,01	49,39
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	66,94	83,45	73,51	84,39	77,41	76,46
9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	33,09	33,51	40,36	47,04	40,14	39,55
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan Puskesmas (%)	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57
12	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22	116,22
13	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	84,99	100,81	95,13	89,34	110,06	95,84
14	Angaka Kematian Ibu Melahirkan	10	10	8	7	6	7
15	Bed Occupation Rate (BOR)	28,53	28,22	24,00	27,02	17,31	19,95

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

Dari segi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjukkan oleh indikator Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesri Per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk, Cakupan Puskesmas, Cakupan Puskesmas Pembantu dapat dilihat bahwa perkembangan kinerjanya mengalami sedikit penurunan, hal ini karena



tidak adanya penambahan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan, sementara jumlah penduduk terus mengalami kenaikan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada semakin ditingkatkan melalui Program Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bahkan khusus untuk RSUD Arosuka telah mengalami peningkatan status dari Type D ke Type C.

Peningkatan status Rumah Sakit dari Type D ke Type C tidak diiringi oleh peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit baik yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas SDM tenaga medis maupun manajemen rumah sakit. Hal ini dapat dilihat dari data *Bed Occupation Rate* (BOR) Rumah Sakit yang mengalami penurunan dimana pada Tahun 2013 BOR mengalami penurunan dari 27,02 % pada Tahun 2013 menjadi 19,95% pada Tahun 2015.

Dari sisi jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sebagaimana yang ditunjukkan oleh indikator Rasio Dokter Per Satuan Penduduk, Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk, perkembangan kinerjanya juga mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah dokter dan tenaga medis lebih rendah dibanding dengan perkembangan jumlah penduduk.

Selanjutnya pada bidang pelayanan kesehatan dasar khususnya pelayanan kesehatan anak dan ibu dapat dilihat melalui indikator Rasio Posyandu Per Satuan Balita, Cakupan Jorong Universal *Child Immunization (UCI)*, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dan Angka Kematian Ibu Melahirkan. Seluruh indikator tersebut mengalami perkembangan yang berfluktuatif.

Namun jika dibandingkan capaian Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dapat terlihat bahwa indikator Rasio Pos Yandu per Satuan Balita, Cakupan jorong UCI, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan meningkat sehingga menjadi sebanyak 1.641 orang namun yang mendapat penanganan baru 1.134 orang sehingga



cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani pada Tahun 2015 hanya sebesar 69,10%.

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada Tahun 2015 angka ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah ibu bersalin dari 7.918 orang pada Tahun 2014 menjadi sebanyak 7.992 orang pada Tahun 2015, kondisi ini juga diiringi oleh penurunan jumlah ibu bersalin yang mendapat penanganan dimana pada Tahun 2014 sebanyak 6.129 orang menjadi sebanyak 6.111 orang pada Tahun 2015 sehingga Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada Tahun 2015 hanya sebesar 76,46%. Untuk Angka Kematian Ibu Melahirkan, perkembangannya mengalami sedikit penurunan walaupun tidak terlalu signifikan dimana pada Tahun 2014 Angka Kematian Ibu Melahirkan adalah sebanyak 6 orang dan pada Tahun 2015 menjadi sebesar 7 orang.

Cakupan Jorong UCI jika kita bandingkan dengan capaian Tahun 2014, angka ini mengalami penurunan pada Tahun 2015 menjadi sebesar 49,39%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah jorong yang mendapat imunisasi balita dari 289 jorong pada Tahun 2014 menjadi 204 jorong pada Tahun 2015, kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Solok di masa mendatang. Selanjutnya indikator Cakupan Kunjungan Bayi mengalami penurunan pada Tahun 2015 dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah seluruh bayi yang lahir tidak diiringi oleh peningkatan yang signifikan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemudian indikator lain pada bidang pelayanan kesehatan dasar yaitu Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC dan DBD. Pada Tahun 2015 jumlah penderita TBC yang ditemukan dan diobati adalah sebanyak 227 orang, angka ini mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2014 yaitu sebanyak 228 orang. Untuk penyakit DBD, pada Tahun 2015 terdapat peningkatan kasus DBD yang sangat signifikan yaitu dari 64 orang penderita DBD pada Tahun 2014 menjadi 203 kasus pada Tahun 2015. Keseluruhan penderita DBD tersebut dapat ditangani sesuai SOP



sehingga Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD pada Tahun 2015 mencapai angka 100.

2.3.3. Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

2.3.3.1. Agama

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang sehat mental dan spiritualnya, pemerintah Kabupaten Solok melakukan penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK (Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah). Untuk melihat apakah penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK berhasil dicapai dapat dilihat dari perkembangan indikator sarana tempat ibadah, jumlah peserta qurban, jumlah jemaah haji, jumlah masyarakat yang membayar zakat (muzakki) dan jumlah nagari yang menerbitkan Perna Magrib Mengaji dan Jumat Hening. Berikut perkembangan Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk di Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai Tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.23
Perkembangan Rasio Tempat Ibadah
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Bangunan Tempat Ibadah / Jumlah Penduduk / Rasio	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Masjid	312	312	313	314	316	314
2	Langgar	793	793	793	793	793	741
3	Mushalla	424	424	424	424	424	291
	Jumlah	1.529	1.529	1.530	1.531	1.533	1.192
4	Jumlah Penduduk	348.566	352.705	355.077	358.383	361.095	363.684
5	Rasio Tempat Ibadah	4,38	4,33	4,31	4,27	4,24	3,28

Sumber : Kemenag Kabupaten Solok

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Rasio Tempat Ibadah mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena penambahan Tempat Ibadah lebih kecil dari pada penambahan jumlah penduduk.



Selain rasio tempat ibadah, penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK dapat dilihat dari indikator sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.24
Perkembangan Indikator Penataan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya sesuai Falsafah ABS-SBK di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah peserta Qurban	11.239	9.018	15.765	15.765	15.184	16.364
2	Jumlah Jemaah Haji	158	158	163	123	124	209
3	Jumlah Masyarakat yang Berzakat	254.987	256.192	356.889	356.889	269.221	*270.525
4	Jumlah Nagari yang menerbitkan Perna Magrib Mengaji dan Jumat Hening	-	-	-	14	14	14

Sumber : Kemenag dan Bag. Kesra Kabupaten Solok

Berdasarkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 2.24 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan indikator tersebut dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 berfluktuasi. Jika dibandingkan capaian Tahun 2015 dengan Tahun 2014 maka capaian indikator jumlah peserta qurban dan jumlah jemaah haji mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai dampak kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelayanan pada peningkatan informasi keilmuan masyarakat tentang agama masih didominasi oleh da'wah secara lisan. Pengadaan informasi cetakan seperti buku bimbingan ibadah, sosial, perilaku dalam bahasa yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat awam perlu menjadi perhatian.

Selain data-data tersebut, program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan telah dilakukan antara lain terlaksananya pengiriman kafilah ke MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat, MTQ Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, wirid remaja, kunjungan Tim Ramadhan, wirid pengajian di kantor maupun majelis taklim, dan pemberian



insentif kepada Guru TPA/TPSA, Imam/Khatib/Gharin, Mubaligh dan Penyuluh Agama.

2.3.3.2 Perencanaan Pembangunan

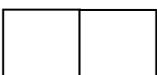
Peningkatan kualitas pembangunan daerah sangat tergantung pada aspek perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

- a. penyediaan data-data pendukung yang terkait dengan perencanaan pembangunan;
- b. penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Kalender Perencanaan dan Penganggaran;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, pelatihan serta Bimtek;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data dan informasi sebagai pendukung dokumen perencanaan; dan
- e. mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari tahap Musrenbang Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta Nasional.

Berikut disajikan data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok.

Tabel 2.25
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Solok 2010-2015

No	Jenis	Jumlah Dokumen					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perda RPJPD 2006-2025	-	-	-	-	-	-
2	Perda RPJMD 2010-2015	1	-	-	-	1	-
3	Perda Bangunan Gedung	-	-	1	1	-	-
4	RKPD	1	1	1	1	1	1
5	Perbup KSCT	-	1	-	-	-	-
6	KUA-PPAS APBD dan KUA-PPAS Perubahan APBD	2	2	2	2	2	2
7	Kab. Solok Dalam Angka, PDRB	2	2	2	2	2	2
10	Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1	1	-	1	-	-



11	Peta Daerah Tertinggal dan Rekomendasi Penanganan 24 Nagari Tertinggal Kabupaten Solok	-	-	1	1	-	-
12	Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Solok	-	-	-	-	1	1

Sumber : Bappeda Kab. Solok

2.3.3.3 Bidang Urusan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri

Kinerja urusan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari perkembangan indikator pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP tersebut merupakan agenda rutin yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok mulai dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Pada Tahun 2015, kegiatan pembinaan tersebut mengalami penurunan karena hanya dilakukan 5 kali dari 6 (enam) kali pembinaan pada Tahun 2014. Begitu juga halnya dengan kegiatan pembinaan politik daerah juga terus dilakukan mulai dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dimana pada Tahun 2015 telah dilaksanakan 3 kali dari 5 kali pada Tahun 2015. Selanjutnya perkembangan urusan ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah LSM menjadi 26, jumlah Ormas menjadi 52, jumlah OKP menjadi 14 pada Tahun 2015.

Selanjutnya dalam rangka mendukung gerakan anti narkoba maka pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi anti narkoba bagi pelajar di sekolah dimana setiap tahunnya sebanyak 300 pelajar serta melaksanakan jambore BNK dengan jumlah peserta sebanyak 3.178 orang pada Tahun 2015.

Kemudian dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat, sejak Tahun 2013 telah dilakukan upaya untuk menyelesaikan konflik antar nagari dan antar kelompok masyarakat oleh Kominda. Pada Tahun 2015 jumlah potensi konflik antar nagari yang telah difasilitasi oleh Kominda meningkat menjadi 8 kasus dari 5 kasus pada Tahun 2014 sedangkan jumlah potensi konflik antar kelompok masyarakat yang telah difasilitasi oleh Kominda masih 1 kasus.



2.3.3.4 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Salah satu indikator untuk menilai kinerja bidang urusan ini adalah Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk. Rasio ini menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah. Perkembangan rasio ini dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami fluktuatif dan pada Tahun 2015 rasionya naik menjadi sebesar 2,80.

Disamping Satuan Polisi Pamong Praja, petugas perlindungan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio Linmas menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang kondusif, demokratis dan interaktif. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Rasio Linmas di Kabupaten Solok perkembangan rasio Linmas dari Tahun 2011-2015 terus mengalami penurunan sehingga pada Tahun 2015 rasio ini menjadi sebesar 48,45, angka ini mengalami penurunan dari Tahun 2014 yang mencapai angka 53,80. Penurunan ini disebabkan dengan adanya penambahan jumlah penduduk, sedangkan jumlah Linmas terus mengalami penurunan dimana pada Tahun 2015 menjadi sebanyak 1.762 orang dari 2.300 orang pada Tahun 2013.

Selain aparaturnya yang mewujudkan keamanan dan ketertiban, dukungan sarana dan prasarana juga akan mempengaruhi kondisi keamanan suatu lingkungan salah satunya adalah Pos Siskamling. Rasio Pos Siskamling per jumlah nagari dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 4,28 pada Tahun 2014 menjadi 4,00 pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jumlah pos siskamling yang ada di nagari mengalami penurunan dimana pada Tahun 2015 menjadi 296 unit dari 317 unit pada Tahun 2014. Salah satu tugas dan fungsi Satpol PP adalah penegakan Peraturan Daerah, indikator ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 yaitu 58 jumlah penyelesaian penegakan Perda dari 77 kasus pada Tahun 2014.



Indikator lain untuk menilai kinerja bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah cakupan pelayanan bencana kebakaran. Indikator ini sedikit menunjukkan kenaikan dimana pada Tahun 2015 menjadi sebesar 0,001100%. Hal ini disebabkan karena tidak bertambahnya jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Solok.

Kemudian pada sisi pelayanan administrasi pemerintahan juga telah ditingkatkan salah satunya dengan menyediakan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah sejak Tahun 2011 sehingga penyelesaian izin lokasi setiap tahunnya tercapai 100 %.

2.3.4 Kearsipan

Kinerja bidang Urusan Layanan Kearsipan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tahun 2011 sampai Tahun 2014 kinerja pengelolaan kearsipan mengalami kenaikan dengan capaian pada Tahun 2014 sebesar 22,22 %. Pada Tahun 2015 angka ini menurun karena jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 6 SKPD pada Tahun 2014 hanya tinggal 4 SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku pada Tahun 2015. Aparatur yang telah dilatih tentang pengelolaan kearsipan sampai Tahun 2015 telah mencapai 550 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Urusan Kearsipan
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah SKPD Pengelola Arsip Secara Baku (%)	-	-	3,70	11,11	22,22	14,81
2	Jumlah Pengelola Kearsipan Yang Dilatih (orang)	100	100	150	100	100	100

Sumber : Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan

2.3.5 Perpustakaan

Kinerja bidang Urusan Layanan Perpustakaan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tersedianya perpustakaan yang



representatif akan meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, hal ini tentunya akan mempercepat pembangunan sumber daya manusia. Kondisi perpustakaan di Kabupaten Solok dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 2.27
Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perpustakaan yang dibina (Pos)	31	32	42	42	54	45
2	Jumlah pengunjung perpustakaan (%)	8	7,64	6,80	7,35	10,40	11,64
3	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Eks)	4.821	4.841	5.897	7.278	7.279	7.092
4	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	10.110	10.710	12.050	16.728	17.154	20.325

Sumber : Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan

Untuk meningkatkan kualitas pustaka di Kabupaten Solok maka telah dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap pustaka tersebut. Sampai Tahun 2015 jumlah perpustakaan yang telah dibina adalah sebanyak 73 pustaka. Dari 73 pustaka yang dibina tersebut 45 merupakan pustaka nagari. Kinerja urusan perpustakaan juga dapat dilihat dari kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan yaitu 7,64% pada Tahun 2011 menjadi 11,64% pada Tahun 2015.

Jika dilihat dari jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, pada Tahun 2015 jumlah koleksi buku di perpustakaan mengalami penurunan dibanding dengan jumlah koleksi buku pada Tahun 2014. Penurunan ini disebabkan karena beberapa judul buku yang telah dipinjam oleh pengunjung tidak dikembalikan sebagaimana mestinya. Untuk itu, di masa mendatang perlu diupayakan penambahan koleksi buku perpustakaan baik dalam judul maupun jumlahnya serta peningkatan pengawasan terhadap distribusi buku.



2.3.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok dari Tahun 2010 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indek Pembangunan Gender	90,15	90,73	91,17	93,44	95,45	96,13*
2	Keterwakilan Perempuan di Parlemen (%)	5,71	5,71	5,71	5,71	8,57	8,57
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	61,71	62,54	63,21	56,37	56,99	*57,61
4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	90,37	92,44	95,27	94,42	94,51	*94,60
5	Rasio KDRT	0,0071	0,0061	0,0161	0,0098	0,0048	0,01212
6	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	1,34	1,23	1,24	1,20	1,19	*1,18
7	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100 % dari 5 Kasus	100 % dari 5 Kasus	100 % dari 13 Kasus	100 % dari 8 Kasus	100 % Dari 4 Kasus	100 % Dari 10 Kasus

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Solok
BPS Kab. Solok

* Angka Sementara, diolah.

Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan perkembangan IPG Kabupaten Solok 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat bahwa IPG Kabupaten Solok mengalami kenaikan meskipun peningkatannya tidak terlalu besar. Selanjutnya keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari indikator Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.



Perkembangan indikator ini dari Tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuatif. Namun jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 maka capaian Tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan yaitu hanya sebesar 0,09 %. Sedangkan keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kenaikan sehingga menjadi sebesar 8,57% pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Jika disandingkan perkembangan angka IPM Kabupaten Solok dengan angka IPG Kabupaten Solok maka dapat dilihat bahwa kenaikan angka IPG sejalan dengan kenaikan angka IPM.

Kemudian pada aspek perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat dari indikator jumlah tenaga kerja dibawah umur, Rasio KDRT dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang terkait dengan kesehatan dan hak asasi manusia sehingga dengan kondisi tersebut maka pemerintah pusat, propinsi dan daerah terus berupaya dan berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Salah satu upaya adalah dengan dibentuknya Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, melakukan penyuluhan. Disamping itu pemerintah juga terus melakukan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan secara tuntas dari kasus yang terjadi. Pada Tahun 2015 jumlah kasus yang terjadi mengalami kenaikan yaitu dari 4 kasus pada Tahun 2014 menjadi 10 pada Tahun 2015 dan telah difasilitasi penyelesaiannya oleh pemerintah daerah secara tuntas. Kenaikan ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah agar angka ini terus mengalami kenaikan.

2.3.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) sangat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional karena melalui program KB pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindari sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehidupan menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel berikut:

--	--

Tabel 2.29
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

NO	URAIAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,68	1,19	0,67	0,93	0,76	0,72
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	348.566	352.705	355.077	358.383	361.095	363.684

Sumber : BPS Kab. solok

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 berfluktuatif. Namun jika kita lihat dari capaian Tahun 2013 sampai Tahun 2015 maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan. Penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan keberhasilan program KB di Kabupaten Solok. Hal ini juga ditunjukkan oleh indikator kinerja layanan urusan wajib Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten Solok dari Tahun 2010 sampai Tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.30 berikut:

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Urusan Keluarga Berencana
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	URUSAN / INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	1,76	1,67	1,66	1,62	1,57	1,55
2	Total Fertility Rate	3,00	3,00	2,94	2,87	2,81	2,74
3	Rasio Akseptor KB	0,11	0,12	0,11	0,12	0,10	0,09
4	Jumlah Akseptor KB Baru	7.193	7.215	6.803	7.788	6.468	5.744
5	Jumlah Peserta KB Aktif	43.436	44.052	45.291	44.343	44.988	44.460
6	Jumlah Pasangan Usia Subur	59.777	60.330	61.000	62.558	62.159	63.063
7	MKJP (%)	33,93	33,93	34,66	36,96	35,10	33,84
8	Partisipasi KB Pria	1,19	1,19	1,41	1,38	1,27	1,06

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok

Keberhasilan program KB tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan indikator rata-rata jumlah anak per keluarga yang masih di bawah 2 yaitu 1,55 pada Tahun 2015 dan Total Fertility Rate (TFR) yang mencapai 2,74.



2.3.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka mensukseskan Program Nasional Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, pada Tahun 2012 Kabupaten Solok telah melakukan penerapan e-KTP serta penerbitan NIK. Dari pelaksanaan program ini, maka pada Tahun 2015 dapat diketahui bahwa 71,06% penduduk Kabupaten Solok telah memiliki KTP dengan Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk sebesar 0,71. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibanding dengan capaian pada Tahun 2014. Begitu juga dengan indikator rasio pasangan berakte nikah dimana pada Tahun 2015 angka ini mengalami sedikit kenaikan namun masih jauh dari kondisi ideal, untuk itu ke depan perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Selanjutnya rasio bayi berakte kelahiran selama 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami fluktuasi dan angka ini mengalami penurunan pada Tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2013 namun mengalami kenaikan pada Tahun 2015. Sebaliknya Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk pada Tahun 2015 adalah sebesar 30,94%, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Wajib Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

NO	URUSAN/ INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	0,25	0,29	0,85	0,66	0,67	0,71
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,53	1	0,53	0,54	0,42	0,44
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,17	0,19	0,36	0,4	0,46	0,24
4	Kepemilikan KTP (%)	22,65	28,51	85,14	66,04	67,25	71,06
5	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	17,01	17,06	16,41	17,90	27,38	30,94
6	Kepemilikan KK	99.717	100.384	110.391	109.923	77.637	79.816

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok



2.3.9. Bidang Urusan Sosial

Kinerja layanan urusan wajib Bidang Sosial di Kabupaten Solok Tahun 2010 sampai Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Urusan Sosial
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4 Panti Asuhan					
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial / penanganan PMKS (%)	48,64	24,98	94,76	11,11	11,11	80,82
3	Jumlah PMKS	14.809	14.854	7.755	12.125	12.125	12.013

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Solok

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kinerja urusan sosial yang ditunjukkan oleh indikator Penanganan PMKS mengalami kenaikan menjadi 80,82 % pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya perhatian pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sehingga dari 12.125 PMKS telah dibantu sebanyak 12.013 PMKS.

2.3.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Solok melakukan beberapa kegiatan yang tujuannya untuk memberdayakan Lembaga Keuangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan tersebut diantaranya memberikan pelatihan dan pembinaan manajemen usaha terhadap UMKM serta memfasilitasi UMKM dengan pengusaha serta BUMN. Hal ini berdampak kepada semakin banyaknya jumlah UKM Non BPR atau LKM UKM di Kabupaten Solok dimana pada Tahun 2015 adalah sebanyak 12.786, jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan Tahun 2011 yang hanya 4.400. Sementara jumlah BPR atau LKM di Kabupaten Solok masih tetap yaitu sebanyak



11 Unit. Disisi lain jumlah persentase koperasi yang aktif di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mengalami kenaikan dari 45,33% pada Tahun 2014 menjadi 45,71% pada Tahun 2015.

Tabel 2.33
Perkembangan Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	4.000	4.000	4.338	4.400	12.686	12.786
2	Jumlah BPR/LKM	11	11	11	11	11	11
3	Jumlah Tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	103	118	176	151	170	73
4	Persentase Koperasi Aktif	58,04	57,34	43,36	45,27	45,33	47,71

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM, KP3M

2.3.11. Penanaman Modal

Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Solok berbagai usaha dilakukan untuk menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Solok. Dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014, jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) yang menanamkan modal di Kabupaten Solok terus meningkat namun angka ini pada Tahun 2015 menurun dan hanya 5 investor dengan jumlah investasi yang juga menurun menjadi sebesar Rp.262.323.000.000,-. Dengan masuknya investor ke Kabupaten Solok maka semakin membuka kesempatan kerja sehingga rasio daya serap tenaga kerja pada Tahun 2015 menjadi sebesar 14,60 % dengan jumlah tenaga kerja yang terserap adalah 73 orang. Untuk menggaet investor yang menanamkan modal di Kabupaten Solok didukung oleh kemudahan dalam proses perizinan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari. Dari kemudahan yang diberikan tersebut maka jumlah SIUP, TDP dan HO yang dikeluarkan pada Tahun 2015 mencapai 1.262 buah. Untuk lebih jelasnya perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah investor berskala nasional	8	9	11	11	16	5
2	Jumlah SIUP, HO TDP yang dikeluarkan	406	406	505	476	562	1262

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM, KP3M

2.3.12. Pertanian

Pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama Kabupaten Solok yang dapat menggerakkan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran pertanian dalam perekonomian daerah tergambar dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 5 Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2011-2015, kontribusi Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sehingga pada Tahun 2015 mencapai angka 39,48%, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.35
Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45,01	41,95	40,70	39,8	*39,14	**38,64

Sumber: BPS Kabupaten Solok

***Angka sementara**

****Angka sangat sementara**

Sub lapangan usaha peternakan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu 47,02% dari seluruh nilai tambah pertanian kemudian diikuti oleh sub lapangan usaha tanaman pangan yaitu sebesar 32,49% dan sub lapangan usaha tanaman hortikultura tahunan yaitu sebesar 25,02%.

Jika dilihat peranan sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB kategori pertanian, kehutanan dan perikanan maka sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memberikan kontribusi yang sangat



besar setiap tahunnya sehingga pada Tahun 2015 adalah sebesar 97,18%.

Indikator lain untuk melihat kinerja penyelenggaraan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut :

Tabel 2.36
Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan di Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	5,74	5,83	5,7393	5,7359	5,7485	5,55
2	Persentase kelompok tani yang mendapat bantuan	52,54	55,27	57,67	75,38	75,56	82,99
3	Luas Penangkaran Padi Sawah (Ha)	110	110	302	182	109	187
4	Luas cakupan lahan pengairan melalui pengembangan jaringan irigasi (Ha)	670	690	670	1200	1300	9984
5	Luas cakupan areal yang berpengairan embung/parit (Ha)	76	195	75	90	45	862
6	Panjang jalan usaha tani (Km)	-	4	-	13	7	23,98
7	Luas Penambahan Lahan Pertanian Organik (Ha)	20	22	70	-	170	75
8	Penggunaan bibit unggul hortikultura (Ha)	2.525	2.626	2.727	2.316	2.356	2.793

Sumber :Dinas Pertanian Kabupaten Solok

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa aspek di antaranya pengalihan penggunaan lahan sawah. Pada sisi lain kinerja pertanian dapat dilihat dari semakin baiknya capaian beberapa indikator seperti kelompok tani yang mendapat bantuan menjadi 82,99%, luas penangkaran padi sawah menjadi sebesar 187 Ha, luas cakupan lahan pengairan melalui pengembangan jaringan irigasi menjadi 9.984 Ha, Luas cakupan areal yang berpengairan embung/parit menjadi 862 Ha, Panjang jalan usaha



tani yang mencapai 23,98 Km dan Penggunaan bibit unggul hortikultura yang mencapai 2.793 Ha. Peningkatan capaian tersebut salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan dukungan dana yang bersumber dari DAK.

Selanjutnya di sub bidang Pertanian yaitu peternakan, kontribusinya terhadap PDRB kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian mengalami fluktuasi, namun capaian pada Tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan di banding capaian Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Bidang Peternakan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%)	4,61	4,83	4,91	5,00	4,80	*4,86
2	Jumlah populasi ternak :						
	a. Sapi (ekor)	30.930	32.419	35.113	36.219	37.025	38.268
	b. Kambing/domba (ekor)	16.118	16.564	18.071	18.943	19.364	19.608
	c. Unggas (ekor)	452.281	445.452	533.612	716.905	830.757	3.326.846
3	Pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak (dosis)	6.913	6.833	6.151	7.336	9.423	10.855
4	Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan	-	-	13	3	108	115
5	Jumlah pasar khusus yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	1	1	1	1	2	1

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok

***Angka Sementara**

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa kinerja urusan peternakan menunjukkan hasil yang bagus, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah populasi ternak selama 5 Tahun terakhir. Peningkatan jumlah populasi ternak ini didukung oleh peningkatan pembinaan terhadap kelompok tani dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.



2.3.13. Kehutanan

Sub sektor yang kehutanan dan penebangan kayu kontribusinya terus turun sehingga pada Tahun 2015 hanya sebesar 0,86%. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kehutanan dan penebangan kayu	0,97	0,95	0,93	0,91	0,91	*0,86

Sumber: BPS Kabupaten Solok

Berikutnya pada urusan kehutanan, perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Sektor Kehutanan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	9,9	11,52	9,63	11,63	6,03	1,89
2	Kerusakan kawasan hutan (%)	12,98	12,98	13,98	11,44	6,1	6,1

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok

Berdasarkan data pada Tabel 2.38 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor kehutanan selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan salah satunya disebabkan karena turunnya angka rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

2.3.14. Kelautan dan Perikanan

Penyumbang PDRB selanjutnya diikuti oleh kontribusi sub sektor perikanan dengan angka 1,96% pada Tahun 2015.

Pada bidang kelautan dan perikanan khususnya perikanan air tawar juga menunjukkan kinerja yang semakin meningkat yaitu dengan produksi perikanan mencapai 3.406,2 Ton pada Tahun 2015. Angka ini jauh mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan produksi pada Tahun 2011 yang berjumlah 1.519,03 Ton. Meningkatnya produksi perikanan ini tentunya merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Solok diantaranya adalah



Rehabilitasi atau Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan seperti BBI, pengadaan jaring langli dan keramba serta pengadaan induk ikan dan benih ikan serta pakan ikan baik melalui sumber dana APBD Kabupaten Solok maupun dari dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk lebih jelasnya kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2010 sampai 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan (ton)	967,52	1519,03	1.951,96	2.474,2	3.238,92	3.406,2
2	Konsumsi ikan (kg/cap/th)	20	22,41	25,5	29,19	30,11	31,2
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	16	22,09	20,93	55,56	54,69	44
4	Cakupan bina perikanan :						
	- Pembudidayaan (orang)	4.701	4.701	4.769	3.382	3.745	3.382
	- Nelayan (orang)	1.425	1.595	1.395	1.190	1.370	4.321
	- pengolah dan pemasaran ikan (orang)	5	12	155	155	160	189
5	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	154,32	241,8	305,6	362,2	393,82	406,70

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok

2.3.15. Pariwisata

Pada urusan kepariwisataan, kinerja pembangunan pariwisata Kabupaten Solok dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Sektor Pariwisata
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kunjungan Wisata Mancanegara (org)	233	233	315	588	508	752
2	Kunjungan Wisata Nusantara (org)	233.749	453.380	467.196	436.876	440.066	364.374



3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,68	*0,67
4	Jenis Objek Wisata:						
	Alam	70	70	70	70	70	70
	Budaya	30	30	30	30	30	30
	Sejarah	23	24	24	23	23	23

Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok

***Angka Sementara**

Sektor pariwisata di Kabupaten Solok mengalami perkembangan yang sangat lambat bahkan mengalami penurunan pada Tahun 2015, hal ini ditandai dengan perkembangan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Solok yang tidak mengalami perubahan sampai Tahun 2013 dan justru turun pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Walaupun perkembangan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara meningkat namun tidak memberikan dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok hal ini disebabkan karena wisatawan yang datang hanya sekedar berkunjung dan tidak menginap. Lambatnya perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Solok tentunya tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana di sektor pariwisata seperti restoran, hotel, penginapan yang masih sangat sedikit. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk memajukan sektor pariwisata dengan merubah paradigma pengembangan pariwisata yang selama ini mengandalkan keindahan sumber daya alam dengan menggali potensi wisata lain seperti budaya dan sejarah yang berdaya jual dan berdaya saing tinggi. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan seperti pembenahan sarana dan prasarana objek wisata di Kawasan Singkarak dan Danau Kembar, pembenahan objek wisata budaya dan sejarah, promosi melalui berbagai even nasional dan internasional seperti pameran dan Tour De Singkarak.

2.3.16. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada urusan energi dan sumber daya mineral, kinerja pembangunannya selama periode Tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	32,01	32,80	31,93	32,03	32,03	32,03
2	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB (%)	3,8	5,46	5,53	5,68	*5,9	**5,97
3	Jumlah potensi lokasi panas bumi	-	-	-	1	3	2
4	Jumlah PLTMH	16	16	18	20	21	21
5	Jumlah PLTS	1.017	1.094	1.236	1.261	1.293	1.293
6	Jumlah <i>Phycohydro</i>	4	4	4	4	4	4
7	Jumlah <i>Minihydro</i>	47	47	51	55	57	57
8	Jumlah rumah yang dialiri PLTS	132	132	132	222	302	302
9	Jumlah rumah yang dialiri PLTMH	1.661	1.788	1.856	1.931	2.021	2.087
10	Jumlah rumah yang dialiri <i>Phycohydro</i>	145	145	145	145	145	145

Sumber :Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok

***Angka Sementara**

Kinerja sektor energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB yang menurun yaitu 6,336 % pada Tahun 2014 menjadi 5,23 % pada Tahun 2015. Selain itu kinerja energi dan sumber daya mineral dapat dilihat dari perkembangan PLTMH, PLTS, *Phycohydro* dan *minihydro* yang berdampak terhadap rumah tangga yang dialiri listrik melalui PLTMH, PLTS, *Phycohydro* dan *minihydro*.

2.3.17. Perdagangan

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Kinerja Sektor Perdagangan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	9,71	9,74	9,87	9,78	*9,63	**10,02
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	25,59	23,56	23,52	25,59	26,32	27,56

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Solok

***Angka Sementara**

****Angka sangat sementara**



Berdasarkan data sebagaimana tertuang Tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja sektor perdagangan mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Solok pada Tahun 2011 sebesar 9,74% menjadi 9,87% pada Tahun 2015. Disisi lain kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari meningkatnya cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal yang mendapat binaan dari Pemerintah Kabupaten Solok dari 23,56% pada Tahun 2011, menjadi 27,56% pada Tahun 2015. Kondisi ini akan terus ditingkatkan untuk tahun berikutnya melalui pelatihan, memfasilitasi dengan BUMN dan sebagainya.

2.3.18. Perindustrian

Selama periode 2010 sampai 2015 kinerja urusan perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Kinerja Sektor Perindustrian
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	5,55	5,67	5,67	5,52	*5,43	**5,52
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Pertumbuhan industri (%)	14,22	18,94	5,08	3,79	5,03	5,76
4	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	11,68	2,22	3,01	12,84	6,67	7,06

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Solok

*Angka sementara

*Angka sangat sementara

kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Solok terus mengalami penurunan yaitu 5,67% pada Tahun 2011 menjadi 4,99% pada Tahun 2015. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka kinerja sektor industri dan perdagangan ini masih perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Solok di tahun mendatang.



2.3.19. Bidang Urusan Pangan

Pada Tahun 2011 Kabupaten Solok telah menetapkan regulasi tentang Kebijakan Ketahanan Pangan sehingga mendorong terwujudnya ketersediaan pangan utama yaitu beras. Sampai Tahun 2015 ketersediaan pangan utama yaitu beras mencapai angka 529,78 kg/ka/th dengan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun sebesar 192.680.910 Kg serta dengan perkembangan harga beras yang telah mencapai Rp. 11.100,-/Kg. Dengan perkembangan harga yang cukup baik ini mendorong petani atau masyarakat untuk meningkatkan produksi padinya. Disamping itu pada Tahun 2015 ini cadangan pangan pemerintah baru mencapai angka 10 ton. Peningkatan ketersediaan pangan utama per tahun tersebut didukung dengan jumlah lumbung pangan yang telah dibangun yaitu sebanyak 19 unit.

Dari sisi konsumsi, rasio penduduk yang telah menerapkan Pola Pangan Harapan juga terus meningkat dimana pada Tahun 2015 adalah sebesar 80,1 %. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)	531,18	562,45	565,21	577,49	566,74	536,37
2	Jumlah Lumbung Pangan	2	4	2	8	3	2
3	Rasio penduduk yang telah menerapkan Pola Pangan Harapan	70,02	70,5	72,3	74,8	79,8	80,1
4	Kawasan rumah pangan lestari (Kelompok)	5	5	5	22	32	37

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan



2.3.20. Bidang Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

2.3.20.1. Pekerjaan Umum

a. Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Transportasi di Kabupaten Solok sangat sibuk karena Kabupaten Solok dilalui oleh jalur lintas Sumatera baik menuju ke Padang maupun ke Bukittinggi. Disamping itu Kabupaten Solok memiliki perbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status dan kelas. Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Solok terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten serta Jalan lingkungan.

Tabel 2.46
Perkembangan Proporsi Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	0,42	0,42	0,46	0,58	0,59	0,59
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	112,58	112,58	112,58	131,00	149,32	149,32

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sampai Tahun 2015 indikator proporsi jalan baik di Kabupaten Solok menunjukkan peningkatan sehingga menjadi 0,59 % atau 694,27 km panjang jalan dalam kondisi baik dari panjang jalan seluruhnya yaitu 1.174,01 km. Sejalan dengan itu indikator panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase juga mengalami kenaikan sehingga menjadi 149,32 Km pada Tahun 2015.

Sedangkan untuk indikator panjang jembatan dan jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Solok mengalami beberapa penurunan, hal ini disebabkan karena ada beberapa jembatan



yang ada di Kabupaten Solok sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dari 222 buah jembatan dengan panjang 2.238 meter pada tahun 2012 hanya tinggal sebanyak 199 buah dengan panjang jembatan 1.870,10 meter pada akhir 2015. Nama-nama ruas jalan yang dialihkan dari kewenangan kabupaten ke propinsi adalah Ruas Jalan Solok-Alahan Panjang (47,80 Km), Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang (49,40 Km), Ruas Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (72,90 Km), Ruas Jalan Sp.Ganting Payo-Batas Tanah Datar-Sumani (28,40 km), Ruas Jalan Singkarak-Aripan-Tj.Balit-Padang Ganting (30 km), Ruas Jalan Pintu Angin-Labuah Saiyo (5,50 km), dan Ruas Jalan Rawang-Talawi (6 km).

b. Irigasi

Infrastruktur irigasi memegang peranan penting bagi pembangunan di sektor pertanian. Infrastruktur irigasi berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan sehingga dapat mencapai hasil pertanian yang optimal.

Tabel 2.47
Perkembangan Fasilitas Irigasi di Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)	19.138	21.658,8	23.682,15	24.044,25	25.832,10	22.495,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2015 jumlah daerah irigasi di Kabupaten Solok adalah 499 buah yang tersebar di 14 Kecamatan dengan luas areal yang dialiri 37.342,80 Ha. Dari jumlah daerah irigasi sebanyak 499 buah tersebut 230 buah daerah irigasi merupakan kewenangan Kabupaten Solok, 261 daerah irigasi kewenangan Pemerintah Nagari, 7 daerah irigasi kewenangan Provinsi dan 1 daerah irigasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 230 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok mengaliri 23.428 Ha areal.

Jika dilihat dari jenis irigasi maka tampak bahwa pada Tahun 2015 luas areal yang dialiri irigasi teknis adalah sebanyak 5.050 Ha, 12.608,55 Ha dialiri irigasi semi teknis dan 19.684,25 Ha dialiri oleh



irigasi sederhana. Adapun jenis irigasi di Kabupaten Solok adalah 6 irigasi teknis, 53 irigasi semi teknis dan 440 irigasi sederhana.

2.3.20.2. Penataan Ruang

Salah satu indikator kinerja bidang Urusan Penataan Ruang adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur/mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Solok meliputi daerah sekitar sungai, lapangan olah raga, makam, pekarangan rumah penduduk, pekarangan perkantoran dan tempat pariwisata. Berbagai program telah dilakukan untuk penataan ruang terbuka hijau diantaranya adalah program Pembuatan Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) seluas 17 Ha di daerah kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok bertujuan untuk menambah luasan ruang terbuka hijau, pencegahan banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktifitas masyarakat dan meningkatkan keindahan lingkungan.

Pada Tahun 2015 Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan luas wilayah per HPL/HGB di Kabupaten Solok baru mencapai 1,40% atau baru seluas 645,65 Ha.

Indikator lain yang menunjukkan perkembangan fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah indikator di bidang Penataan Ruangan yaitu ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir dan kekeringan. Luas wilayah produktif di Kabupaten Solok adalah sebesar 84,64% atau 285.782 Ha. Luas wilayah yang mengalami banjir adalah sebesar 0,09%, angka ini mengalami penurunan dibanding Tahun 2013 yaitu sebesar 1,34% dan luas wilayah kekeringan telah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadi 1.425 Ha. Sedangkan ketaatan terhadap RT/RW adalah sebesar 98%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

--	--

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Urusan Penataan Ruang
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB	0,022	1,48	1,46	1,43	1,40	1,40
2	Rasio Lahan Produktif	84,64	84,64	84,64	84,64	84,64	84,64
3	Luas lahan produktif	285.782	285.782	285.782	285.782	285.782	285.782
4	Rasio wilayah kebanjiran	1,34	1,34	1,34	1,34	0,09	0,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

2.3.21. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pelayanan urusan wajib Bidang Perumahan di Kabupaten Solok antara lain diukur dengan indikator rumah layak huni. Pada Tahun 2015 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Solok adalah 68,67% dari total rumah yang ada di Kabupaten Solok, berarti 31,33 % rumah tidak layak huni. Rumah layak huni ini jika dibandingkan dengan Tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 9,28%. Dengan menurunnya rumah layak huni pada Tahun 2015 berarti rumah tidak layak huni mengalami peningkatan.

Sedangkan berdasarkan indikator Rasio Rumah Layak Huni dimana jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah penduduk, maka pada Tahun 2015 adalah sebesar 0,20, angka ini mengalami kenaikan dibanding capaian Tahun 2013 yang hanya sebesar 0,17. Kemudian jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 adalah 67,40%, sisanya yaitu 32,6% tidak mempunyai fasilitas sanitasi. Angka ini jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 menunjukkan kenaikan dimana pada Tahun 2014 hanya sebesar 46,07. Selanjutnya adalah indikator tentang tingkat pelayanan air bersih dimana pada Tahun 2015 jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih meningkat menjadi sebesar 66,10. Kenaikan persentase rumah tangga pengguna air bersih dan bersanitasi disebabkan karena setiap tahunnya telah dibangun sarana penyediaan air bersih dan sanitasi yang bersumber dari DAK, PAMSIMAS dan



sumber dana lainnya. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan
di Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,19	0,19	0,19	0,17	0,20	0,20
2	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	34,70	34,86	35,02	35,02	46,07	67,40
3	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	46,79	46,95	47,11	47,29	59,41	66,10

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok

2.3.22. Bidang Urusan Perhubungan

Analisis Kinerja atas layanan urusan wajib pada bidang Urusan Perhubungan di Kabupaten Solok dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Wajib Bidang
Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Urusan / Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Arus Penumpang	91.694	82.500	80.372	83.069	84.596	86.112
2	Rasio Izin Trayek	0,0008	0,00156	0,00104	0,00116	0,00106	0,00095
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	6.209	6.633	7.075	7.114	7.075	7.190
4	Jumlah Terminal Bus	3	3	3	3	3	3
5	Jumlah Dermaga	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	671.582	682.843	691.751	743.400	766.100	861.120
7	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	658	637	640	641	641	641
8	Pemasangan Rambu-Rambu	-	211	325	463	180	113

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kinerja perhubungan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator yang mengalami kenaikan walaupun beberapa indikator masih ada yang tetap. Indikator yang menunjukkan kenaikan seperti jumlah arus penumpang, rasio izin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum dan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum.

Kenaikan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan bahwa angkutan umum masih sangat dibutuhkan di Kabupaten Solok.

2.3.23. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penanganan sampah	14,63	10,18	12,55	17,98	20,95	*23,11
2	Persentase Pencemaran status mutu air:						
	• Jumlah sungai yang terpantau	15,70	15,71	21,43	18,57	18,57	*18,57
	• Jumlah danau yang terpantau	50	50	75	50	75	*75
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	43	54	63	65	68	*69
4	Persentase kasus Lingkungan yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100
5	Persentase TPS per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02	0,03

Sumber : Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja bidang urusan Lingkungan Hidup adalah Persentase Penanganan Sampah. Mulai Tahun 2010 penanganan persampahan dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup yang sebelumnya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok. Sejak Tahun 2011 persentase penanganan persampahan semakin meningkat yaitu 10,18 % pada Tahun 2011



menjadi 20,95% Tahun 2014 dan diperkirakan meningkat menjadi 23,11% pada Tahun 2015. Kenaikan persentase penganan sampah ini didukung oleh meningkatnya sarana prasarana persampahan yang didanai oleh dana DAK.

Indikator lain adalah pencemaran status mutu air. Perkembangan indikator pencemaran status mutu air Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 mengalami fluktuasi. Namun jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 maka persentase jumlah sungai yang terpantau pada Tahun 2015 mengalami penurunan. Selanjutnya Terhadap indikator Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk terjadi penurunan dari 0,04% pada Tahun 2013 menjadi 0,02% pada Tahun 2014. dan pada Tahun 2015 mencapai 0,03%

Dari segi cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL, pada Tahun 2014 jumlah usaha yang telah memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL adalah 75, angka ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2014 yaitu sebanyak 73 buah. Jika dilihat dari jumlah usaha yang aktif maka pada Tahun 2015 sebanyak 20 buah. Dari 20 buah usaha tersebut semuanya sedang diawasi Amdal atau UKL-UPL.

Selanjutnya pada sisi penegakan hukum lingkungan, dari Tahun 2010 sampai 2015 persentase kasus lingkungan hidup yang terselesaikan adalah 100 %, artinya setiap kasus dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya peraturan di bidang lingkungan hidup yang telah diterbitkan yaitu 2 (dua) Peraturan Bupati Solok dan 7 (tujuh) Surat Keputusan Bupati Solok.

2.3.24. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Wilayah Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti letusan gunung api, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena kedudukan Kabupaten Solok secara tektonik yang termasuk dalam lempeng benua Asia yang ditunjam lempeng Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera. Penunjaman kedua



lempeng tersebut menghasilkan beberapa patahan aktif didaratkan Sumatera berupa Patahan Besar Sumatera (Patahan Semangko).

Patahan aktif Semangko tersebut memanjang pada ruas Kecamatan Pantai Cermin, Danau Diatas, Danau Dibawah ke utara sampai Danau Singkarak dan membentuk graben Kota Solok yang merupakan bagian dari patahan aktif sepanjang Sumatera. Jalur patahan – patahan aktif di Kabupaten Solok melintasi mulai dari Kecamatan Pantai Cermin terus ke Utara melewati Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Diatas – Danau Dibawah Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan X Koto Singkarak terus ke Danau Singkarak. Akibat pergerakan patahan aktif utama timbul patahan aktif ikutan lain yang berdimensi lebih kecil sejajar dengan jalur patahan utama (Sumatera) tersebar di Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung sedikit di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Payung Sekaki terus ke Utara.

Jalur gempa utama di Kabupaten Solok berada pada sepanjang jalur patahan Sumatera yang melintasi Kabupaten Solok. Bila terjadi pelepasan energi yang terjadi di Samudera Hindia dengan kekuatan > 7 SR, maka akan sangat berpotensi menghasilkan gempa sepanjang patahan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian serta observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kabupaten Solok terdiri dari :

- 1) Bencana Alam Gempa Bumi Patahan Aktif
- 2) Bencana Alam Gunung Api Talang
- 3) Gerakan Tanah
- 4) Bencana Alam Erosi
- 5) Angin puting beliung

Berikut disajikan data tentang bencana alam yang terjadi di Kabupaten Solok dari Tahun 2011 s/d 2015:

Tabel 2.52
Perkembangan Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

No	Jenis Bencana	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kebakaran rumah/lahan, dll (kali)	4	51	31	-	32	48
2	Angin Puting Beliung (kali)	1	4	1	16	3	2
3	Banjir dan tanah longsor (kali)	12	4	3	17	16	13



Sumber : BPBD Kab. Solok

Untuk penanganan bencana tersebut Kabupaten Solok didukung oleh sarana dan prasarana seperti pada Tabel berikut:

Tabel 2.53
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Solok Tahun 2015

No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Mobil Damkar dan peralatannya	4
2	Perahu Karet	4
3	Speed Boat	1
4	Mobil lapangan dapur umum	1
5	Genset	3
6	Tenda	21
7	Radio HT	18
8	Radio RIG, SSB dan HF/FM	3
9	Telepon Mobile	1
10	Matras	205
11	Peralatan Vertikal Rescue	1
12	Posko Damkar	4
13	Kendaraan trail	5
14	Repeater	1
15	Water Treatment	1
16	Pelampung	10

Sumber : BPBD Kab. Solok

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Untuk melihat kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Solok dilakukan salah satunya dengan menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dan produktifitas total daerah.

Secara umum meningkatnya proporsi pengeluaran konsumsi Non Pangan Perkapita telah memperlihatkan adanya pengurangan keadaan miskin di tengah penduduk. Menurut ukuran kemiskinan yang diyakini benar selama ini adalah bahwa rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang proporsi pendapatan digunakan untuk konsumsi pangan lebih besar.



Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Fokus Kemampuan Ekomomi Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	5.718.144	6.416.364	7.077.249	8.528.448	9.372.314	9.937.538
2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	1.995.632,26	2.460.033,96	3.032.483,86	3.213.492,00	3.460.612,00	3.681.616,00

Sumber : BPS Kab. Solok

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita masih mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi Non Pangan Perkapita. Perkembangan pengeluaran konsumsi Non Pangan Perkapita mengalami kenaikan dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 hal ini berarti menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan ekonomi daerah juga dapat dilihat dari indikator produktifitas total daerah. Produktifitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktifitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Produktifitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktifitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Perkembangan produktifitas total daerah ini dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2.55
Perkembangan Produktifitas Total Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2014-2015

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2014	*2015	2014	*2015	2014	*2015
		Nilai Tambah (Milyar)		Jumlah Angkatan Kerja (Orang)		Produktifitas Total Daerah (Rupiah)	
1	Pertanian	1.150,9	1210,00	64.388	56.662	17.874.448,65	21.354.699,80
2	Industri Pengolahan	197,17	206,5	4.527	4.768	43.554.230,17	43.314.105,93
3	Perdagangan, Hotel dan restoran	415,67	440,60	31.200	30.330	13.322.756,41	14.526.871,08



4	Jasa-jasa	371,94	389,35	35.192	35.084	10.568.879,29	11.097.651,35
5	Lain-lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, jasa bangunan dan jasa perusahaan)	630,63	668,70	19.664	23.225	32.070.280,72	28.792.249,73
Jumlah	Jumlah	2.766,31	2.915,15	154.971	150.068,5	17.850.501,06	19.425.462,37

Sumber : BPS Kab. Solok
Tahun 2015*) Data Proyeksi

2.4.2. Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

Pada sektor perbankan, Kabupaten Solok difasilitasi oleh 3 unit Bank Pemerintah dan 6 unit BPR. Disamping itu Kabupaten Solok memiliki fasilitas restoran dan penginapan dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.56
Perkembangan Restoran dan Hotel
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran :						
	Tipe A	1	1	1	1	1	1
	Tipe B	3	3	3	3	3	3
	Tipe C	46	46	47	47	82	83
2	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan /Hotel :						
	Penginapan Tipe Melati	5	5	5	5	5	3
	Hotel Tipe Melati	1	1	1	1	1	2

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok

Selanjutnya pada bidang informasi dan komunikasi, persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon sampai Tahun 2015 telah mencapai 79,42%.

Pada bidang keuangan, berikut disajikan data tentang pajak dan retribusi daerah dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015:



Tabel 2.57
Perkembangan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

NO	URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	a. Pajak Daerah							
	- Pajak hotel	OBJEK	5	5	3	3	3	2
	- Pajak restoran	OBJEK	86	86	81	81	91	101
	- Pajak hiburan	OBJEK	1	1	1	0	0	0
	- Pajak reklame	OBJEK	914	914	142	142	409	409
	- Pajak penerangan jalan	OBJEK	1	1	1	1	1	1
	- Pajak Air Tanah	OBJEK	0	0	0	0	1	1
	- Pajak pengembalian bahan galian Gol. C	OBJEK	6	6	6	6	11	1
	- Pajak Sarang Burung Walet	OBJEK	1	1	1	1	1	3
	- Pajak BPHTB	WP	42	42	31	72	189	474
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	WP	16999 0	16999 0	17030 8	17049 2	16855 5	17306 9
	b. Retribusi Daerah							
	- Retribusi jasa umum	JENIS	10	10	10	10	8	8
	- Retribusi jasa usaha	JENIS	8	8	8	8	8	8
	- Retribusi perizinan tertentu	JENIS	4	4	4	4	4	4
	c. Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan		3	3	3	4		
	- Bagian laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik daerah	LBG	1	1	1	3	3	3
2.	Jenis Kelas dan Jumlah Restoran							
	- Tipe A	Unit	1	1	1	1	1	1
	- Tipe B	Unit	3	3	3	3	3	3
	- Tipe C	Unit	46	46	47	47	82	83
3.	Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel							
	- Penginapan Tipe Melati	Unit	5	5	5	5	5	3
	- Hotel Tipe Melati	Unit	1	1	1	1	1	2

2.5. Capaian RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

2.5.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2011-2015

Untuk melihat ukuran keberhasilan dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2011-2015 digunakan indikator kinerja yang merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.



Berikut data capaian indikator makro Kabupaten Solok Tahun 2011-2015.

Tabel 2.58
Capaian Indikator Makro Kabupaten Solok
Tahun 2010-2015

NO	URAIAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	*2015
1	Indek Pembangunan Manusia (%)	70,93	71,73	72,15	72,46	73,31	73,89
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,12	5,02	6,16	5,63	*5,79	**5,43
3	PDRB Harga Berlaku (Rupiah)	6.173.855,4	6.861.853,3	7.639.253,20	8.500.426,4	*9.545.353,5	**10.125.791,3
4	PDRB Perkapita (jutaan Rupiah)	17,67	19,48	21,51	23,71	*26,02	**27,84
5	Angka rata-rata lama sekolah (th)	7,6	8,03	8,04	8,05	8,65	8,66
6	APK SD/MI/Paket A sederajat (%)	113,46	109,58	121,39	108,71	115,12	110,95
7	APK SMP/MTs/Paket B sederajat (%)	84,02	82,11	83,27	83,71	93,86	93,25
8	APK SMA sederajat (%)	50,88	56,11	54,96	56,83	55,27	59,16
9	Angka Harapan Hidup (Th)	66,6	66,95	67,26	67,33	70,02	*72,50
10	Tingkat Pengangguran (%)	3,04	5,99	4,76	5,72	3,55	*4,00
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,26	65,49	61,25	60,3	62,47	*62,75
11	Tingkat Kemiskinan (%)	11,75	11,19	10,03	10,26	9,42	9,04
12	Angka Melek Huruf (%)	97,19	97,21	97,24	97,4	97,5	99,87
13	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,68	1,19	0,67	0,93	0,76	*0,95

Tahun 2015) Data Proyeksi

***Angka sementara**

****Angka sangat sementara**

2.5.2 Kinerja Pembangunan Kabupaten Solok Per Agenda

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 telah disusun prioritas pembangunan yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan. Untuk melihat keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Solok per Agenda tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 2.59
Kinerja Pembangunan Kabupaten Solok Per Agenda

No	Uraian	Volume	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Agenda I							
1	Peningkatan Kinerja OPD	%	35,00	40,00	50,00	75,00	85,00	38,99
2	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indek	2,70	2,75	2,80	2,90	3,00	88,57
3	Pencapaian Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008 dalam Pemberian Pelayanan Publik	SKPD	-	-	-	-	1	-
2	Agenda II							
1	Banyaknya tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Solok	Kejadian	676	797	930	1.369	928	689
2	Banyaknya perceraian berdasarkan sebabnya	Kasus	30	45	36	17	16	*15
3	Agenda III							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,12	6,13	6,26	5,63	*5,79	**5,43
2	Kerusakan Lingkungan Hidup (khususnya kawasan hutan)	%	12,98	12,98	12,47	10,20	6,10	6,10
4	Agenda IV							
1	Tingkat Kemiskinan	%	11,75	11,19	10,04	9,29	8,54	9,04
2	Angka Pengangguran	%	3,04	5,99	4,76	4,50	4,25	3,53
3	Jumlah Nagari Tertinggal yang di entaskan	Nagari	6	6	6	6	6	6
5	Agenda V							
1	Angka Melek Huruf	%	97,19	97,21	97,24	97,40	98,00	99,87
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	7,6	8,03	8,04	8,05	8,06	8,66
6	Agenda VI							
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,6	66,95	67,26	67,50	72,00	70,02
7	Agenda VII							
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	233.982	456.613	467.511	437.464	439.207	365.126



8	Agenda VIII							
	1	Rasio KDRT	Rasio	0,00018	0,00016	0,00014	0,00012	0,00010
2	Peringkat Porprov Kabupaten Solok	Peringkat	5	-	6	-	5	

Sumber : Data diolah dari Data Aspek Fokus dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah/SIPD (sesuai Permendagri No. 8 Tahun 2014)

2.5.3 Capaian Kinerja Program dan Pendanaan RPJMD 2010-2015

Untuk melihat pencapaian target kinerja program dan realisasi pendanaan di masing-masing agenda pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60

Capaian Kinerja Program dan Pendanaan RPJMD 2010-2015

Agenda	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	RPJMD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Pendanaan (%)	Capaian kinerja (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	230	627	596.146.917.315	359.226.590.757	60,26	101,11
2	13	33	50.101.274.104	132.322.777.084	264,11	99,17
3	216	595	366.901.705.139	444.991.154.845	121,28	115,30
4	58	130	128.836.380.636	144.123.997.704	111,87	114,58
5	35	155	239.499.940.656	219.324.544.954	91,58	99,82
6	90	127	110.468.672.221	106.562.548.325	96,46	103,97
7	13	26	9.268.793.523	7.468.338.338	80,58	93,52
8	24	39	8.429.160.000	8.217.087.155	97,48	92,23
TOTAL	679	1.732	1.509.652.843.594	1.422.237.039.162	94,21	102,46

Secara total capaian pendanaan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 mencapai 94,21% dengan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 102,46%. Pelampauan capaian kinerja tersebut disebabkan karena adanya peningkatan program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari kenaikan DAK dan DAU.



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Periode kinerja keuangan Kabupaten Solok disajikan untuk periode tahun 2010-2015, data kinerja keuangan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 diperoleh dari Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2014. Data kinerja keuangan tahun 2015 disajikan data Perubahan APBD Tahun 2015.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum struktur APBD Kabupaten Solok terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri atas:

A. Komponen Pendapatan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta



- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

B. Komponen Belanja:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

C. Komponen Pembiayaan:

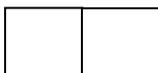
- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Ringkasan perubahan APBD Kabupaten Solok berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

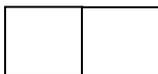
--	--

Tabel 3.1
Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2010 s.d. 2015

URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi								
PENDAPATAN	549.588.918.540,00	553.370.428.814,01	660.663.616.258,00	661.389.870.532,71	726.489.764.720,00	726.989.769.711,19	855.085.274.469,00	857.927.529.501,80	981.547.156.320,00	988.804.498.525,00	1.108.663.633.087,00	1.101.484.693.326,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.636.775.000,00	19.620.321.086,01	29.143.922.750,00	30.631.854.541,71	24.652.021.934,00	26.679.471.522,19	33.418.135.797,00	31.491.005.211,80	42.668.956.152,00	51.502.148.550,00	47.980.248.701,00	55.610.732.918,25
1 Pendapatan Pajak Daerah	3.910.014.000,00	3.151.114.118,67	6.166.007.635,00	5.374.296.600,00	5.535.069.835,00	6.233.466.782,00	7.184.999.759,00	6.929.890.010,00	9.563.469.255,00	10.313.711.698,00	10.293.381.434,00	10.848.119.336,37
2 Hasil Retribusi Daerah	6.054.829.550,00	4.161.797.839,00	4.532.811.880,00	4.993.536.908,00	7.029.236.680,00	5.911.340.291,00	12.954.234.618,00	9.442.006.826,00	12.994.095.923,00	15.296.573.230,00	12.177.054.275,00	11.184.812.999,00
3 Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.573.172.600,00	3.119.449.687,00	3.500.000.000,00	5.200.894.612,00	4.857.865.919,00	4.857.865.919,00	5.498.818.598,00	5.640.493.341,24	5.977.772.174,00	5.977.772.174,00	5.619.223.492,00	5.641.032.080,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.098.758.850,00	9.187.959.441,34	14.945.103.235,00	15.063.126.421,71	7.229.849.500,00	9.676.798.530,19	7.780.082.822,00	9.478.615.034,56	14.133.618.800,00	19.914.091.448,00	19.890.589.500,00	27.936.768.502,88
DANA PERIMBANGAN	490.284.093.538,00	492.563.810.411,00	554.727.555.714,00	555.673.452.005,00	602.244.286.956,00	600.756.085.108,00	682.134.920.203,00	681.299.006.040,00	765.023.758.168,00	763.142.743.017,00	818.621.015.386,00	802.966.625.338,00
1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak	22.191.628.414	26.660.474.411,00	21.698.095.994,00	22.643.992.285,00	25.722.237.956,00	24.234.036.108,00	22.584.566.203,00	21.748.652.040,00	22.453.187.168,00	20.572.172.017,00	29.816.672.386,00	18.209.462.338,00
2 Dana Alokasi Umum	417.610.165.124,00	415.421.036.000,00	481.015.459.720,00	481.015.459.720,00	521.759.479.000,00	521.759.479.000,00	588.040.074.000,00	588.040.074.000,00	651.730.691.000,00	651.730.691.000,00	676.074.363.000,00	676.074.363.000,00
3 Dana Alokasi Khusus	50.482.300.000,00	50.482.300.000,00	52.014.000.000,00	52.014.000.000,00	54.762.570.000,00	54.762.570.000,00	71.510.280.000,00	71.510.280.000,00	90.839.880.000,00	90.839.880.000,00	112.729.980.000,00	108.682.800.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.668.050.002,00	41.186.297.317,00	76.792.137.794,00	75.084.563.986,00	99.593.455.830,00	99.554.213.081,00	139.532.218.469,00	145.137.518.250,00	173.854.442.000,00	174.159.606.958,00	242.062.369.000,00	242.907.335.070,00
1 Pendapatan Hibah	-	-	130.000.000,00	-	374.230.000,00	350.525.081,00	866.169.850,00	752.486.650,00	802.755.000,00	686.206.779,00	16.025.700.000,00	15.047.154.200,00



URAIAN		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	13.889.000.002,00	16.663.697.317,00	22.150.380.794,00	20.577.126.986,00	22.248.684.830,00	22.158.147.000,00	18.260.109.019,00	23.579.092.000,00	31.253.380.000,00	31.675.093.179,00	36.797.102.000,00	38.273.113.870,00
3	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	24.168.250.000,00	23.904.200.000,00	45.105.117.000,00	45.105.117.000,00	76.720.541.000,00	76.720.541.000,00	107.854.062.000,00	107.854.062.000,00	134.533.707.000,00	134.533.707.000,00	184.522.567.000,00	184.870.067.000,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	610.800.000,00	618.400.000	9.406.640.000,00	9.402.320.000,00	250.000.000,00	325.000.000,00	12.551.877.600,00	12.951.877.600,00	7.264.600.000,00	7.264.600.000,00	4.717.000.000,00	4.717.000.000,00
BELANJA		595.099.166.317,93	537.104.294.496,66	717.775.915.814,28	640.519.018.906,10	811.060.727.475,00	743.201.260.130,75	893.623.268.916,33	826.295.868.559,55	1.067.858.179.633,58	948.937.934.457,64	1.199.889.806.449,27	1.050.303.571.264,41
-	Belanja Operasi	519.285.339.690,93	481.083.707.501,66	594.213.391.968,28	551.703.417.757,10	656.132.887.563,00	601.546.440.346,75	738.937.770.974,80	679.254.745.450,44	870.887.984.903,58	769.882.028.739,64	982.674.601.077,27	867.900.265.593,41
-	Belanja Pegawai	395.035.550.969,93	368.492.725.399,00	433.609.436.938,28	408.845.476.669,34	495.465.647.855,00	459.059.360.649,00	547.094.036.574,75	506.567.555.437,00	629.717.846.880,19	556.978.414.222,00	670.203.669.206,27	586.011.108.030,39
-	Belanja Barang	74.891.883.724,00	67.681.537.957,00	121.805.617.806,00	111.620.497.566,10	123.144.600.285,00	111.518.074.550,00	151.695.471.014,97	139.943.821.557,20	202.268.889.760,00	181.768.857.169,60	236.482.546.548,00	209.326.774.888,02
-	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Belanja Subsidi	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-
-	Belanja Hibah	21.861.770.000,00	20.302.783.760,00	13.849.027.919,00	12.251.584.614,00	13.980.438.000,00	11.160.036.054,00	12.230.400.000,00	9.208.408.517,00	9.951.000.000,00	8.730.001.663,00	25.145.195.000,00	22.142.099.049,00
-	Belanja Bantuan Sosial	7.085.091.405,00	5.756.048.673,66	6.049.643.405,00	3.594.467.913,66	1.803.691.368,00	660.359.200,00	4.022.070.000,00	3.408.678.400,00	5.023.392.000,00	4.002.014.000,00	-	-
-	Belanja Bagi hasil Kepada Propinsi/kab/kota dan pemerintah	2.065.793.592,00	1.007.470.481,00	3.112.475.900,00	994.715.194,00	1.643.468.650,00	806.528.531,00	2.100.742.960,00	950.286.782,00	1.761.280.000,00	1.048.388.646,00	-	-
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah	18.245.250.000,00	17.843.141.231,00	15.687.190.000,00	14.396.675.800,00	19.995.041.405,00	18.342.081.362,75	21.695.050.425,08	19.175.994.757,24	22.065.576.263,39	17.354.353.039,04	50.743.190.323,00	50.420.283.626,00

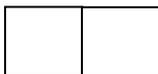


URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Target	Realisasi										
- Belanja Modal	75.063.826.627,00	55.398.436.995,00	121.883.356.846,00	87.150.482.599,00	148.116.097.744,00	134.972.370.616,00	151.918.497.941,53	144.289.579.109,11	193.470.194.730,00	175.926.481.718,00	213.715.205.372,00	179.309.289.671,00
- Belanja Tanah	495.400.000,00	218.768.750,00	2.497.400.000,00	772.219.000,00	3.285.000.000,00	2.441.010.000,00	450.730.950,00	305.521.000,00	1.251.474.950,00	1.046.532.940,00	4.192.400.000,00	298.135.100,00
- Belanja Peralatan dan Mesin	20.054.594.795,00	13.070.027.055,00	26.801.034.918,00	20.505.071.989,00	24.811.458.893,00	22.472.742.123,00	26.872.142.360,23	22.084.734.772,00	42.432.663.541,00	38.181.046.528,00	32.541.733.379,00	21.330.989.743,00
- Belanja Gedung dan Bangunan	20.697.060.912,00	9.916.102.525	49.980.894.728,00	28.212.905.508,00	68.649.789.951,00	61.160.774.922,00	45.132.627.381,30	43.848.815.191,11	44.722.492.433,00	39.115.914.000,00	73.358.716.747,00	59.467.895.497,00
- Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan	25.082.017.910,00	23.955.153.465,00	40.435.470.400,00	35.523.376.602,00	51.201.302.000,00	48.760.178.471,00	78.939.904.450,00	77.532.813.790,00	100.119.488.700,00	95.672.095.508,00	103.084.135.246,00	97.849.494.697,00
- Belanja Aset Tetap lainnya	8.734.753.010,00	8.238.385.200,00	2.168.556.800,00	2.136.909.500,00	168.546.900,00	137.665.100,00	523.092.800,00	517.694.356,00	4.944.075.106,00	1.910.892.742,00	538.220.000,00	362.774.634,00
- Belanja Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	622.150.000,00	1.679.167.000,00	1.665.118.550,00	6.811.742.168,00	6.682.449.168,00	2.767.000.000,00	2.751.544.000,00	3.500.000.000,00	3.129.424.000,00	3.500.000.000,00	3.094.016.000,00
Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	622.150.000,00	1.679.167.000,00	1.665.118.550,00	6.811.742.168,00	6.682.449.168,00	2.767.000.000,00	2.751.544.000,00	3.500.000.000,00	3.129.424.000,00	3.500.000.000,00	3.094.016.000,00
Surplus/ (Defisit)	(45.510.247.777,93)	16.266.134.317,35	57.112.299.556,28	20.870.851.626,61	84.570.962.755,00	16.211.490.419,56	38.537.994.447,33	31.631.660.942,25	86.311.023.313,58	39.866.564.067,36	313.869.858.855,73	
PEMBIAYAAN	45.510.247.777,93	33.335.615.563,93	57.112.299.556,28	46.957.727.640,28	84.570.962.755,00	63.388.080.966,89	38.537.994.447,33	37.842.633.352,33	86.311.023.313,58	62.410.439.294,91	94.587.453.362,27	95.913.732.362,27
PENERIMAAN DAERAH	46.260.247.777,93	33.337.889.063,93	64.192.453.381,28	51.194.832.881,28	89.434.588.355,00	68.189.975.966,89	47.926.590.547,33	47.219.032.352,33	94.431.023.313,58	69.780.439.294,58	102.627.003.362,27	103.953.282.362,27
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	33.337.889.063,93	33.337.889.063,93	49.601.749.881,28	49.601.749.881,28	67.828.579.266,89	67.828.579.266,89	47.176.590.547,33	46.803.853.852,33	69.474.294.294,58	69.474.294.294,58	102.277.003.362,27	102.244.482.362,27
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Target	Realisasi	Target	Rea								
- Penerimaan Pinjaman Daerah	12.172.358.714,00	-	12.744.800.000,00	-	20.856.009.088,11	-	750.000.000,00	410.178.500,00	24.206.729.019,00	-	-	-
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000.000,00	306.145.000,00	-	-
- Penerimaan Piutang Daerah	750.000.000,00	347.476.500,00	1.845.903.500,00	1.357.583.000,00	750.000.000,00	339.396.700,00	-	-	-	-	350.000.000,00	102.100.000,00
- Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	150.000.000,00	-	235.500.000,00	-	22.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	1.606.700.000,00
-												
PENGELUARAN DAERAH	750.000.000,00	499.750.000,00	7.080.153.825,00	4.237.105.241,00	4.863.625.600,00	4.801.895.000,00	9.388.596.100,00	9.376.399.000,00	8.120.000.000,00	7.369.999.999,67	8.039.550.000,00	8.039.550.000,00
- Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	3.811.000.000,00	-	-	-	7.369.999.999,67	-	-
- Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-	4.594.591.434,00	1.769.692.434,00	3.811.000.000,00	257.895.000,00	9.147.899.000,00	9.147.899.000,00	7.370.000.000,00	-	8.039.550.000,00	8.039.550.000,00
- Pembayaran Pokok Utang	-	-	1.735.562.391,00	1.730.112.807,00	302.625.600,00	733.000.000,00	-	-	-	-	-	-
- Pemberian Pinjaman Daerah	750.000.000,00	499.750.000,00	750.000.000,00	737.300.000,00	750.000.000,00	-	240.697.100,00	228.500.000,00	750.000.000,00	-	-	-
-												
- Pembiayaan Netto	45.510.247.777,93	33.335.615.563,93	57.112.299.556,28	46.957.727.640,28	84.570.962.755,00	63.388.080.966,89	38.537.994.447,33	37.842.633.352,33	86.311.023.313,58	62.410.439.294,91	94.587.453.362,27	95.913.732.362,27
-												
- SILPA		49.601.749.881,28		67.828.579.266,89		47.176.590.547,33		69.474.294.294,58		102.277.003.362,27		144.951.973.172,11
-												

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok



Penjelasan selengkapnya mengenai setiap komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dapat dilihat pada uraian berikut ini.

3.1.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Gambaran target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 s/d 2015 (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
2010	549.588.918.540,00	553.370.428.814,01	100,69	3.781.510.274,01
2011	660.663.616.258,00	661.389.870.532,71	100,11	726.254.274,71
2012	726.489.764.720,00	726.989.769.711,19	100,07	500.004.991,19
2013	855.085.274.469,00	857.927.529.501,80	100,33	2.842.255.032,80
2014	981.547.156.320,00	988.804.498.525,00	100,74	7.257.342.205,00
2015	1.108.663.633.087,00	1.329.301.143.750,25	119,90	220.637.510.663,25
Rata-rata	813.673.060.565,67	852.963.873.472,49	103,64	39.290.812.906,83

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, rata-rata target Pendapatan Daerah sebesar Rp.813.673.060.565,67 dengan realisasi sebesar Rp.852.963.873.472,49. Berdasarkan pencermatan terhadap tabel 3.2 diatas, terhadap kenaikan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok setiap tahunnya, maka dapat juga dihitung rata-rata pertumbuhan realisasi setiap objek pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2010-2015 yang ditunjukkan pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2010-2015

URAIAN		Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2014		2015
PENDAPATAN		553.370.428.814,01	661.389.870.532,71	726.989.769.711,19	857.927.529.501,80	988.804.498.525,00	1.329.301.143.750,25	
PENDAPATAN ASLI DAERAH		19.620.321.086,01	30.631.854.541,71	26.679.471.522,19	31.491.005.211,80	51.502.148.550,00	55.567.002.472,25	
1	Pendapatan Pajak Daerah	3.151.114.118,67	5.374.296.600,00	6.233.466.782,00	6.929.890.010,00	10.313.711.698,00	10.847.745.336,37	22,88
2	Hasil Retribusi Daerah	4.161.797.839,00	4.993.536.908,00	5.911.340.291,00	9.442.006.826,00	15.296.573.230,00	11.184.812.999,00	17,91
3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.119.449.687,00	5.200.894.612,00	4.857.865.919,00	5.640.493.341,24	5.977.772.174,00	5.641.032.080,00	10,38
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.187.959.441,34	15.063.126.421,71	9.676.798.530,19	9.478.615.034,56	19.914.091.448,00	27.893.412.056,88	20,33
DANA PERIMBANGAN		492.563.810.411,00	555.673.452.005,00	600.756.085.108,00	681.299.006.040,00	763.142.743.017,00	802.966.625.338,00	
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak	26.660.474.411,00	22.643.992.285,00	24.234.036.108,00	21.748.652.040,00	20.572.172.017,00	18.209.462.338,00	-6,16
2	Dana Alokasi Umum	415.421.036.000,00	481.015.459.720,00	521.759.479.000,00	588.040.074.000,00	651.730.691.000,00	676.074.363.000,00	8,46
3	Dana Alokasi Khusus	50.482.300.000,00	52.014.000.000,00	54.762.570.000,00	71.510.280.000,00	90.839.880.000,00	108.682.800.000,00	13,63
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		41.186.297.317,00	75.084.563.986,00	99.554.213.081,00	145.137.518.250,00	174.159.606.958,00	242.907.335.070,00	
1	Pendapatan Hibah		-	350.525.081,00	752.486.650,00	686.206.779,00	15.047.154.200,00	87,12
2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	16.663.697.317,00	20.577.126.986,00	22.158.147.000,00	23.579.092.000,00	31.675.093.179,00	38.273.113.870,00	14,86
3	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	23.904.200.000,00	45.105.117.000,00	76.720.541.000,00	107.854.062.000,00	134.533.707.000,00	184.870.067.000,00	40,63
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	618.400.000	9.402.320.000,00	325.000.000,00	12.951.877.600,00	7.264.600.000,00	4.717.000.000,00	40,30



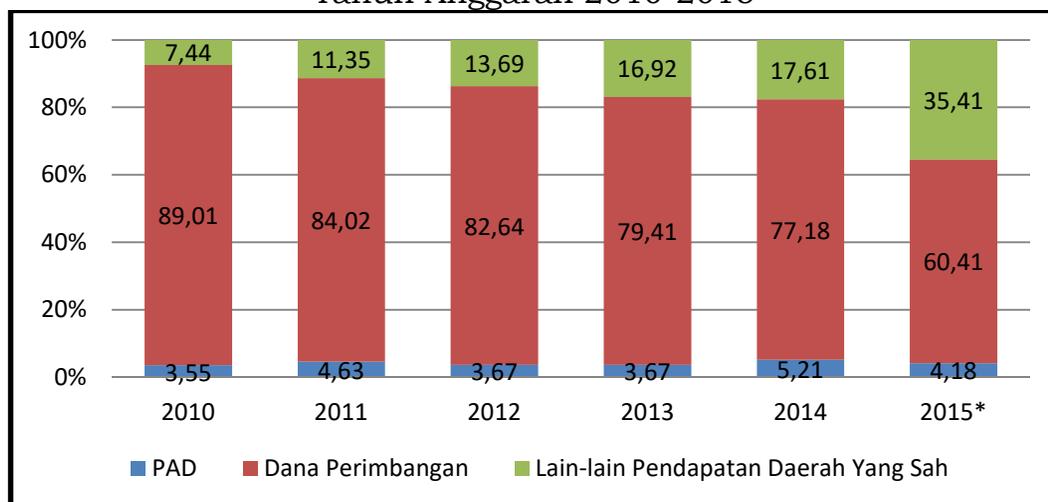
Tabel 3.4
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2010-2015

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
PAD	3,55	4,63	3,67	3,67	5,21	4,18
Dana Perimbangan	89,01	84,02	82,64	79,41	77,18	60,41
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7,44	11,35	13,69	16,92	17,61	35,41
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok diolah dan Tahun 2015 data sementara

Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi PAD cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini terlihat pada tahun 2012 terjadi penurunan dibanding tahun 2011 hal ini disebabkan karena adanya beberapa uraian Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Retribusi Daerah yang dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini memperlihatkan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Solok (ditunjukkan oleh Rasio PAD terhadap Total Pendapatan) terhadap Dana Perimbangan sangat tinggi, ditunjukkan dengan besarnya persentase Dana Perimbangan terhadap total pendapatan.

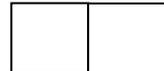
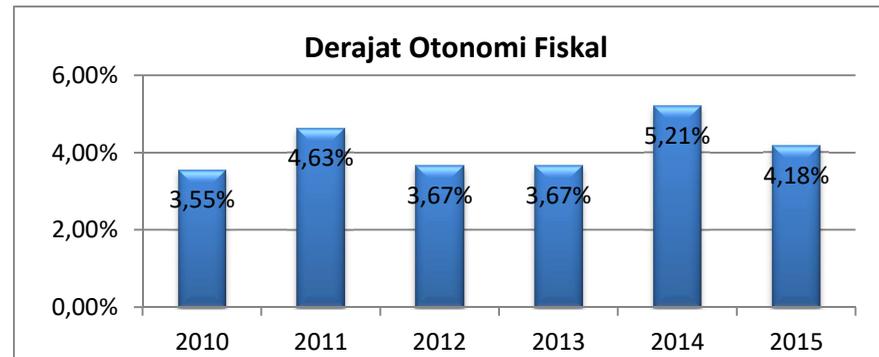
Grafik 3.1
 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
 Total Pendapatan Daerah Kabupaten Solok
 Tahun Anggaran 2010-2015



Tabel 3.5
Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2010-2015

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN ASLI DAERAH	19,620,321,086.01	30,631,854,541.71	26,679,471,522.19	31,491,005,211.80	51,502,148,550.00	55,610,732,918.25
TOTAL PENERIMAAN DAERAH	553,370,428,814.01	661,389,870,532.71	726,989,769,711.19	857,927,529,501.80	988,804,498,525.00	1,329,301,143,750.25
Derajat Otonomi Fiskal	3.55%	4.63%	3.67%	3.67%	5.21%	4.18%

Grafik 3.2
Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2010-2015



Dari tabel 3.5 dan grafik 3.2 diatas menggambarkan derajat otonomi fiskal Kabupaten Solok tahun 2010-2015. Derajat otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengukuran derajat otonomi keuangan menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun tolok ukur untuk mengetahui seberapa besar derajat otonomi fiskal daerah adalah dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kriteria Derajat Otonomi Fiskal

No.	Nilai Derajat Otonomi Fiskal	Kriteria
1.	0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
2.	10,01% - 20,00%	Kurang
3.	20,01% - 30,00%	Sedang
4.	30,01% - 40,00%	Cukup
5.	40,01% - 50,00%	Baik
6.	50,00% - ke atas	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas, menunjukkan derajat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Solok yang sangat kurang dalam artian, keuangan pemerintah Kabupaten Solok dalam melaksanakan pembangunan masih sangat bergantung pada sumber-sumber pendapatan lainnya terutama pendanaan yang bersumber dari pusat.

Beberapa kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan adalah :

A. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah.



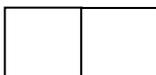
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada objek dan subjeknya, serta penggalan potensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya mengoptimalisasikan peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa kegiatan intensifikasi yang secara rutin dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2010-2015 antara lain melalui:

1. sosialisasi, pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
 2. pengumpulan pengolahan data base pajak dan retribusi; dan
 3. kajian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terutama yang berhubungan dengan perubahan tarif.
- B. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak Provinsi.

3.1.1.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2010-2015, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



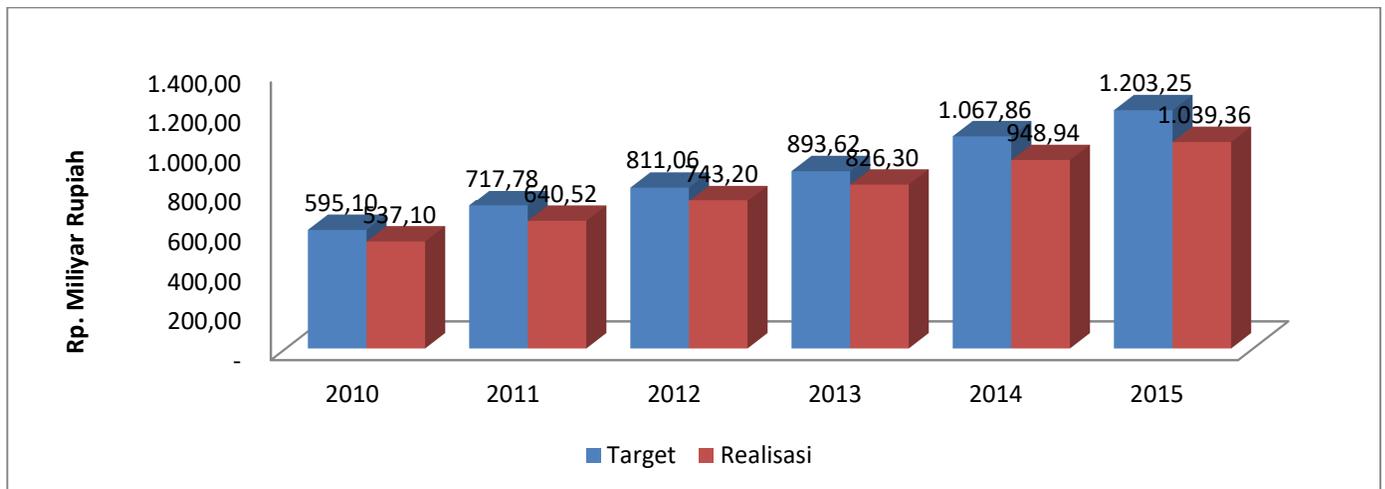
Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
1	2	3	4	5
2010	595.099.166.317,93	537.104.294.496,66	90,25	(57.994.871.821,27)
2011	717.775.915.814,28	640.519.018.906,10	89,24	(77.256.896.908,18)
2012	811.060.727.475,00	743.201.260.130,75	91,63	(67.859.467.344,25)
2013	893.623.268.916,33	826.295.868.559,55	92,47	(67.327.400.356,78)
2014	1.067.858.179.633,58	948.937.934.457,64	88,86	(118.920.245.175,94)
2015	1.203.251.086.449,29	1.039.360.123.880,00	86,38	(163.890.962.569,29)
Rata-Rata	881.444.724.101,07	789.236.416.738,45	89,81	(92.208.307.362,62)

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok

Dari Tabel 3.5 diatas selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, rata-rata target belanja sebesar Rp.881.444.724.101,07 terealisasi sebesar Rp.789.236.416.738,45 atau 89,81%. Realisasi yang rendah tergambar pada Tahun 2014 dan Tahun 2015, hal ini karena kurangnya realisasi anggaran yang berasal dari Dana DAK tambahan pada Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum serta DAK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Grafik 3.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2010-2015



3.1.1.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi

--	--

(*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), Koreksi (*contra post*), dan Pencairan Dana Cadangan. Rata-rata target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. 328.689.864.647,41 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 327.213.219.574,41.

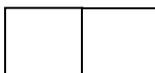
3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislative daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Perkembangan Neraca Kabupaten Solok dari Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

--	--

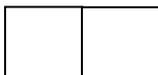
NERACA KABUPATEN SOLOK
2010 s/d 2014

URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
ASET	1.061.909.484.205,94	1.294.879.214.733,87	1.510.682.014.370,08	1.711.094.480.326,69	2.004.899.456.661,15
ASET LANCAR	78.609.074.810,62	78.609.074.810,62	58.425.256.373,66	78.791.724.798,91	123.969.412.233,56
KAS	57.777.463.803,61	67.943.581.413,89	47.214.417.487,33	69.708.709.517,58	102.470.355.563,27
SETARA KAS	-	-	-	-	1.189.494.506,00
INVESTASI JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-
PIUTANG	4.624.154.298,33	4.689.333.320,33	4.897.514.328,33	4.678.771.127,33	15.791.083.779,33
PERSEDIAAN	3.551.559.624	5.976.160.076,40	6.313.324.558,00	4.404.244.154,00	4.518.478.384,96
INVESTASI JANGKA PANJANG	14.688.485.564,33	16.222.677.998,33	36.417.119.594,33	45.560.018.594,33	48.965.985.409,41
INVESTASI NON PERMANEN	2.100.000.000,00	1.864.500.000,00	1.842.500.000,00	1.837.500.000,00	1.837.500.000,00
INVESTASI PERMANEN	12.588.485.564,33	14.358.177.998,33	34.574.619.594,33	43.722.518.594,33	47.128.485.409,41
ASET TETAP	989.443.534.838,00	1.198.867.059.400,92	1.318.564.794.380,10	1.447.082.853.262,21	1.630.862.314.162,21
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	-	1.180.402.524,00	2.432.468.054,00	15.308.140.278,00	28.166.347.213,00
JUMLAH ASET	1.061.909.484.205,94	1.294.879.214.733,87	1.415.839.638.402,09	1.586.742.736.933,45	1.831.964.059.018,18



URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
KEWAJIBAN	1.094.972.355,00	372.471.297,00	5.213.920.519,00	418.756.217,00	3.801.722.492,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.094.972.355,00	372.471.297,00	5.213.920.519,00	418.756.217,00	3.801.722.492,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA	1.294.506.743.436,87	1.294.506.743.436,87	1.410.625.717.883,09	3.094.274.992.850,99	1.828.162.336.526,18
EKUITAS DANA LANCAR	78.236.603.513,62	78.236.603.513,62	53.211.335.854,66	1.586.323.980.716,45	120.167.689.741,56
EKUITAS DANA INVESTASI	1.216.270.139.923,25	1.216.270.139.923,25	1.357.414.382.028,43	1.507.951.012.134,54	1.707.994.646.784,62
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.294.879.214.733,87	1.294.879.214.733,87	1.415.839.638.402,09	1.586.742.736.933,45	1.831.964.059.018,18

Sumber : DPPKA Kabupaten Solok



Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri atas:

- (1) aset lancar;
- (2) investasi jangka panjang,
- (3) aset tetap,
- (4) dana cadangan; dan
- (5) aset lainnya.

Tahun 2014, Kabupaten Solok memiliki aset senilai Rp.1,2 Trilyun. Jumlah aset terbesar berupa aset tetap, jumlah tahun 2014 mencapai Rp.1,4 Trilyun dan rata-rata tumbuh 3.04 persen pertahun. Aset tetap ini meliputi 91.7 persen dari seluruh aset Pemerintah Kabupaten Solok.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2014 adalah sebesar Rp.54.5Milyar. Dari tahun 2010 hingga 2015, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2011 dan tertinggi tahun 2014. Oleh karena itu, nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang



diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Solok tahun 2014 mencapai Rp. 1,82 Trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2011-2015 dengan rata-rata 4,23 persen.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Bandung dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Solok menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Solok setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

--	--

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2011-2015 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
 - a) Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pengutannya dan less distortive terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
 - c) Penataan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - d) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan SKPD Penghasil,
 - f) Meningkatkan Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD
 - g) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;



2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiskal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).

Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
- b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, meliputi: Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Solok;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada



penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur di nagari;
7. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
8. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di nagari-nagari, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
9. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan untuk pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
10. Penggunaan pagu indikatif dengan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
11. Khusus untuk kebijakan belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan

--	--

lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- d) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- e) Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada Nagari sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal Nagari dalam melaksanakan otonomi daerah;
- f) Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah nagari. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok.

3.3. Kerangka Pendanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;



2. fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah;

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan beberapa kebijakan umum anggaran sebagai berikut :

- a. sistem akuntansi anggaran berbasis akrual, sudah menjadi kewajiban daerah dalam menertibkan sistem akuntansi keuangan berbasis akrual sebagai pengganti sistem akuntansi berbasis kas yang selama ini dipakai dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. pengelolaan anggaran berbasis *e-budgetting* yang *on-line* kesemua SKPD, sistem *e-budgetting* akan mampu menertibkan pemasukan dan pengeluaran daerah, perlu diciptakan payung hukum untuk penerapannya;



- c. mempercepat serapan anggaran, menghindari pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengadaan barang dan jasa menumpuk dipenghujung tahun anggaran;
- d. pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan langsung para atasan langsung (pengawasan melekat/waskat) pada semua level pengelolaan anggaran, hal ini dilakukan guna mencegah sebelum terjadi;
- e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola anggaran, agar dapat memahami secara teknis sistem pengelolaan keuangan;
- f. ketaatan terhadap mekanisme dan prosedur, azas dan aturan berkaitan dengan pelaksanaan penganggaran;
- g. konsistensi dalam penyusunan anggaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, pembahasan dengan DPRD sampai APBD disahkan tidak ada program dan kegiatan yang naik di jalan; dan
- h. penghematan anggaran dalam bentuk efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pegangan oleh semua pengelola anggaran.

3.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016-2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Untuk periode Tahun Anggaran 2016-2021, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

- 1. optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan kondisi daerah antara lain dengan:
 - a. mengevaluasi semua produk hukum daerah (Peraturan Daerah) yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
 - b. melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;



2. peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah;
3. peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara *on-line dan* mendorong para wajib pajak daerah untuk lebih meningkatkan kesadaran perpajakan untuk membayar pajaknya sendiri (*self assessment*);
4. memperbaiki penyediaan fasilitas, pelayanan dan tertib administrasi diberbagai objek retribusi daerah, sehingga mendorong masyarakat untuk membayar retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah;
5. mendorong kreatifitas perangkat daerah untuk mengintensifkan pemungutan PAD serta mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah kepada masyarakat sebagai objek pajak dan retribusi daerah; dan
6. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah dan dengan lembaga pemerintah tingkat atas, agar semua sumber pendapatan daerah dapat terealisasi guna meningkatkan porsi pendapatan daerah dalam rangka memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah.

3.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2021 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:



- a. tanpa mengorbankan porsi belanja tidak langsung dengan melakukan penghematan anggaran melalui rasionalisasi belanja pegawai seperti; belanja perjalanan dinas, honorarium, makan minum, biaya rapat-rapat, belanja pemeliharaan, alat tulis kantor serta belanja lainnya yang terindikasi ganda atau pemborosan baik dalam belanja tidak langsung maupun dalam belanja langsung;
- b. mempercepat serapan anggaran melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk dilaksanakan lebih awal, guna menghindari pelaksanaan pembangunan yang menumpuk dipenghujung tahun anggaran;
- c. meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintahan tingkat atas, untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana tugas pembantuan dan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi oleh pemerintah provinsi yang berlokasi di Kabupaten Solok;
- d. mentaati semua peraturan perundangan terkait dengan pelaksanaan anggaran agar tepat waktu dan tepat sasaran serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparat pengelola anggaran disemua level perangkat daerah;
- e. peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- f. dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
- g. anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
- h. untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;



- i. kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- k. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 1. dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 3. mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 4. mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 5. mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (1)

--	--

penerimaan pembiayaan, dan (2) pengeluaran pembiayaan. Khusus untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk :

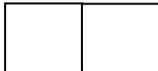
1. Penyertaan modal pada Bank Nagari / BPD Sumatera Barat
2. Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Solok
3. Penyertaan modal pada Perusda Solinda

Untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Hal ini tergambar pada Tabel 3.6 dibawah ini.

--	--

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2016 s/d 2021

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	PENDAPATAN	1.221.094.241.260,00	1.274.541.000.260,00	1.333.737.759.260,00	1.392.484.518.260,00	1.451.681.277.260,00	1.510.878.036.260,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.000.000.000,00	60.500.000.000,00	68.750.000.000,00	77.000.000.000,00	85.250.000.000,00	93.500.000.000,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	10.848.000.000,00	11.932.800.000,00	13.560.000.000,00	15.187.200.000,00	16.814.400.000,00	18.441.600.000,00
4.1.2.	Pendapatan retribusi Daerah	11.170.000.000,00	12.287.000.000,00	13.962.500.000,00	15.638.000.000,00	17.313.500.000,00	18.989.000.000,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.641.000.000,00	6.205.100.000,00	7.051.250.000,00	7.897.400.000,00	8.743.550.000,00	9.589.700.000,00
4.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	27.341.000.000,00	30.075.100.000,00	34.176.250.000,00	38.277.400.000,00	42.378.550.000,00	46.479.700.000,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.075.626.211.260,00	1.126.572.970.260,00	1.177.519.729.260,00	1.228.466.488.260,00	1.279.413.247.260,00	1.330.360.006.260,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.948.222.000,00	17.948.222.000,00	17.948.222.000,00	17.948.222.000,00	17.948.222.000,00	17.948.222.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	723.675.568.000,00	774.622.327.000,00	825.569.086.000,00	876.515.845.000,00	927.462.604.000,00	978.409.363.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	334.002.421.260,00	334.002.421.260,00	334.002.421.260,00	334.002.421.260,00	334.002.421.260,00	334.002.421.260,00
4.2.3.1.	<i>Dana Alokasi Khusus Fisik</i>	<i>143.408.700.000,00</i>	<i>143.408.700.000,00</i>	<i>143.408.700.000,00</i>	<i>143.408.700.000,00</i>	<i>143.408.700.000,00</i>	<i>143.408.700.000,00</i>
4.2.3.2.	<i>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</i>	<i>190.593.721.260,00</i>	<i>190.593.721.260,00</i>	<i>190.593.721.260,00</i>	<i>190.593.721.260,00</i>	<i>190.593.721.260,00</i>	<i>190.593.721.260,00</i>



Kode Rekening	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.468.030.000,00	87.468.030.000,00	87.468.030.000,00	87.018.030.000,00	87.018.030.000,00	87.018.030.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3.450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.797.102.000,00	36.797.102.000,00	36.797.102.000,00	36.797.102.000,00	36.797.102.000,00	36.797.102.000,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	50.220.928.000,00	50.220.928.000,00	50.220.928.000,00	50.220.928.000,00	50.220.928.000,00	50.220.928.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari daerah Provinsi Lainnya	-	-	-	-	-	-
5.	BELANJA	1.273.138.163.411,00	1.332.178.292.345,01	1.388.466.898.166,32	1.444.764.418.686,90	1.499.516.973.250,61	1.553.864.083.354,56
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	831.275.961.125,00	870.476.477.176,37	907.281.266.397,56	943.898.294.578,80	979.567.849.813,99	1.014.988.811.824,85
5.1.1	Belanja Pegawai	695.456.097.937,00	726.682.076.734,37	757.348.060.372,56	788.323.596.041,80	818.358.725.050,99	848.146.982.642,85
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.3	Belanja Subsidi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	4.850.000.000,00	5.067.765.000,00	5.281.624.683,00	5.498.171.295,00	5.707.651.621,00	5.915.410.140,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Partai Politik	1.183.672.542,00	1.183.672.542,00	1.183.672.542,00	1.183.672.542,00	1.183.672.542,00	1.183.672.542,00
5.1.7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.802.883.646,00	2.964.980.000,00	3.295.250.000,00	3.625.520.000,00	3.955.790.000,00	4.286.060.000,00



Kode Rekening	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.1.8	Belanja bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
5.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.383.307.000,00	129.477.982.900,00	134.572.658.800,00	139.667.334.700,00	144.762.010.600,00	149.856.686.500,00
5.1.10	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
5,2	BELANJA LANGSUNG	441.862.202.286,00	461.701.815.168,64	481.185.631.768,76	500.866.124.108,10	519.949.123.436,62	538.875.271.529,71
5.2.1	Belanja Pegawai	18.088.977.101,00	18.901.172.172,83	19.698.801.638,53	20.504.482.625,54	21.285.703.413,58	22.060.503.017,83
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.981.821.203,00	208.961.004.975,02	217.779.159.384,96	226.686.327.003,81	235.323.076.062,00	243.888.836.031,33
5.2.3	Belanja Modal	223.791.403.982,00	233.839.638.020,79	243.707.670.745,27	253.675.314.478,75	263.340.343.960,39	272.925.932.480,55
	TOTAL BELANJA	1.273.138.163.411,00	1.332.178.292.345,01	1.388.466.898.166,32	1.444.764.418.686,90	1.499.516.973.250,61	1.553.864.083.354,56
	SURPLUS/(DEFISIT)	(52.043.922.151,00)	(57.637.292.085,01)	(54.729.138.906,32)	(52.279.900.426,90)	(47.835.695.990,61)	(42.986.047.094,56)
6.	PEMBIAYAAN	51.543.922.151,00	57.114.842.085,01	54.184.641.516,32	51.713.133.093,65	47.247.334.821,96	42.376.269.579,38
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.043.922.151,00	74.024.842.085,01	70.690.641.516,32	69.398.133.093,65	65.669.334.821,96	42.376.269.579,38
6.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	63.943.922.151,00	73.924.842.085,01	70.590.641.516,32	69.298.133.093,65	65.569.334.821,96	42.276.269.579,38
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-



Kode Rekening	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
6.1.7	Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
6.1.8	Penerimaan Utang jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	64.043.922.151,00	74.024.842.085,01	70.690.641.516,32	69.398.133.093,65	65.669.334.821,96	42.376.269.579,38
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.500.000.000,00	16.910.000.000,00	16.506.000.000,00	17.685.000.000,00	18.422.000.000,00	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	16.910.000.000,00	16.506.000.000,00	17.685.000.000,00	18.422.000.000,00	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen lainnya	-	-	-	-	-	-



Kode Rekening	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-		-
6.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-		-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.500.000.000,00	16.910.000.000,00	16.506.000.000,00	17.685.000.000,00	18.422.000.000,00	-
6,3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-		-

--	--

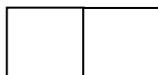
3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan program unggulan (*dedicated*) Bupati dan Wakil Bupati pada Sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian; dan
- b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi negara, situasi nasional, dan situasi regional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan fakta-fakta. Karena itu, penyusunan rencana jangka menengah daerah yang akan diaktualisasikan harus bergerak dari realitas dasar yang mencakup pembangunan di segala bidang dan diharapkan lebih memperhatikan perkembangan realitas dan dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari arus eksternalisasi dan isu globalisasi, dimana aspek ini akan sangat mempengaruhi tatanan kehidupan dan isu pembangunan regional maupun daerah.

4.1. Dinamika Lingkungan Strategis

Kajian isu strategis didasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan pembangunan. Dalam hal ini, dinamika yang terjadi di dunia internasional, nasional, regional maupun lokal penting dipahami dan disikapi untuk melakukan tindakan kebijakan preferatif maupun kuratif. Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia internasional, terhadap kondisi nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif.

4.1.1. Lingkungan Internasional

a. Globalisasi Ekonomi

Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program



penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran. Keterbukaan ekonomi dan persaingan global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), APEC, dan lain-lain menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah.

b. Fluktuasi harga dan kurs mata uang

Fluktuasi harga dan kurs mata uang akan sangat mempengaruhi perekonomian daerah yang disebabkan masih adanya pola konsumsi masyarakat yang sangat tergantung dengan produk-produk impor. Disebabkan oleh kandungan (*content*) impor yang masih relatif tinggi, untuk itu perlu peningkatan penggunaan sumberdaya lokal melalui pembangunan berbasis sumberdaya lokal. Pembangunan sumber daya lokal akan mengurangi terjadinya depresiasi rupiah karena konsumsi untuk produk lokal tidak terkait dengan nilai tukar mata uang. Sebaliknya, tingginya konsumsi produk impor akan memicu terjadinya depresiasi rupiah.

c. Degradasi lingkungan

Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob), yang berakibat pada terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. Akibatnya, terjadi krisis pangan dunia, untuk itu harus segera dilakukan upaya mencapai swasembada pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

d. Komitmen Internasional

Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah pembaharuan kesepakatan dalam *Millenium Development Goals (MDG's)* menjadi *Sustainable Development Goal (SDG's)* tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, *Hyogo Framework* tentang



peredaman bencana, *Ecolabelling* atau sertifikasi produk dan sebagainya.

Pengesahan *Sustainable Development Goals* (SDG's) berlangsung pada Sidang PBB tanggal 25-27 September 2015. Dokumen itu terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan (*goals*). Ada 5 (lima) pondasi dari SDG's yaitu (manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan). Sedangkan 17 (tujuh belas) tujuan tersebut adalah :

1. mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia;
4. menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;
6. menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;
8. mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
11. menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
12. menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;



15. melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16. mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan
17. memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.1.2. Lingkungan Nasional

a. Kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan dan isu strategis nasional karena sampai dengan Tahun 2014 angka kemiskinan berada pada angka 10,96% dan pengangguran berada pada angka 5,94%.

b. Krisis energi

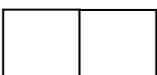
Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

c. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.

d. Bencana alam

Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim



memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa tsunami, gempa, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Selain itu kebakaran hutan juga sering terjadi sebagai negara yang cukup kaya akan hutan dan perkebunan. Tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.

e. Kemampuan keuangan negara

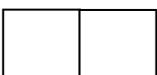
Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalan pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJMN 2014-2019 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

f. Stabilitas keamanan dan ketentraman

Salah satu dampak buruk kemajuan IPTEK adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan.

g. Hambatan perdagangan antar daerah

Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor.



h. Keadilan dan kesetaraan gender

Indikator pembangunan gender secara resmi adalah *Gender-related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measurement (GEM)*. Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu.

i. Perlindungan dan kesejahteraan anak

Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, anak jalanan dan lain-lain adalah fakta yang menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak.

j. Daya saing produk, kemampuan teknologi dan industri

Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan IPTEK dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan IPTEK dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Budaya IPTEK yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara Indonesia, *image* yang berkembang adalah bahwa produk dalam negeri selalu lebih buruk daripada produk luar negeri. Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk *local genius* yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.

4.1.3. Lingkungan Regional (Sumatera Barat)

Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang memiliki kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam



pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Teknokratik Sumatera Barat Tahun 2016-2020 secara ringkas sebagai berikut :

- a. masih tingginya jumlah penduduk miskin;
- b. masih tingginya jumlah penganggur;
- c. belum meratanya pelayanan kesehatan dasar;
- d. bendahnya realisasi penanaman modal;
- e. rendahnya akses usaha kecil dan mikro terhadap permodalan dan pasar ekspor;
- f. belum optimalnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah (Good Governance);
- g. bencana alam; dan
- h. belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender

4.2. **Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Daerah**

Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan reproduksi sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, infrastruktur, teknologi, dan bidang pembangunan lainnya yang saling berkaitan dengan isu global yang bersifat kompleks. Dalam konsep perencanaan, isu strategis memiliki tingkat kemendesakan, kedalaman dan keluasan dampak, kejelajahan, dan penandaan yang ditimbulkan lebih luas dan berdampak untuk masa mendatang.

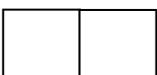
Berdasarkan fakta dan potensi yang ada, dapat ditarik beberapa permasalahan yang nanti akan dijadikan isu-isu strategis daerah.

4.2.1. **Permasalahan Pembangunan**

- a. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pada Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya permasalahan makro yang terjadi adalah Tingginya Angka Kemiskinan dan masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta rendahnya pemerataan dan perluasan akses, mutu, relevansi, daya saing dan tata kelola pendidikan, maka secara mikro beberapa permasalahan yang terjadi di daerah adalah:

1. belum tuntasnya pelaksanaan Wajar 9 Tahun, hal ini tergambar dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada Tahun 2015 sebesar 8,75 Tahun;



2. belum memadainya jumlah mobilitas layanan dan jumlah polisi pamong praja dalam penegakkan peraturan daerah;
3. belum adanya database tenaga kerja dan gender;
4. pelestarian kekayaan adat budaya Minang Kabau;
5. sistem Kependudukan, akte kelahiran, kematian, akte nikah belum terintegrasi;
6. masih rendahnya cakupan peserta KB aktif;
7. kurangnya partisipasi swadaya masyarakat dalam perberdayaan masyarakat;
8. kualitas dan kuantitas SDM pengelola kearsipan masih rendah;
9. rendahnya pemerataan dan perluasan akses, mutu, relevansi, daya saing, dan tata kelola pendidikan;
10. belum tersedia rumah baca disetiap Nagari;
11. angka kematian ibu dan bayi masih tinggi;
12. sarana dan prasarana kesehatan belum memadai;
13. terjadi peningkatan angka gizi buruk setiap tahunnya;
14. takupan jorong UCI setiap tahunnya mengalami penurunan dan masih dibawah target (95%);
15. cakupan Penemuan dan Penanganan penderita TBC baru masih jauh dibawah target (70%); dan
16. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami penurunan;

b. Bidang Ekonomi

Secara makro permasalahan yang dihadapi bidang ekonomi dengan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi makro, walaupun secara angka nilai pertumbuhan tetap meningkat, dan masih belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan beberapa permasalahan di daerah antara lain:

1. masih rendahnya kualitas pangan yang beredar, hal ini karena masih ditemukan kejadian luar biasa keracunan pangan, dan menurut hasil pengujian bahan pangan segar berupa sayuran dan buah-buahan terhadap residu pestisida pada beberapa lokasi uji terdapat kondisi pangan yang tidak aman untuk konsumsi;



2. masih rendahnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang, hal ini dilihat dengan Skor Pola Pangan Harapan yang baru mencapai 79,8;
3. belum optimalnya pola distribusi dan aksesibilitas pangan, karena pada beberapa lokasi masih terdapat daerah rawan pangan dan masih terjadinya fluktuasi harga pangan di daerah sepanjang tahun;
4. produksi dan produktifitas pertanian

Dalam sisi produksi dan Produktifitas Pertanian, dilihat dari Capaian kinerja pada periode sebelumnya, secara umum (pertanian tanaman pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan), target produksi dan produktifitas, sudah tercapai, bahkan ada yang melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan, Akan tetapi masih perlu di tingkatkan mengingat potensi pertanian Kabupaten Solok yang cukup besar dibidang pertanian dan upaya menuju Swasembada pangan. Khusus untuk Pertanian Hortikultura dan Perkebunan, terdapat permasalahan kualitas produksi yang masih rendah. Beberapa hal yang sangat mempengaruhi produksi dan produktifitas ini adalah sebagai berikut:

- a) masih perlunya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- b) belum optimalnya Kapasitas SDM Pertanian;
- c) belum optimalnya peranan dan fungsi kelembagaan tani;
- d) belum adanya regulasi pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis kawasan; dan
- e) belum optimalnya ekstensifikasi lahan pertanian.

5. Pengolahan Produk Hasil Pertanian

Dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat bidang pertanian, selain dari produksi dan produktifitas, juga dipengaruhi oleh nilai tambah produk pertanian yang berkaitan erat dengan pengolahan hasil pertanian. Permasalahan pada pengolahan produk pertanian adalah belum optimalnya pengolahan produk yang dilakukan oleh petani (Pertanian tanaman pangan dan Hortikultura,



Peternakan, Perkebunan dan Perikanan) yang di sebabkan oleh:

- a) belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian;
- b) belum tersedianya regulasi pengolahan hasil pertanian yang berdaya saing;
- c) belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan dari pengolahan hasil pertanian;
- d) belum optimalnya inovasi teknologi yang memanfaatkan pengelolaan sumber daya lokal; dan
- e) belum optimalnya kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang mendukung pengembangan usaha pengelolaan hasil pertanian.

6. Koperasi

Permasalahan yang dijumpai pada koperasi adalah masih rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Koperasi yang mengakibatkan masih rendahnya kepercayaan masyarakat pada koperasi sehingga kurang berjalannya fungsi dan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat;

7. Perdagangan

Pada sektor perdagangan ini terdapat permasalahan belum optimalnya sistem perdagangan yang terintegrasi dengan sektor lain seperti pariwisata. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

- a) belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan;
- b) masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan pengelola pasar;
- c) belum optimalnya sistem jejaring pasar untuk produk unggulan sehingga masih rendahnya dukungan pemasaran terhadap sektor lain seperti pariwisata; dan
- d) belum adanya dukungan regulasi dalam mewujudkan system pengelolaan perdagangan yang di inginkan.

8. UMKM

Untuk sektor UMKM secara umum terdapat permasalahan belum optimalnya kualitas dan kuantitas produksi dan



produktifitas produk UMKM sehingga masih rendahnya daya saing produk UMKM. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

- a) belum optimalnya sarana dan prasarana produksi UMKM;
- b) masih rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan UMKM;
dan
- c) belum optimalnya dukungan permodalan yang menunjang adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM UMKM.

9. Lembaga Ekonomi Daerah

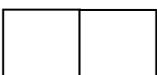
Untuk lembaga ekonomi daerah (Perusahaan Daerah seperti Perusda Solok Nan Indah dan PDAM), sebagai lembaga ekonomi daerah Kabupaten Solok, diharapkan dapat memberikan kontribusi (PAD) ke Daerah namun terdapat permasalahan di antaranya masih rendahnya sistem manajemen pada Perusahaan Daerah yang di sebabkan oleh masih rendahnya kualitas;

10. Bidang ketenaga kerjaan

Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan upaya mengurangi pengangguran. Di Kabupaten Solok terdapat permasalahan ketenagakerjaan seperti masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan masih rendahnya kemampuan penduduk usia produktif dalam menciptakan usaha sendiri. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

- a) masih rendahnya kualitas SDM dimana masih rendahnya keterampilan yang dimiliki penduduk usia produktif sehingga kurangnya inovasi dalam berusaha dan mengembangkan usaha; dan
- b) potensi besar Kabupaten Solok di bidang pertanian kurang di dukung oleh keinginan/minat generasi muda (masyarakat usia produktif) untuk mengoptimalkan berusaha di bidang pertanian, generasi muda lebih memilih berusaha di bidang non pertanian;

11. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis data yang valid, karena kondisi saat ini pelayanan



- masih menggunakan sistem yang manual dan belum ada regulasi yang mengatur secara terintegrasi dan komprehensif;
12. Masih terbatasnya kapasitas organisasi/kelembagaan perizinan dan penanaman modal, dimana status kelembagaan saat ini masih belum maksimal untuk menjalankan peran mengkoordinasikan pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund;
 13. belum optimalnya daya saing pariwisata daerah, dimana kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih rendah yaitu hanya sebesar 0,7%;
 14. masih terbatasnya fasilitas penunjang destinasi pariwisata daerah;
 15. masih belum berkembangnya industri pariwisata daerah; dan
 16. masih belum memadainya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata daerah.

c. Bidang Sumber Daya dan Prasarana

Dari sisi makro permasalahan yang terjadi pada bidang sumber daya dan prasarana karena masih rendahnya sarana dan prasarana infrakstruktur dasar, sehingga permasalahan dilihat secara mikro di daerah antara lain:

1. rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan SDA dengan kondisi jalan baik hanya 59% dan irigasi 72,24%;
2. belum adanya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bidang tata ruang yang komprehensif dengan masih banyak yang tidak memiliki izin, yang tidak terkontrol, diawasi maupun yang ditindak;
3. belum tersedianya kebijakan yang terintegrasi antara masing-masing SKPD karena data dasar yang berbeda-beda;
4. masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni sebesar 40,87% dan tingginya angka backlog sebesar 35%;
5. masih terdapatnya kawasan pemukiman kumuh seluas lebih kurang 474 Ha;

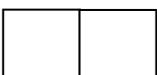


6. masih rendahnya layanan air minum yang layak, hal ini terlihat baru 64,95% rumah tangga terlayani air minum yang layak;
7. rendahnya layanan sanitasi yang layak, karena data menunjukkan baru 19,44% sanitasi yang layak;
8. penyediaan RTH bagi kawasan perkotaan masih rendah;
9. masih rendahnya pemantauan terhadap kualitas air sungai dan danau, dimana data menunjukkan hanya 18,57% sungai yang kualitas airnya yang terpantau dan danau sebesar 50%;
10. pengawasan terhadap dokumen lingkungan hanya sebesar 28,99%, hal ini menunjukkan rendahnya pengawasan yang dilakukan dokumen lingkungan;
11. rendahnya layanan transportasi publik yang baru menunjukkan angka 3,52%;
12. pengawasan yang dilakukan terhadap kendaraan yang laik jalan baru menunjukkan angka sebesar 10,14%, hal ini menunjukkan masih rendahnya pengawasan yang dilakukan;
13. rendahnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada 6 unit jaringan, 1 unit radio dan 4 *website*;
14. belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam khususnya energi terbarukan; dan
15. masih terdapatnya pertambangan ilegal.

4.2.2. **Isu-isu Strategis Daerah**

Berdasarkan analisis terhadap berbagai permasalahan pembangunan di atas, maka identifikasi isu-isu strategis menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah sebagai perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program-program pembangunan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
 1. peningkatan mutu dan manajemen pendidikan yang berdaya saing;
 2. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan
 3. Peningkatan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat;
 4. peningkatan pengarusutamaan gender dan hak-hak anak;
 5. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;



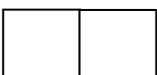
6. peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan revolusi mental; dan
7. peningkatan kualitas implementasi kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius sesuai ABS-SBK;

b. Bidang Perekonomian

1. masih rendahnya penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi seimbang, beragam, merata dan terjangkau;
2. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata berbasis sumber daya lokal dan kawasan pertumbuhan ekonomi;
3. penguatan ekonomi kerakyatan berbasis IPTEK, inovasi, daya saing dan jaringan pemasaran;
4. pemberdayaan UMKM, IKM, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan ekonomi kreatif untuk mendorong penguatan ekonomi daerah;
5. optimalisasi realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan daerah; dan
6. peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha;

c. Bidang Sumber Daya dan Prasarana.

1. peningkatan kualitas dan ketersediaan cakupan layanan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan;
2. peningkatan pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan; dan
3. peningkatan sadar bencana dalam pelaksanaan pembangunan maupun kehidupan masyarakat.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 sampai Tahun 2025, disebutkan bahwa RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga dalam pembangunan jangka panjang. RPJP Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam perspektif pembangunan 20 tahun ke-depan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari Yang Baik.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Solok. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, yaitu:



“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”

Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Solok	:	Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan.
Maju	:	Artinya masyarakat yang cerdas dan atau masyarakat yang berpendidikan.
Mandiri	:	Adalah masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan yang sehat
Kehidupan masyarakat madani	:	Adalah masyarakat yang taat akan agama dan adat, memiliki integritas, karakter dan mental sesuai dengan filosofi “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Tabel 5.1 dibawah memperlihatkan keterkaitan antara visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih.



Tabel 5-1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi	Misi
<p align="center">“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”</p>	Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat
	Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai
	Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi ‘Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”
	Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih

5.2 Pilar dan Prioritas Pembangunan

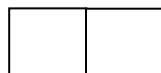
RPJMD merupakan dokumen strategis Kabupaten Solok untuk Tahun 2016-2021 yang mengimplementasikan janji-janji atau jargon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang disampaikan pada saat kampanye. Sebagaimana halnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ada beberapa substansi yang terkait erat dengan pencapaian visi dan misi yang juga dirumuskan dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berkaitan dengan janji atau jargon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi dan misi yang telah dijelaskan diatas disimpulkan dalam suatu kebijakan yang dinamakan Empat Pilar Pembangunan dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan. Berikut empat pilar pembangunan dan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini.

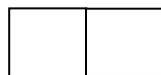


Tabel 5.2
Empat Pilar dan Prioritas Pembangunan

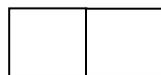
NO	PILAR PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN		JANJI-JANJI BUPATI	PROGRAM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1	2		3		4	5
1	Pendidikan	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Semua Jenjang Pendidikan	1	Membangun unit sekolah Baru pada semua jenjang pendidikan ~> SD 10 unit dan SLTP 5 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
				2	Membangun ruang kelas baru pada semua jenjang pendidikan ~> SD 10 unit dan SLTP 6 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
				3	Membangun mushola sekolah multifungsi ~> SD 10 unit dan SLTP 2 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
				4	Mobiler da fasilitas lainnya ~> SD 10 unit dan SLTP 3 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
				5	Membangun perpustakaan sekolah ~> SD 50 unit dan SLTP 20 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
				6	Tes potensi akademik bagi pelajar SMP ~> 20.000 orang siswa SLTP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
		2	Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan	1	Retrieval (menjemput anak sekolah yang drop out ~> SD 650 orang dan SLTP 100 orang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun



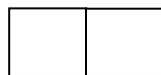
NO	PILAR PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN		JANJI-JANJI BUPATI	PROGRAM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
				2	Delay school (menjemput kembali anak sekolah yang tertunda melanjutkan pendidikan ~> SD 1.835 orang dan SLTP 415 orang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
				3	Proses sertifikasi guru sesuai kompetensi ~> 1.600 orang	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
				4	Kabupaten Solok Menulis	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
				5	Memberikan bantuan kepada tenaga pendidik untuk peningkatan kompetensi ~> 70 orang	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
				6	5 besar setiap pekan olah raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2	Kesehatan	3	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan status RSUD jadi type B	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
				2	Menjadikan Puskesmas sebagai puskesmas rawat inap ~> 11 Puskesmas	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya



NO	PILAR PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN		JANJI-JANJI BUPATI	PROGRAM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
				3	Penyediaan mobil ambulance di Puskesmas terisolir ~> 6 unit	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
				4	Pembangunan Poskesri ~>74 unit	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
				5	Program BPJS bagi keluarga tidak mampu diluar program Nasional dan Provinsi ~> 40.000 orang	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
				6	Peningkatan SDM tenaga sukarelawan kesehatan ~> 300 orang	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		4	Pembudidayaan hidup bersih dan lingkungan sehat			
3	Ekonomi Kerakyatan	5	Pengembangan pariwisata, UMKM dan investasi dan sektor ekonomi lainnya	1	Gratis IMB, HO, SITU, TDP/TDI bagi UMKM ~>5.000 UMKM	Program penciptaan Ilim Usaha Kecil, Menengah yang kondusif
				2	Pembinaan kelembagaan dan manajemen usaha ~> 5.000 orang	- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usha Mikro Kecil Menengah - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro dan Kecil
				3	Membangun tempat usaha unggulan daerah ~> 25 unit	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
				4	Peningkatan SDM petani dalam menghadapi MEA	Program peningkatan kesejahteraan petani



NO	PILAR PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN		JANJI-JANJI BUPATI	PROGRAM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
		6	Penguatan kedaulatan pangan	1	Pembinaan Kelompok Tani ~> 370 Poktan	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan / peternakan
				2	Peningkatan SDM penyuluh pertanian	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan / peternakan
				3	Pengembangan komoditi unggulan pertanian	- Program Peningkatan Produksi (Pertanian/Perkebunan) - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		7	Peningkatan Infrastruktur daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi	1	Pembangunan Taman Hutan Kota	Program Pengembangan Perumahan
				2	Danau Diatas dan Danau Dibawah	Program Pengembang Destinasi Pariwisata
				3	Danau Singkarak	Program Pengembang Destinasi Pariwisata
				4	Pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi desa, penyediaan sarana produksi dan alsintan	Program Peningkatan Produksi
		8	Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran	1	Pemberian Mikro Nagari ~> 6.896 orang	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
				2	Mendorong Pembentukan Bumrag ~> 74 Nagari	
4	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	9	Membangun karakter nasyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh pemerintah nagari yang kuat dengan meningkatkan peran tungku tigo sajarangan			
		10	Pelaksanaan reformasi birokrasi			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH



5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, tujuan pembuatan dokumen perencanaan ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam jangka 5 tahun ke depan, yang didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki peran penting dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerahpun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program dan kegiatan.

Berikut ini disajikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dapat digunakan untuk penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Solok:

Tabel 5.3
Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

VISI Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri : Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun	Mewujudkan pendidikan di setiap Jenjang Pendidikan	Pemenuhan pendidikan Pra Sekolah
			Pemenuhan pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 Tahun yang berkualitas
			Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan
			Meningkatkan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS SBK

--	--

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Meningkatkan fasilitasi pendidikan menengah
		Mewujudkan prestasi kepemudaan dan olah raga	Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat	Mewujudkan taraf kesehatan dan kualitas Hidup masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta upaya pencegahan dan promosi kesehatan
			Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat dalam lingkungan sehat
			Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
			Meningkatkan penanggulangan PMKS
		Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berbasis tata ruang
		Mewujudkan kuantitas dan kualitas Perumahan dan Permukiman yang sehat	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak
3	Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai	Memperkuat kedaulatan pangan	Terjaganya ketersediaan pangan
			Peningkatan diversifikasi pangan
			Meningkatkan keamanan pangan segar
		Mewujudkan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis kawasan dengan fokus komoditas unggulan dan andalan	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan
		Mewujudkan pembangunan kepariwisataan	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah
		Mewujudkan produktifitas koperasi dan UMKM	Meningkatkan produksi UMKM, IKM, Koperasi, Lembaga Keuangan Nagari dan Ekonomi Kreatif yang mandiri dan Profesional



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		Mewujudkan infrastruktur daerah dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi	Meningkatkan infrastruktur dasar daerah
		Mendorong investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan infrastruktur penunjang ekonomi daerah
			Meningkatkan realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan
			Meningkatkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja
4	Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) Kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.	Mewujudkan implementasi ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparat pemerintah daerah	Meningkatkan implementasi masyarakat dan aparat pemerintah yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK
		Memperkuat kelembagaan adat dan Peran Pemangku Adat	Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat
5.	Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta pro rakyat	Meningkatkan pelayanan publik yang prima di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten
			Meningkatkan pendayagunaan aparat pemerintah daerah yang profesional
			Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung oleh aparat yang profesional
			Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional
			Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Meningkatkan pembangunan e-goverment yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional
		Mewujudkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan hak-hak anak	Meningkatkan TRANTIBMAS (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) dan Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari	Meningkatkan fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari
		Mewujudkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Menjadikan Kabupaten Solok yang siaga bencana

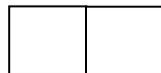
Berdasarkan keterkaitan antara visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka dapat ditetapkan indikator sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya.



Tabel 5.4
Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Misi 1 : Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						Target Kinerja pada akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan pendidikan di setiap jenjang pendidikan											
1	Pemenuhan pendidikan Pra Sekolah	APK PAUD	%	81,31	81,32	85,00	91,00	97,00	98,00	100	100
2	Pemenuhan pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 Tahun yang berkualitas	APK SD/MI	%	118,68	118,69	118,70	118,71	118,72	118,73	118,74	118,74
		APK SMP/MTSN/Paket B	%	99,56	99,65	99,74	99,82	99,91	99,97	100	100
3	Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM Pendidikan	Persentase Penerapan SPM Bidang Pendidikan	%	NA	85	90	95	100	100	100	100
		Persentase SD/SMP yang terakreditasi A	%	NA	40	45	50	55	60	65	65
4	Meningkatkan Kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS-SBK	Persentase pelaksanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan fasilitasi Pendidikan Menengah	Persentase pelaksanaan fasilitasi	%	10	10	10	10	10	10	10	10
Tujuan 2 : Mewujudkan Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga											
1	Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olah raga	Prestasi Olah Raga	Peringkat	5	5	-	5	-	5	-	5



Tabel 5.5

Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						Target Kinerja pada akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan taraf kesehatan dan kualitas Hidup Masyarakat											
1.	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta upaya pencegahan dan promosi kesehatan	Persentase Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM	%	78,08	80	85	90	95	100	100	100
		Persentase layanan rujukan sesuai dengan SPM	%	78,08	80	85	90	95	100	100	100
2.	Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat dalam lingkungan sehat	Persentase Jorong yang melaksanakan PHBS berbasis masyarakat	%	30	30	35	40	45	50	55	55
3.	Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Total Fertily Rate (TFR)	Jumlah anak	2,74	2,72	2,70	35	2,66	2,63	2,60	2,60
4.	Meningkatkan penanggulangan PMKS	Persentase PMKS yang terlayani	%	80	80,50	85	87,50	92,50	97,50	100	100
Tujuan 2 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari											
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berbasis tata ruang	Indeks Pencemaran Lingkungan	%	0,75	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40
		Kepatuhan terhadap tata ruang	%	50	60	70	80	90	100	100	100
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan	%	11,09	11,10	11,11	11,12	11,13	11,14	11,15	11,15
		Tingkat Kerusakan Hutan	%	6	6	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 3 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman yang layak											
1	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak	Persentase Rumah Layak huni	%	68,66	68,66	68,94	69,27	69,65	70,12	70,73	70,73

--	--

Tabel 5.6
Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Misi 3 : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET KINERJA PADA AKHIR RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tujuan 1 : Memperkuat Kedaulatan Pangan											
1	Terjaganya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	Kg/ka/thn	536,37	541,59	554,13	567,14	580,64	594,47	608,65	608,65
2	Peningkatan diversifikasi pangan	Skor PPH	Skor	80,01	81,5	82,00	82,50	83,00	84,00	85,00	85,00
3	Meningkatkan keamanan pangan segar	Registrasi lahan	Unit	Belum ada	2	2	2	2	3	3	14
		Sertifikasi produk	Komoditas	Belum ada	Belum ada	1	1	1	1	2	6
Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dengan Fokus Komoditas Unggulan dan andalan											
1	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan	PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan	juta rupiah	3.786.122,80	4.547.951,29	4.984.554,61	5.463.071,85	5.987.526,75	6.562.329,32	7.192.312,93	7.192.312,93
		Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks	NA	101,36	102,25	103,13	104,02	104,90	105,79	105,79



1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan .											
1	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Indeks Lama Tinggal	rasio	0,8	0,85	0,87	0,9	0,95	1	1,25	1,25
		Persentase Kenaikan kunjungan wisata	%	10	10	10	12	15	20	25	25
Tujuan 4 : Mewujudkan Produktivitas Koperasi dan UMKM											
1	Meningkatkan produksi UMKM, IKM, Koperasi, Lembaga Keuangan Nagari dan Ekonomi Kreatif yang mandiri dan profesional	Pertumbuhan sector industri	%	5,76	5,85	5,90	5,95	6,00	6,25	6,50	6,50
Tujuan 5 : Mewujudkan infrastruktur daerah dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi											
1	Meningkatkan infrastruktur dasar daerah	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	%	0,59	0,61	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,75
		Penyediaan sarana dan prasarana penunjang fasilitas transportasi	%	60	62	65	70	75	80	85	85
		Cakupan layanan LPJU	%	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8
		Jorong teraliri Listrik	%	98,30	98,30	98,55	98,79	99,03	99,51	100	100
2.	Meningkatkan infrastruktur penunjang ekonomi daerah	Infrastruktur penunjang Pertanian dan Perikanan	%	25	35	45	55	65	75	85	85
		Infrastruktur penunjang wisata	%	20	35	50	65	75	90	100	100

--	--

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tujuan 6 : Mendorong Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja											
1	Meningkatkan realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan	Jumlah nilai investasi (PMDN dan PMA)	juta rupiah	308.781,0 0	412.30 6,50	466.56 9,25	520.83 2,00	575.09 4,75	629.35 7,50	683.62 0,25	683.620,25
2	Meningkatkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing. serta memperluas kesempatan kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	94,28	94,79	94,96	95,13	95,3	95,47	95,64	95,64
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66

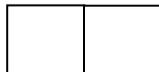
--	--

Tabel 5.7
Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Misi 4 : Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat)

Kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

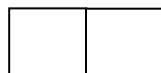
No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						Target Kinerja pada akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan implementasi ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparaturn pemerintah daerah											
1.	Meningkatkan implementasi masyarakat dan aparaturn Pemerintah yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK	Mesjid Aktif	%	10	10	20	25	15	15	15	15
		Mesjid Paripurna	%	10	10	20	25	15	15	15	15
Tujuan 2 : Memperkuat Kelembagaan adat dan peran Pemangku Adat											
1	Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat	Kelembagaan Adat dan pemangku adat yang berdaya	%	30	30	60	90	10	100	100	100



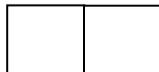
Tabel 5.8
Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Misi 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance)

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN						Target Kinerja pada akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta pro rakyat											
1	Meningkatkan pelayanan publik yang prima di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	3,10	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7
2	Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional	Komposisi Aparatur Fungsional dan Struktural diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Rasio	NA	10:90	30:70	40:60	50:50	70:30	80:20	80:20
3	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung oleh aparatur yang profesional	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional	Rata-rata Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	D	C	CC	CC	B	B	B	B
		Rata-rata Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	nilai	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Rata-rata Nilai SAKIP Pemda	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB
		% SKPD yang menyelenggarakan SPIP	%	20	20	40	60	80	100	100	100
		Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan	Peringkat Provinsi	12	5	5	5	5	5	5	5
5	Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif	Sinkronisasi perencanaan daerah dan nagari	%	60	70	75	80	90	95	100	100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Meningkatkan pembangunan e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional	Jumlah Aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis IT	aplikasi	2	1	1	2	2	2	2	10
Tujuan 2 : Mewujudkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pangarustamaan gender dan hak-hak anak											
1	Meningkatkan TRANSTIBMAS (Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat) dan Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	%	10	8	7	6	5	4	3	3
2	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	0,01212	0,012	0,01175	0,01150	0,01125	0,011	0,01095	0,01095
Tujuan 3 : Mewujudkan penyelenggaran pemerintah nagari dan kelembagaan nagari											
1	Meningkatkan fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari	Peningkatan SDM Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari	Nagari	5	5	10	20	10	10	14	74
Tujuan 4 : Mewujudkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana											
1	Menjadikan Kabupaten Solok yang siaga bencana	Jumlah nagari siaga bencana	Nagari	20	30	35	40	45	45	45	45



BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

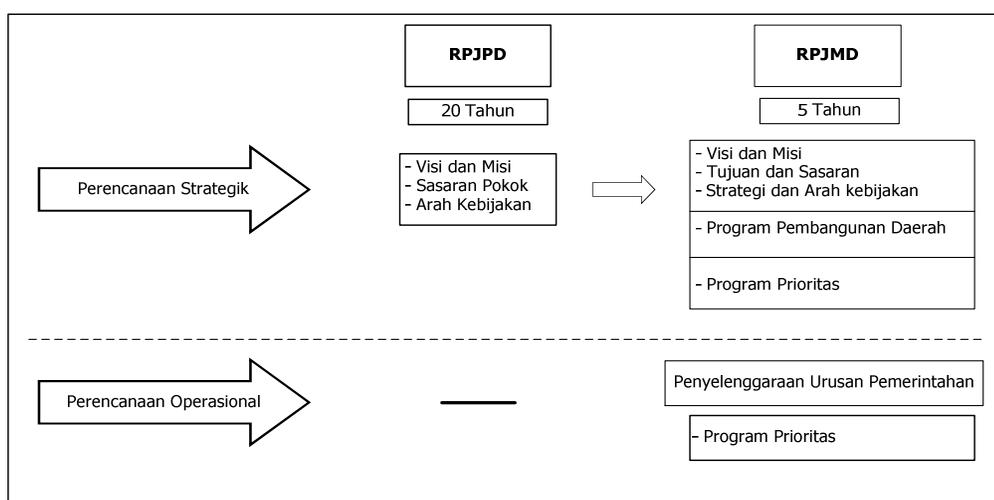
Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan strategik sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

**Gambar 6-1
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional**



Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke



waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah				
MISI 1 : Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
2	3	4	5	
Tujuan 1 : Mewujudkan pendidikan di semua jenjang pendidikan	Pemenuhan pendidikan pra sekolah	Meningkatkan pendidikan pra sekolah	Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah	
	Pemenuhan pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang berkualitas	Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan Wajib 9 tahun (sampai lulus)	Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan	
			Menggratiskan biaya pendidikan dasar.	
			Penyediaan bantuan utk anak kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan dasar.	
		Meningkatkan pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Meningkatkan pendidikan kesetaraan dan pendidikan non formal lainnya	Menyediakan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan pendidikan non formal lainnya
				<i>Retrival</i> , menjemput kembali anak sekolah yang <i>drop out</i>
		<i>Delay school</i> , menjemput kembali anak sekolah yang tertunda melanjutkan pendidikan bagi tamatan SD/MI dan SLTP		
	meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah		Meningkatkan minat baca masyarakat	



1	2	3	4
	Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan	Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan	Meningkatkan pemerataan Mutu Pendidikan dan kualitas pembelajaran.
			Meningkatkan minat tenaga pendidik dalam menulis
			Peningkatan akreditasi SD dan SLTP menjadi akreditasi A
Tujuan 2 : Mewujudkan Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatkan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS-SBK	Menyusun kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS-SBK	Penyusunan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental dan muatan lokal
	Meningkatkan fasilitasi Pendidikan Menengah	Pemenuhan fasilitasi pendidikan menengah	Penyediaan bantuan untuk anak kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan menengah.
	Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olah raga	Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga	Peningkatan Organisasi kepemudaan dan cabang olah raga



Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
MISI 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1 : Mewujudkan Taraf Kesehatan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta upaya pencegahan dan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan pelayanan puskesmas dan fasilitas ambulance 24 jam Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		Peningkatan pelayanan yang luas untuk rujukan kesehatan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin
		Peningkatan standar pelayanan rumah sakit	Meningkatkan sarana dan parasarana serta manajemen rumah sakit
	Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat dalam lingkungan sehat	Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam lingkungan sehat melalui kampanye hidup sehat	Meningkatkan Jorong siaga
			Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat
	Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB
		Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
		Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS
	Meningkatnya Penanggulangan PMKS	Meningkatkan Pemberian pelayanan social bagi PMKS	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan social, jaminan social dan perlindungan sosial
		Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanggulangan PMKS	Pendayagunaan dan Pemberberdayaan PSKS dalam penanggulangan PMKS



1	2	3	4
Tujuan 2 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang lestari	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berbasis tata ruang	Peningkatan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam	Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
		Mengurangi Kerusakan Kawasan Hutan	
		Mengurangi Lahan Kritis di dalam dan diluar kawasan hutan	
		Melindungi Kawasan Hutan dan Memberdayakan KPHL	
Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	Mewujudkan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh wilayah		
Peningkatan Ruang Terbuka Hijau			
Tujuan 3 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak	Peningkatan pencapaian universal akses 100-0-100 dan	Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh secara terpadu
			meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) kawasan perumahan dan permukiman agar terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak
			Meningkatkan dan memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi MBR
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perdesaan
			Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang layak
			Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak



Tabel 6.3

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
MISI 3 : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1 : Memperkuat Kedaulatan Pangan	Terjaganya ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Mengembangkan ketersediaan pangan pada kondisi khusus
		Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan	Mengoptimalkan pendampingan distribusi pangan
			Meningkatkan aksesibilitas pangan
	Peningkatan diversifikasi pangan	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam dan berkualitas yang berbasis pangan lokal	Memanfaatkan pekarangan dan mengembangkan penganeekaragaman olahan pangan lokal
			Mengembangkan penganeekaragaman olahan pangan lokal
	Meningkatkan keamanan pangan segar	Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar	Meningkatkan pengawasan mutu dan standarisasi produk pertanian
Meningkatkan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal hewan			
Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dengan Fokus Komoditas Unggulan dan andalan	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan	Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan dan andalan pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi (padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) di kawasan sentra produksi/ agropolitan	Mencegah alih fungsi lahan
			Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian, dan pasca panen
			Meningkatkan penyediaan bibit dan benih unggul, dan pengembangan logistik bibit dan benih
			Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman
			Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit
			Meningkatkan pemberdayaan UPT Pembibitan
			Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dan penyakit zoonosis
			Meningkatkan kapasitas penyuluh dan peningkatan SDM petani dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi
			Meningkatkan penguatan kelembagaan petani



1	2	3	4
		<p>Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum yang berkelanjutan</p>	<p>Menyediakan induk unggul dan benih ikan bermutu</p> <p>Meningkatkan pemberdayaan Balai Benih Ikan dan Unit Perbenihan Rakyat</p> <p>Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya</p> <p>Memfasilitasi peningkatan produksi unit pengolah pakan ikan mandiri, dan subsidi pakan ikan</p> <p>Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap</p>
		<p>Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan/ agro industri</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana agroindustri</p> <p>Meningkatkan mutu, standarisasi, promosi, kemitraan, dan jaringan pasar produk</p>
<p>Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Kepariwisataaan</p>	<p>Meningkatkan daya saing pariwisata daerah</p>	<p>Peningkatan Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah pada Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar</p>	<p>Meningkatkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kemitraan</p> <p>Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata</p> <p>Menyediakan lahan pengembangan pariwisata</p> <p>Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</p> <p>Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata</p>
		<p>Peningkatan pemasaran kepariwisataan daerah yang sinergis</p>	<p>Mengembangkan kerjasama pemasaran pariwisata daerah yang sinergis antar stakeholder pariwisata dan antar kawasan</p> <p>Meningkatkan promosi pariwisata</p> <p>Mengembangkan festival/ even berbasis budaya dan atraksi</p>
		<p>Peningkatan pembangunan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif daerah</p>	<p>Meningkatkan keragaman industri pariwisata dan ekonomi kreatif daerah</p> <p>Meningkatkan kemitraan dan standarisasi usaha pariwisata</p>
		<p>Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan daerah</p>	<p>Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan pariwisata yang berkarakter dan berjiwa entrepreneurship</p>



1	2	3	4
Tujuan 4 : Mewujudkan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Meningkatkan produksi UMKM, IKM, Koperasi, Lembaga Keuangan Nagari dan Ekonomi Kreatif yang mandiri dan profesional	Pemberian kemudahan formalisasi badan usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Melanjutkan pemberian izin gratis bagi usaha sektor informal yang tumbuh baik usaha mikro dan kecil
		Peningkatan produksi dan produktifitas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing, mandiri dan profesional	Meningkatkan pembinaan kelembagaan, manajemen dan diversifikasi produk
			Meningkatkan fasilitasi penguatan permodalan bagi UMKM, IKM dan ekonomi kreatif
			Membangun dan mengembangkan tempat pemasaran Produk Unggulan Daerah di pintu masuk Kabupaten
			Memperluas dan meningkatkan akses pemasaran
			Revitalisasi pasar dan tradisional yang higienis dan tepat ukur
		Peningkatan standardisasi mutu dan sertifikasi produk	Meningkatkan nilai tambah PUD, peningkatan packaging, standardisasi, dan sertifikasi produk
		Pengembangan usaha melalui koperasi	Meningkatkan Pembinaan manajemen dan usaha koperasi
Meningkatkan penumbuhan koperasi sektor riil			
Tujuan 5 : Mewujudkan infrastruktur daerah terutama dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi	Meningkatkan infrastruktur dasar daerah	Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi dalam rangka konektivitas antar wilayah (pedesaan dan perkotaan)	Meningkatkan dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi
			Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah perbatasan dan tertinggal
		Meningkatkan fasilitasi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan	meningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan
	Meningkatkan infrastruktur penunjang ekonomi daerah	Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi



1	2	3	4
Tujuan 6 : Mendorong Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan realisasi investasi pada sektor pertanian dan pariwisata, serta sektor lainnya	Mendorong masuknya investasi di sektor pertanian dan pariwisata dengan memberikan kemudahan
			Meningkatkan promosi dan pengendalian pelaksanaan investasi
	Meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai pasar tenaga kerja
		Perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai pasar tenaga kerja

Tabel 6.4

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
MISI 4 : Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.			
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1 : Mewujudkan Implementasi ABS- SBK ditengah- tengah masyarakat dan aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan implementasi masyarakat yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK	Meningkatkan fungsi dan aktivitas mesjid	Peningkatan kegiatan keagamaan
	Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat	Meningkatkan fungsi kelembagaan adat dan pemangku adat	Memperkuat kelembagaan KAN sebagai pendukung utama Nagari Adat



Tabel 6.5

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
MISI 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>)			
No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta Pro rakyat	Meningkatkan pelayanan publik yang prima di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten	Peningkatan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel	Peningkatan pelaksanaan kinerja sesuai tugas dan fungsi
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
			Peningkatan Kapasitas fungsi legislatif
			Peningkatan Pelayanan Admistrasi kependudukan dan capil
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan
			Meningkatkan penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan
	Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional	Peningkatan mutu dan Pengelolaan kepegawaian untuk pemenuhan pelayanan prima	Meningkatkan pengembangan mutu dan pengelolaan kepegawaian
			Mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian
	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung oleh aparatur yang profesional	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah berbasis akrual
			Peningkatan tertib administrasi keuangan
			Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah
		Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah	Menyusun regulasi dan penguatan implemmentasi pengelolaan pendapatan daerah
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah			
meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah			
		Meningkatkan kapasitas dan kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah	



1	2	3	4	
	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional	Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dan sarana penunjang pengawasan Penyusunan dan implementasi regulasi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif secara transparan dan akuntabel	
	Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif	Peningkatan sistem perencanaan yang terpadu (dari nagari sampai Kabupaten)	Meningkatkan penguatan implementasi regulasi sistem perencanaan dan penganggaran Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	
	Meningkatkan pembangunan e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai dan SDM yang profesional.	Menyusun Regulasi dan Penguatan Implementasi Sistem Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Komunikasi dan Informatika membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	
	Tujuan 2 : Mewujudkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pangarustamaan gender dan hak-hak anak	Meningkatkan TRANSTIBMAS (Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat) dan Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan TRANSTIBMAS dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan TRANSTIBMAS Mendorong penyusunan dan implementasi regulasi Penyelenggaraan TRANSTIBMAS (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) dan perlindungan Masyarakat
		Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pangarustamaan dan perlindungan perempuan dan anak
	Tujuan 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari	Meningkatkan fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari	Pelaksanaan fasilitasi	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan nagari
Tujuan 4 : Mewujudkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Menjadikan Kabupaten Solok yang siaga bencana	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	



BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab tujuh bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Penetapan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan dan beberapa program pembangunan yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang dikelompokkan pada 5 (lima) misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 1

MISI 1: Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	
							2016	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tujuan 1 : Mewujudkan pendidikan di semua jenjang pendidikan										
Mewujudkan Prioritas Pembangunan 1 dan 2 :		1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada semua jenjang pendidikan								
		2. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan								
1	Pemenuhan pendidikan pra sekolah	Meningkatkan pendidikan pra sekolah	Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah	Program Pendidikan anak usia dini	APK PAUD	%	81,32	100	Pendidikan	
2	Pemenuhan pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang berkualitas	Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan Wajib 9 tahun (sampai lulus)	Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan	Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun	APM SD/MI	%	94,99	100	Pendidikan	
			Menggratiskan biaya pendidikan dasar.		APM SLTP	%	74,25	100	Pendidikan	
			Penyediaan bantuan utk anak kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan dasar.							
			Meningkatkan pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)							



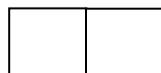
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Meningkatkan pendidikan kesetaraan dan pendidikan non formal lainnya	Menyediakan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan pendidikan non formal lainnya	Program Pendidikan Non Formal	APS SD/MI	%	0,25	0	Pendidikan		
			<i>Retrival</i> , menjemput kembali anak sekolah yang <i>drop out</i>		APS SMP	%	0,015	0	Pendidikan		
			<i>Delay school</i> , menjemput kembali anak sekolah yang tertunda melanjutkan pendidikan bagi tamatan SD/MI dan SLTP								
		meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah	Meningkatkan minat baca masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Persentase Pengunjung	%	11,64	20	Perpustakaan		
				Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan	Judul Buku	Jumlah	7.092	15.000	Perpustakaan		
3	Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan	Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan	Meningkatkan pemerataan Mutu Pendidikan dan kualitas pembelajaran.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Kualifikasi	%	91,44	100	Pendidikan		
					SD					90,85	100
					SMP						
		Meningkatkan minat tenaga pendidik dalam menulis			Persentase Minat Menulis	%	10	65	Pendidikan		
		Peningkatan akreditasi SD dan SLTP menjadi akreditasi A			Akreditasi Sekolah SD/MI SMP/MTS	Jumlah	69,86 65	85 80	Pendidikan		

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatkan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS-SBK	Menyusun kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS-SBK	Penyusunan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental dan muatan lokal	Program Wajib belajar 9 Tahun	Mata Pelajaran	Paket	1	0	
5.	Meningkatkan fasilitas Pendidikan Menengah	Pemenuhan fasilitas pendidikan menengah	Penyediaan bantuan untuk anak kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan menengah.	Program Pendidikan Menengah	% siswa miskin dan/atau berprestasi yang terbantu	%	20	80	Pendidikan
				Program Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	buah	8	6	Pendidikan

Tujuan 2 : Mewujudkan Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga

1.	Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olah raga	Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga	Peningkatan Organisasi kepemudaan dan cabang olah raga	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi kepemudaan	Jumlah	75	75	Pendidikan
					Pelatihan kepemimpinan	buha	35	35	Pendidikan
				Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prestasi Olah raga	Peringkat	5	5	Pendidikan



Tabel 7.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 2

MISI 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mewujudkan Taraf Kesehatan Dan Kualitas Hidup Masyarakat									
Mewujudkan Program Prioritas ke 3 :		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat							
P1	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta upaya pencegahan dan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan pelayanan puskesmas dan fasilitas ambulace 24 jam	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	Angka	246/10000	225/10000	Kesehatan
					Angka kematian bayi	angka	35/1000	28/1000	
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi dan tersertifikasi	Unit	4	19	Kesehatan
					RSUD tersertifikasi terakreditasi nasional	buah	1	1	
				Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah Puskesmas rawat inap	Unit	8	18	Kesehatan
Program Obat dan Pembekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	100	100	Kesehatan				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	%	13,23	13,18	Kesehatan
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun)	%	42,51	34	
				Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase pelayanan lansia	%	100	100	Kesehatan
			Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Prevalensi tuberkolosis (TBC)	%	100	100	Kesehatan
					Jumlah penderita HIV/AIDS	orang	27	17	
					Persentase jorong UCI	%	95	95	
				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase darah tinggi	%	100	100	Kesehatan
					Persentase obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas	%	5,63	5,52	
					Aturan tentang kawasan tanpa rokok	Perda	-	-	
				Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pelaksanaan promosi kesehatan	%	100	100	Kesehatan

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan pelayanan yang luas untuk rujukan kesehatan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan Kemitraan	%	100	100	Kesehatan
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	44,47	100	Kesehatan
		Peningkatan standar pelayanan rumah sakit	Meningkatkan sarana dan parasarana serta manajemen rumah sakit	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sapra RS Akreditasi	% Nilai	60 C	80 B	Kesehatan
2.	Meningkatkan Kesadaran individu, keluarga dan masyarakat dalam penyehatan lingkungan								Kesehatan
3.	Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	%	70,50	71	Pengendalian Penduduk dan KB
		Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	% PIK - KRR	%	100	100	Pengendalian Penduduk dan KB
				Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB	Pelaksanaan Konseling	%	100	100	Pengendalian Penduduk dan KB

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	Program pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB/KR mandiri	Partispasi masyarakat	%	100	100	Pengendalian Penduduk dan KB
				Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping	orang	414	414	Pengendalian Penduduk dan KB
4.	Meningkatnya Penanggulangan PMKS	Meningkatkan Pemberian pelayanan social bagi PMKS	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan social, jaminan social dan perlindungan sosial	Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan perlindungan	orang	145.023	145.023	Sosial
					Persentase jumlah lansia dan anak cacat yang diberi bantuan	Orang	132	132	Sosial
				Program Pembinaan Anak terlantar	Persentase anak, orang dan mayat terlantar yang ditangani	%	100	100	Sosial
				Program pemberdayaan fakir miskin	Jumlah penerima raskin	orang	22.828	22.828	Sosial
					Jumlah Peningkatan Bimbingan Sosial bagi penerima KUBE	Kube	50	88	Sosial
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase peningkatan masalah2 strategis	%	100	100	Sosial
				Program Keluarga Harapan	Jumlah RTSM penerima bantuan	Orang	3600	3600	Sosial
		Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanggulangan PMKS	Pendayagunaan dan Pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan SDM potensi lembaga kesejahteraan sosial	Orang	250	487	Sosial

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 2 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang lestari									
Mewujudkan Program Prioritas ke 4 :		Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Hidup							
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berbasis tata ruang	Peningkatan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam	meningkatkan Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang diawasi	%	30	42,5	Lingkungan Hidup
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	Jumlah konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	lokasi	1	2	Lingkungan Hidup
			Mengurangi Kerusakan Kawasan Hutan	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Tingkat Kerusakan Hutan	%	6,1	NA	Kehutanan
		Mengurangi Lahan Kritis di dalam dan diluar kawasan hutan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	125	NA	Kehutanan	
		Melindungi Kawasan Hutan dan Memberdayakan KPHL	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Perlindungan Hutan	%	10	NA	Kehutanan	
		Peningkatkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	Mewujudkan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang seluruh wilayah	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang berkualitas dan aplikatif	Dokumen	1	2	Pekerjaan Umum dan tata ruang dan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Program Penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau	Jumlah ruang terbuka hijau yang tersedia dan terpelihara	ha	1	61	Pekerjaan Umum dan tata ruang
				Program pengendalian pemanfaatan ruang	persentase kepatuhan terhadap tata ruang	%	40	100	Pekerjaan Umum dan tata ruang
Tujuan 3 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman yang layak									
Mewujudkan Program Prioritas ke 4 :		Pembudidayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Hidup							
1	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak	Peningkatan pencapaian universal akses 100-0-100 dan	Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh secara terpadu	Program Lingkungan Sehat Perumahan	jumlah kawasan kumuh tertangani	Kawasan	0	10	Perumahan dan Permukiman
			meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) kawasan perumahan dan permukiman agar terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak	Program Lingkungan Sehat	Jumlah Kawasan perumahan dan permukiman yang tertata	Kawasan	0	1	Perumahan dan Permukiman
					Persentase Penyediaan LPJU	%	3,80	4,47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatkan dan memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi MBR	Program Pengembangan Perumahan	jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit	131	400	Perumahan dan Pemukiman
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pedesaan	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah infrastruktur pedesaan yang terbangun	Paket	2	36	Pekerjaan Umum dan tata Ruang
			Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang layak	Program, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan RT yang memiliki akses layanan air bersih	RT	49.022	55.902	Perumahan dan Pemukiman
			Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak	Program, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan RT yang memiliki akses layanan air limbah	RT	49.022	53.035	Perumahan dan Pemukiman
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang tertangani	M3/hari	45	125	Lingkungan Hidup

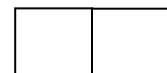
--	--

Tabel 7.3

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 3

Misi 3 : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Memperkuat Kedaulatan Pangan									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 6		Penguatan Kedaulatan Pangan							
1	Terjaganya ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Mengembangkan ketersediaan pangan pada kondisi khusus	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Penurunan jumlah Penduduk rawan pangan	(%/ tahun)	1	6	Pangan
		Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan	Mengoptimalkan pendampingan distribusi pangan	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Stabilitas harga dan pasokan pangan pokok (HPP) di tingkat produsen dan konsumen	%	80	100	Pangan
			Meningkatkan aksesibilitas pangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Fluktuasi harga di tingkat konsumen (Coefisien Variasi /CV)	%	<10	<10	Perdagangan
2	Peningkatan Diversifikasi Pangan	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam dan berkualitas yang berbasis pangan lokal	Memanfaatkan pekarangan	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Model pengembangan	Kelompok	19	24	Pangan
			Mengembangkan penganekaragaman olahan pangan local	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/ nagari	Cakupan kelompok dasawisma yang dibina	%	12,5	75	Pemberdayaan masyarakat dan desa



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatkan keamanan pangan segar	Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar	Meningkatkan pengawasan mutu dan standardisasi produk pertanian	Program peningkatan Kesejahteraan petani	Jumlah kelom tani yang menerapkan standardisasi produk	Kelompok	17	71	pertanian
			Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, dan pangan olahan	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Bahan pangan beredar yang aman dikonsumsi	%	87	100	Pangan
Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dengan Fokus Komoditas Unggulan									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 6		Penguatan Kedaulatan Pangan							
2	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan	Peningkatan produksi, dan produktifitas komoditas unggulan dan andalan pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi (padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) di kawasan sentra produksi/ agropolitan	Mencegah alih fungsi lahan	Program peningkatan produksi (pertanian/ perkebunan)	Produktifitas padi	(ton/ha)	5,72	6,07	Pangan
			Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian, dan pasca panen		Produksi Pertanian				
			Meningkatkan penyediaan bibit dan benih unggul, dan pengembangan logistik bibit dan benih		- Padi	ton	346.578,01	401.778,90	Pangan
			Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman		- Palawija	ton	1.868,50	2.899,20	Pertanian

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- Sayuran	ton	134.535,98	171.70 5,78	Pertanian
					- Bua-buahan	ton	127.611,23	147.08 3,88	Pertanian
					- Produk Perkebunan	ton	1.246,96	1.444,5 4	Pertanian
					Cakupan penggunaan benih unggul padi sawah bersertifikat	%	51,26	65,43	Pangan
					Cakupan kelompok tani penerima bantuan alat dan mesin pertanian	%	5	33	Pangan
					Cakupan kelompok tani penerima pupuk bersubsidi	kelompok	1.303	1.403	Pangan
					Penambahan cakupan areal sawah beririgasi melalui pengembangan/rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana sumber air	hektar	500	3.000	Pangan
					Pemanfaatan lahan terlantar dan kritis	hektar	15	1.515	Pertanian

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas benih dan bibit	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi ternak :	ekor	3.399.561	3.578.318	Pertanian
			Meningkatkan pemberdayaan UPT pembibitan		Cakupan kelompok tani penerima bantuan ternak/bibit	%	17	100	Pertanian
			Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pengendalian kasus penyakit ternak	%	71,50	91,60	Pertanian
			Meningkatkan kapasitas penyuluh dan peningkatan SDM petani dan pemanfaatan industry dan teknologi	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/ perkebunan/ peternakan	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Unit	116	1.632	Pangan, Pertanian
			Meningkatkan penguatan kelembagaan petani		Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Unit	4	14	Pangan, Pertanian
		Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan Umum yang berkelanjutan	Menyediakan induk unggul dan benih ikan bermutu Meningkatkan pemberdayaan Balai Benih Ikan dan Pembenihan Rakyat Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya Memfasilitasi peningkatan produksi Unit Pengolahan pakan ikan mandiri dan subsidi pakan ikan	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	Ton	1.680,91	2.506,11	Kelautan dan Perikanan

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan perairan umum	Ton	447	3.607,7	Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan/agro industri	Meningkatkan sarana dan prasarana agro industri	Program peningkatan kesejahteraan petani	Cakupan kelompok usaha agribisnis yang dikembangkan	Kelompok	139	165	Pertanian
			Meningkatkan mutu, standarisasi, promosi, kemitraan dan jaringan pasar produk		Sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil	Unit	-	1	Pertanian
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 5 dan 8		5. Pengembangan Pariwisata, UMKM dan investasi serta Sektor Ekonomi lainnya							
		8. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran							
1	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Peningkatan Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata daerah pada Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan kemitraan	Program pengembangan destinasi pariwisata	Cakupan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas kepariwisataan di kawasan wisata	%	3,4	75,6	Pariwisata
			Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata						
			Menyediakan lahan pengembangan pariwisata		Taman Hutan Kota Terpadu (THKT)	%	0	100	

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- Kawasan Danau Kembar	%	27	70	
					- Kawasan Danau Singkarak	%	17	60	
			Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat		Cakupan Kelompok masyarakat yang diberdayakan di kawasan prioritas	kelompok	2	17	
			Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata	Program pengelolaan kekayaan budaya	Cakupan BCB yang dilestarikan	unit	1	6	Kebudayaan
		Peningkatan pemasaran kepariwisataan daerah yang sinergis	Mengembangkan kerjasama pemasaran pariwisata daerah yang sinergis antar stakeholder pariwisata dan antar kawasan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah pelaksanaan misi penjualan (Sales Mission)	Kegiatan	2	12	Pariwisata
			Meningkatkan promosi pariwisata		Jumlah penyelenggaraan even seni, budaya dan pariwisata daerah	Kegiatan	3	18	Pariwisata
			Mengembangkan festival/even berbasis budaya dan atraksi		Jumlah pendukung even peningkatan Konvensi, Insentive, Even dan Minat Khusus	Kegiatan	5	30	Pariwisata
		Peningkatan pembangunan dan pengembangan industry pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Meningkatkan keragaman industri pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Program pengembangan kemitraan	Jumlah perkembangan jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan				Pariwisata

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- Penginapan Tipe Melati	unit	5	8	
					- Hotel Tipe Melati	unit	1	2	
					- Hotel Berbintang	unit	-	2	
					Jumlah perkembangan jenis, kelas dan jumlah restoran				
					- Tipe A	unit	1	2	
					- Tipe B	unit	3	5	
					- Tipe C	unit	85	95	
					Pertumbuhan usaha pariwisata	%	2	12	
		Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan daerah	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan pariwisata yang berkarakter dan berjiwa entrepreneurship	Program pengembangan kemitraan	Jumlah pengembangan hubungan lembaga pariwisata	Naskah	0	5	Pariwisata
					Cakupan peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata	kelompok	2	17	Pariwisata

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 4 : Mewujudkan Produktivitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 5 dan 8		5. Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sector ekonomi lainnya							
		8. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran							
1	Meningkatkan Produksi UMKM, IKM, Koperasi dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, mandiri dan profesional	Pemberian kemudahan formalisasi badan usaha (Usaha mikro, Kecil, dan Menengah)	Melanjutkan pemberian izin gratis bagi usaha sektor informal yang tumbuh bagi Usaha Mikro dan Kecil	Program penciptaan iklim usaha kecil, menengah yang kondusif	Persentase peningkatan formalisasi Usaha Mikro dan Kecil	%	8	48	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan industri
		Peningkatan produksi dan produktifitas koperasi, usaha mikro, kecil, dan Menengah yang mandiri dan profesional	Meningkatkan pembinaan kelembagaan, manajemen, dan diversifikasi produk	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	10	60	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Cakupan bina kelompok industri makanan dan minuman	%	3	18	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatkan Fasilitas penguatan permodalan bagi UMKM, IKM dan ekonomi kreatif		Cakupan fasilitas permodalan untuk usaha UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	%	1,38	21,38	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Membangun dan mengembangkan tempat pemasaran Produk Unggulan Daerah di pintu masuk Kabupaten		Persentase peningkatan pengembangan infrastruktur pemasaran produk UMKM	%	25	100	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Memperluas dan Meningkatkan akses pemasaran	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah MoU dan atau ikatan dagang yang ditandatangani	dokumen MoU/ikatan dagang	2	12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Revitalisasi pasar tradisional yang higienis dan tepat ukur	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional yang higienis dan tepat ukur	unit	5	20	Perdagangan
					Pembangunan dan operasionalisasi UPT kemetrolgian	%	0	100	Industri
		Peningkatan standardisasi mutu dan sertifikasi produk	Menciptakan nilai tambah PUD, peningkatan packaging, standardisasi, dan sertifikasi produk	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Cakupan penerima pengembangan sarana pengolahan dan pengemasan Usaha kecil dan menengah	%	16	100	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan usaha melalui koperasi	Meningkatkan Pembinaan manajemen dan usaha koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	56,85	80	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatkan penumbuhan koperasi sector riil	Program Penumbuhan koperasi sector riil	Pertumbuhan koperasi sector riil	unit	3	10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga

Tujuan 5 : Mewujudkan infrastruktur daerah dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi

Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 7		Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi							
1	Meningkatkan infrastruktur dasar daerah	Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi dalam rangka konektivitas antar wilayah (pedesaan dan perkotaan)	Meningkatkan dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Panjang Jalan Mantap	Km	28	20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jembatan mantap				Km	6	5		

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pemeliharaan / rehabilitasi jalan dan jembatan	Panjang jalan terpelihara	km	362	362	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					jembatan terpelihara	Unit	4	10	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Peralatan berat	Paket	1	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Peralatan labor	paket	1	1	
				Program pembangunan Sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase penyediaan dan fasilitas sarana dan prasarana transportasi	%	60	75	Perhubungan
				Program peningkatan pelayanan angkutan	% pelayanan angkutan	%	50	80	Perhubungan
			Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar daerah perbatasan dan tertinggal	Program Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah perbatasan dan tertinggal	daerah perbatasan dan Daerah Tertinggal	Nagari	0	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan fasilitasi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan	meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan	Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah Jorong yang teraliri listrik	Jorong	407	414	Energi dan sumber daya mineral

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatkan penunjang ekonomi daerah	Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi	Program Pembangunan infrastruktur penunjang sektor Pertanian	jalan usaha tani	km	3	25	Pangan
					Jalan usaha produksi	km	3	20	Pertanian
				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas areaal irigasi yang berkondisi baik	ha	17.875	29.375	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pangan
				Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah rehabilitasi sungai	unit	2	2	Pekerjaan umum dan penataan ruang
					Jumlah rehabilitasi embung dan bangunan penampung lainnya	unit	2	2	
				Program pembangunan infrastruktur penunjang wisata	Infrastruktur wisata	Paket	1	10	Pariwisata
				Program Memfasilitasi pengelolaan sumber energi pemanfaatan langsung	Jumlah Nagari terfasilitasi pengelolaan sumber energi pemanfaatan langsung	Nagari	0	5	Energi dan sumber daya mineral

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah kegiatan pertambangan yang terawasi	IUP	63		ESDM
				Program Penertiban dan Pengawasan SPBU, BBM dan GAS	Jumlah Pengawasan SPBU, Depot Lokal dan Kios Pengencer	Unit	80 Pangkalan minyak dan gas 4 SPBU 1 SPBE		ESDM
Tujuan 6 : Mendorong Peningkatan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 5 dan 8		5. Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sector ekonomi lainnya							
		8. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran							
1	Meningkatkan realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan realisasi investasi pada sektor pertanian dan pariwisata, serta sektor lainnya	Mendorong masuknya investasi di sektor pertanian dan pariwisata dengan memberikan kemudahan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai investasi pariwisata	Juta rupiah	5	150	Penanaman Modal
					Jumlah Nilai investasi pertanian	Juta rupiah	5	110	
					Jumlah investor	investor	2	15	
	Meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kesiapan sarana dan prasarana BLK menuju akreditasi	%	0	100	Tenaga Kerja
					Jumlah lulusan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0	150	
					Jumlah lulusan pemagangan	Orang	0	25	

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Orang	0	50	
		Perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai pasar tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pelaksanaan bursa kerja	kali	0	0	Tenaga Kerja
					Pencari kerja yang di tempatkan	%	0	10	
					calon wirausaha yang mengikuti inkubasi bisnis	Usaha	1	3	
					Jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	Perusahaan	0	10	

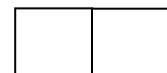
--	--

Tabel 7.4

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 4

Misi 4 : Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mengimplementasikan ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparatur pemerintah daerah									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 9		Membangun Karakter Masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh pemerintah nagari yang kuat dengan meningkatkan peran tungku tigo sajarangan							
1	Meningkatkan implementasi masyarakat yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK	Meningkatkan fungsi dan aktivitas mesjid	Peningkatan kegiatan keagamaan	Program Pengembangan nilai-nilai agama dan kebudayaan	% Mesjid Aktif	%	10	100	Pemerintahan Umum dan pelayanan publik
					% Mesjid Paripurna	%	30	100	Pemerintahan Umum dan pelayanan publik
2	Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat	Meningkatkan fungsi kelembagaan adat dan pemangku adat	Memperkuat kelembagaan KAN sebagai pendukung utama Nagari Adat	Program Pengembangan Nilai budaya	Penguatan Pelayanan	%	30	100	Pemerintahan Umum dan pelayanan publik



Tabel 7.5
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 5

Misi 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*)

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta Pro rakyat									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 10		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
1.	Meningkatkan pelayanan publik yang prima di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten	Peningkatan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel	Peningkatan pelaksanaan kinerja sesuai tugas dan fungsi	Program Pelayanan dan Peningkatan Tugas dan fungsi	Persentase Pelayanan	%	100	100	Non Urusan
				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum	% Pelayanan Pemerintahan Umum	%			Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	% Fasilitasi Kedinasan	%			Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Kapasitas fungsi legislatif	% Peningkatan Kapasitas trifungsi DPRD	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan dan capil	% Penataan Adm Capil	%	83	100	Adm Kependudukan dan capil



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan	Program Penyelamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah	% Arsip yang diselamatkan	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
		Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Meningkatkan penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Program Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan	Jumlah SKPD yang ditingkatkan supra	unit	2	12	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
2.	Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional	Peningkatan mutu dan Pengelolaan kepegawaian untuk pemenuhan pelayanan prima	Meningkatkan pengembangan mutu dan pengelolaan kepegawaian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya	%	30	80	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% Penggunaan IT	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
3.	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung oleh aparatur yang profesional	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah berbasis akrual	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Pengelolaan Keuangan yang baik	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Peningkatan tertib administrasi keuangan						Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah						Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
		Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah	Menyusun regulasi dan penguatan implemmentasi pengelolaan pendapatan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah						Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah						Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
4	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional	Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dan sarana penunjang pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang mengikuti Diklat	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Penyusunan dan implementasi regulasi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif secara transparan dan akuntabel	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Audit	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Pelaksanaan pengawasan	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% Penataan Peraturan Per UU	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	% Kerjasama Pemerintah daerah	%	80	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif	Peningkatan sistem perencanaan yang terpadu (dari nagari sampai Kabupaten)	Meningkatkan penguatan implementasi regulasi sistem perencanaan dan penganggaran	Program Perencanaan Pembangunan daerah	% perencanaan yang baik	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan Pembangunan social dan budaya	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan Pembangunan infrastruktur	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan	% yang mengikuti diklat perencanaan	%	30	80	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
6	Meningkatkan pembangunan e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai dan SDM yang profesional.	Menyusun Regulasi dan Penguatan Implementasi Sistem Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	% pengembangan komunikasi	%	20	75	Komunikasi dan informatika
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	% optimalisasi teknologi	%	30	70	Komunikasi dan informatika
			Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Komunikasi dan Informatika	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi	% Peningkatan SDM	%	20	60	Komunikasi dan informatika

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	% Pengembangan komunikasi	%	20	80	Komunikasi dan informatika
Tujuan 2 : Mewujudkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pangarustamaan gender dan hak-hak anak									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 10		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
1.	Meningkatkan TRANSTIBMAS (Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat) dan Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan TRANTIBMAS dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan TRANTIBMAS	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	% Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	%	100	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
					Jumlah perda yang ditegakan	jumlah	5	10	
				Program Pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal	% Pemeliharaan kantrabtibmas	%	100	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Program Pengembangan wawasan kebangsaan	% Pengembangan wawasan kebangsaan	%	60	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah partai politik yang dibina	Jumlah	1	1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mendorong penyusunan dan implementasi regulasi Penyelenggaraan TRANTIBMAS (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) dan perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pengarusutamaan dan perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan serta anak	Penyelesaian kasus KDRT	Kasus	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% Peraturan yang ditegakan	%	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	% Partispasi Perempuan dalam pembangunan	%	30	50	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 10		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
1.	Meningkatkan fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari	Pelaksanaan fasilitasi	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan nagari	Program Peningkatan SDM dan kelembagaan nagari	% aparat nagari yang mengikuti diklat	%	50	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					% Organisasi pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan	%	40	100	
					% pengembangan lembaga ekonomi nagari	%	35	100	
				Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari	% Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	30	75	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tujuan 4 : Mewujudkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 10		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
1.	Menjadikan Kabupaten Solok yang siaga bencana	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Meningkatan upaya pengurangan resiko bencana	Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Peningkatan ketahanan daerah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Level	2	3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

--	--

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

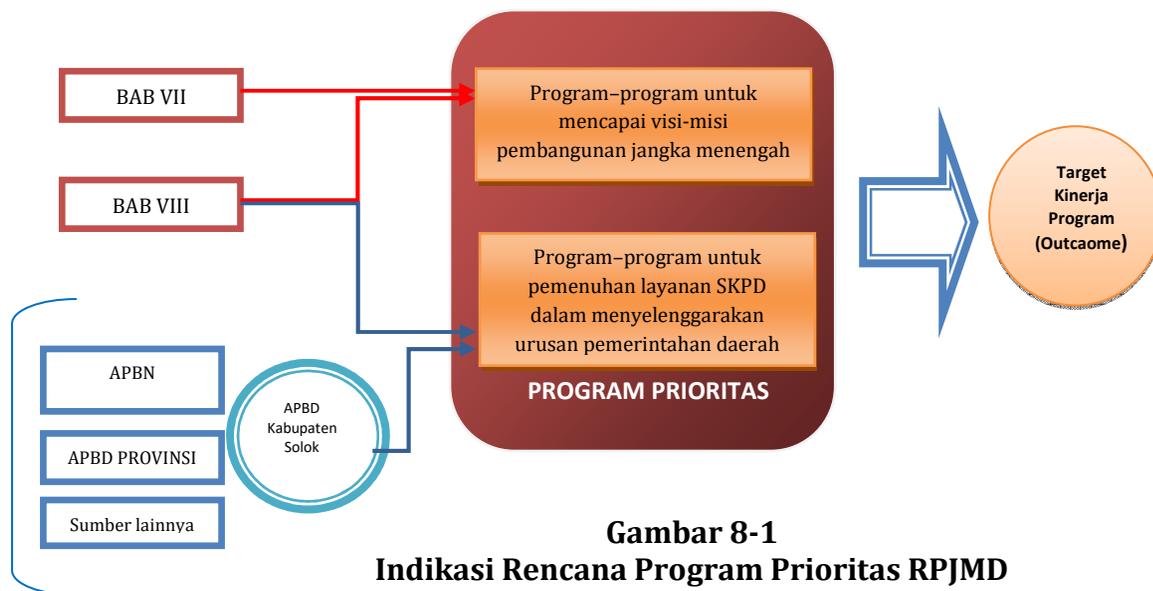


Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Solok berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi.





Gambar 8-1
Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD

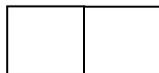
Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan Penetapan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan dan beberapa program pembangunan yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan merupakan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD dan penanganan urusan pembangunan yang dikelompokkan pada 5 (lima) misi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

--	--

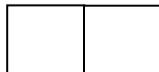
Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan

MISI 1: Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												URUSAN
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan Prioritas Pembangunan yang ke 1 dan 2			1. Peningkatan Partispasi Masyarakat pada semua jenjang pendidikan												
			2. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan												
1	Program Pendidikan anak usia dini	APK PAUD	81,32	8.500	85,00	8.800	91,00	9.000	97,00	10.000	98,00	11.000	100	12.000	Pendidikan
2	Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun	APM SD/MI	95,35	17.320	96,50	23.620	97,75	28.482	98	28.900	99,25	28.300	100	24.500	Pendidikan
		APM SLTP	74,25	2.566	78,50	3.100	80,00	3.400	86,00	3.800	95,00	4.200	100	4.650	Pendidikan
		Kurikulum Pendidikan Karakter	-		1 MP		-		-		-		-		
3	Program Pendidikan Non Formal	APS SD/MI	0,20	330	0,15	300	0,10	275	0,8	225	0,5	200	0	-	Pendidikan
		APS SMP	0,13		0,11		0,9		0,7		0,5		0		



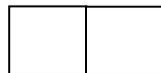
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Jumlah Pengunjung	6.500	350	6.700	410	6.700	410	7.000	475	7000	475	7000	475	Pendidikan dan Perpustakaan
5	Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan	Jumlah koleksi judul Buku	7100	528	7.150	550	7.200	575	7.300	600	7.400	625	7.500	650	Perpustakaan
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan	Kualifikasi Guru SD SMP	91,44 90,85	3.500	92,25 91,85	3750	94,50 95,10	4100	96,25 97,35	4.650	98,5 98,9	5.000	100 100	5.250	Pendidikan
		% Minat Menulis	10		25		35		45		55		65		Pendidikan
		Akreditasi Sekolah SD/MI SMP/MTS	69,86 65		72,91 68		75,93 71		78,95 74		81,98 77		85 80		Pendidikan
7	Program Pendidikan Menengah	% siswa miskin dan/atau berprestasi yang terbantu	20	1.000	40	1.250	50	1.500	60	1.600	70	1.700	80	1.800	Pendidikan
8	Program Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	-	-	8	800	8	825	8	835	8	845	6	600	Pendidikan
9	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi kepemudaan	75	476	75	485	75	490	75	495	75	500	75	-	Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Pelatihan kepemimpinan	35		35		35		35		35		35		
10	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prestasi Olah raga	5	171	-	-	5	200	-	-	5	250	-	0	Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



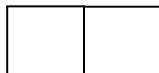
Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan

Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat

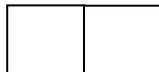
No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												URUSAN
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan Program Prioritas ke 3 :			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat												
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	246	6.365	237	7.980	234	10.012	232	12.561	230	15.760	225	19.772	Kesehatan
		Angka kematian bayi	35		34		33		32		30		28		
2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi dan tersertifikasi	4	440	5	550	5	550	5	550	9	990	5	550	Kesehatan
		RSUD tersertifikasi terakreditasi nasional	1		1		1		1		1		1		
3	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah Puskesmas rawat inap	8	18.635	4	23.000	4	25.00	3	28.000	-	-	-	-	Kesehatan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Program Obat dan Pembekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	8.100	100	8.200	100	8.300	100	8.400	100	8.400	100	8.400	Kesehatan
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	13,23	93	13,22	100	13,21	120	13,20	140	13,19	160	13,18	180	Kesehatan
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun)	42,51		40,02		38,06		36		35		34		
6	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase pelayanan lansia	100	35	100	40	100	50	100	50	100	50	100	50	Kesehatan
7	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Prevalensi tuberkulosis (TBC)	100	643	100	650	100	650	100	650	100	650	100	650	Kesehatan
		Jumlah penderita HIV/AIDS	27	35	26	75	24	100	22	125	19	150	17	175	
		Persentase jorong UCI	95	27,7	95	120	95	150	95	180	95	210	95	250	Kesehatan
8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase darah tinggi	100	301	100	305	100	305	100	305	100	305	100	305	Kesehatan
		Persentase obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas	5,63	50	5,60	75	5,58	100	5,56	125	5,54	150	5,52	175	
		Aturan tentang kawasan tanpa rokok	-	-	1	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	%Pelaksanaan promosi kesehatan	100	344	100	500	100	500	100	400	100	300	100	250	Kesehatan
10	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapat asuransi kesehatan	100	5.620	100	6.620	100	6.720	100	7.000	100	7.100	100	7.300	Kesehatan



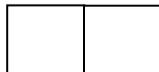
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	44,47	7.000	60	7.500	70	8.000	80	8.500	90	9.000	100	9.000	Kesehatan
12	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sapra RS Akreditas (tujuh spesialis)	60 Type C	9.000	70 Type C	12.000	80 Type B	15.000	Kesehatan						
13	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	70,50	623	70,60	630	70,70	640	70,80	1.400	70,90	650	71,00	650	Keluarga Berencana
14	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	% PIK - KRR	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	Keluarga Berencana
15	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB	% Pelaksanaan Konseling	100	635	100	640	100	640	100	640	100	640	100	640	Keluarga Berencana
16	Program pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB/KR mandiri	% Partisipasi masyarakat	100	70	100	80	100	90	100	90	100	90	100	90	Keluarga Berencana
17	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping	414	540	414	540	414	540	414	540	414	540	414	540	Keluarga Berencana
18	Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan perlindungan	145.023	50	145.023	50	145.023	50	145.023	50	145.023	50	145.023	50	Sosial
		Persentase jumlah lansia dan anak cacat yang diberi bantuan	100		100		100		100		100		100		100
19	Program Pembinaan Anak terlantar	Persentase anak, orang dan mayat terlantar yang ditangani	100		100		100		100		100		100		Sosial
20	Program pemberdayaan fakir miskin	Jumlah penerima raskin	22.828	537,896	22.828	537,896	22.828	537,896	22.828	537,896	22.828	537,896	22.828	537,896	Sosial
		Jumlah Peningkatan Bimbingan Sosial bagi penerima KUBE	50		50		50		50		50		50		80



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase peningkatan masalah2 strategis	100	897,9	100	900	100	915	100	925	100	935	100	950	Sosial
22	Program Keluarga Harapan	Jumlah RTSM penerima bantuan	3600	80,4	3600	80,4	3600	80,4	3600	80,4	3600	80,4	3600	80,4	Sosial
23	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan SDM potensi lembaga kesejahteraan sosial	489	313,8	489	313,8	489	313,8	489	313,8	489	313,8	487	313,8	Sosial
Mewujudkan Program Prioritas ke 4 :			Pembudidayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Hidup												
24	Program Pengembangan Perumahan	jumlah kawasan kumuh tertangani	0	0	2	500	2	750	2	1000	2	1000	2	1000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25	Program Pengembangan Perumahan	jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	131	1310	400	4000	400	4000	400	4000	400	400	400	4000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26	Program perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang berkualitas dan aplikatif	1	200	2	750	2	500	2	500	2	500	2	500	Pekerjaan Umum dan tata Ruang
27	Pengendalian Pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan terhadap tata ruang	40 %	176	50 %	250	60 %	275	70 %	300	80 %	300	90	300	Pekerjaan Umum dan tata Ruang
28	Program Pemanfaatan Ruang	Penyediaan LPJU	1 Tahun	7.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pekerjaan Umum dan tata Ruang
29	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah ruang terbuka hijau yang tersedia dan terpelihara	1 Ha	200	12	600	12	600	12	600	12	600	12	600	Pekerjaan Umum dan tata Ruang
30	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih	49.022	7.539	50.455	8300	51.889	9.130	53.322	10.043	54.755	11.000	55.902	12.100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan rumah tangga yang memiliki akses layanan air limbah	33.058	4.933	34.513	5.400	35.967	5.900	37.422	6.500	38.877	7.100	40.332	7.800	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang tertangani	45 M3/hari	2.503	65 M3/hari	3.000	80 M3/hari	4.500	100 M3/hari	5.000	115 M3/hari	5.200	125 M3/hari	5.400	Lingkungan Hidup

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang diawasi	30 %	231	32,5	300	35	330	37,5	360	40	400	42,5	430	Lingkungan Hidup
33	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan Hidup	2 Dokumen	31	2 Dokumen	100	2 Dokumen	120	2 Dokumen	140	2 Dokumen	160	2 Dokumen	180	Lingkungan Hidup
34	Perlindungan dan konervasi SDA	Jumlah konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	1 lokasi	264	2 lokasi	500	Lingkungan Hidup								
35	perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang berkualitas dan aplikatif	1 dokumen	400	2 dokumen	800	2 dokumen	500	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
36	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah ruang terbuka hijau yang tersedia dan terpelihara	-	-	10 ha	1000	10 ha	1000	20	1000	21 ha	1000	22 ha	1000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pariwisata
37	pengendalian pemanfaatan ruang	persentase kepatuhan terhadap tata ruang	40 %	180	50 %	250	60 %	300	70 %	350	85 %	400	100 %	450	PU dan PR
38	Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	-	-	2 Kwsn	800	2 Kwsn	1000	2 Kwsn	1200	2 Kwsn	1400	2 Kwsn	1600	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Kawasan perumahan dan permukiman yang tertata	-	-	1 Kwsn	400	1 Kwsn	400	1 Kwsn	500	1 Kwsn	500	1 Kwsn	600	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penyedat LPJU	3,80 %	6.000	3,94 %	8.000	4,07 %	8.500	4,20 %	9.000	4,34 %	9.500	4,47 %	10.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39	Pengembangan Perumahan	Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-	-	350 Unit	3.500	450 unit	4.500	500 unit	5.000	500 unit	5.000	500 unit	5.000	Perumahan dan Permukiman
		Jumlah Dokumen Verifikasi Data Perumahan	1 Dok	332	1 Dok	400	1 Dok	450	1 Dok	500	1 Dok	550	1 Dok	600	Perumahan dan Permukiman
		Jumlah sarana prasarana perkantoran yang dibangun/dipelihara	41 Paket	12.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



40	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah Infrastruktur Perdesaan yang terbangun	4 Paket	18.532	4 Paket	20.000	4 Paket	22.000	4 Paket	23.000	4 Paket	24.000	4 Paket	25.000	Perumahan dan Permukiman
----	-------------------------------------	---	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------------------------

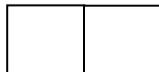
Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan

Misi 3 : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai

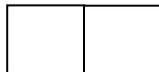
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												URUSAN
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 6			Penguatan Kedaulatan Pangan												
1	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Penurunan jumlah Penduduk rawan pangan	1	658	1	1.201	1	1.208	1	1.214	1	1.220	1	1.331	Pangan
2	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Stabilitas harga dan pasokan pangan pokok (HPP) di tingkat produsen dan konsumen	80	150	90	210	90	215	95	215	95	220	100	236	Pangan
3	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Fluktuasi harga di tingkat konsumen (Coefisien Variasi /CV)	<10	100	<10	100	<10	100	<10	100	<10	100	<10	100	Perdagangan
4	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Model pengembangan	19	432	20	618	21	641	22	663	23	686	24	709	Pangan
5	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/ nagari	Cakupan kelompok dasawisma yang dibina	12.5	11.2	12.5	11.2	12.5	11.2	12.5	11.2	12.5	11.2	12.5	11.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa
6	Program peningkatan Kesejahteraan petani	Jumlah kelompok tani yang menerapkan standardisasi produk	17	370	20	554	13	390	7	408	7	423	7	447	pertanian
7	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Bahan pangan beredar yang aman dikonsumsi	87	72	87	100	93	120	93	120	100	140	100	170	Pangan

--	--

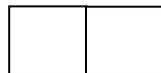
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	Program peningkatan produksi (pertanian/perkebunan)	Produktifitas padi	5.72		5.77		5.83		5.89		6.01		6.07		Pangan	
		Produksi Pertanian														
		- Padi	346,57 8.01	1.199,8 8	356,97 5.35	1.495,71	367.684 ,61	1.688,67	378,715 .14	1.744,59	390,07 6.60	1.714,05	401.77 8,90	1.835,35		Pangan
		- Palawija	1.868, 50	46,70	2.575,9 0	60,71	2.653.5 0	78,92	2.732,8 0	102,60	2.814, 80	133,38	2.899, 20	173,39		
		- Sayuran	134.53 5,98	1.514,2 9	141.26 2,77	2.398,81	148,325 ,91	2.489,07	155.742 ,20	2.606.47	163.52 9,32	2.762,76	171.70 5,78	1.225,59		
		- Buah	127.61 1,23	309,39	131.24 1,0	454,70	134.997 ,16	580,61	138.885 ,01	743,24	142.91 0,01	953,51	147.08 3,88	1.225,59		
		- Produk Perkebunan	1.246, 96	932	1.280,9 1	1.097,75	1.315,7 9	1.162,64	1.351,6 5	1.229,77	1.388, 51	1.299,26	1.444, 54	1.371,22		
		Cakupan penggunaan benih unggul padi sawah bersertifikat	51.26	581,63	53.83	668,87	56.52	769,21	59.34	884,59	62.31	1.017,27	65.43	1.169,87		Pangan
		Cakupan kelompok tani penerima bantuan alat dan mesin pertanian	5	1,309,9 4	5	1,375,44	5	1,444,21	6	1,588,63	6	1,747,49	6	1,922,24		Pangan
		Cakupan kelompok tani penerima pupuk bersubsidi	1303	53,00	1323	68,90	1343	89,57	1363	116,44	1383	151,37	1403	196,79		Pangan
Penambahan cakupan areal sawah beririgasi melalui pengembangan/rehabilitasi /pembangunan sarana dan prasarana sumber air	500	632,50	500	660,00	500	687.50	500	715,00	500	742,50	500	770,00		Pangan		
Pemanfaatan lahan terlantar dan kritis	15	200	300	410	300	451	300	496	300	546	300	600		Pertanian		
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi ternak:	3.399. 561	14,651	3.434.4 25	10.294	3.469.7 05	11.838	3.505.4 11	13.614	3.541. 553	15.656	3.578. 318	18.005	Pertanian	
		Cakupan kelompok tani penerima bantuan Ternak/ Bibit	17	1,250	17	1,250	17	1,250	17	1,250	17	1,250	15	1,000		Pertanian



10	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pengendalian kasus penyakit ternak	71,50	1.000	75,50	1.020	79,50	1.040	83,50	1.061	87,50	1.082	91,50	1.104	Pertanian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/ perkebunan/peternakan	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	116	887	288	1.170	288	1.126	288	1.165	288	1.213	364	1.455	Pangan, Pertanian
		Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang meningkat kapasitasnya	4	539	2	876	2	1.164	2	1.451	2	1.807	2	2.254	Pangan, Pertanian
12	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	1680,9 1	3.800	1845,9 4	4.370	2.010,9 8	5.025,5	2176,03	5.779,33	2341,0 7	6.646,22	2506,1 1	7.643.16	Kelautan dan Perikanan
13	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan perairan umum	447	750	479	750	503	862,5	548	991	597	1.140	627	1.311	Kelautan dan Perikanan
14	Program peningkatan kesejahteraan petani	Cakupan kelompok usaha agribisnis yang dikembangkan	139	1.507,2	158	2.464,75	164	2.594,3	155	1.158,45	160	1.330,2	165	1.528.67	Pertanian
		Sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil	0	0	0	0	1	2.500	0	0	0	0	0	0	Pertanian
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 5 dan 8			5. Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sektor ekonomi lainnya												
			8. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran												
15	Program pengembangan destinasi pariwisata	Cakupan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas kepariwisataan di kawasan wisata	3,4	2875	20,8	15875	24,2	18875	20,5	15875	4,6	1875	2,5	1875	Pariwisata
		- Taman Hutan Kota Terpadu (THKT)	0	0	30	9000	40	12000	30	9000	0	0	0	0	
		- Kawasan Danau Kembar	12,5	1,875	12,5	1,875	12,5	1,875	12,5	1,875	12,6	1,875	7,5	1,875	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- Kawasan Danau Singkarak	1	1,000	20	5,000	20	5,000	19	5,000	0	0	0	0	
		Cakupan Kelompok masyarakat yang diberdayakan di kawasan prioritas	2	200	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	
16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Cakupan BCB yang dilestarikan	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Kebudayaan
17	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah pelaksanaan misi penjualan (Sales Mission)	2	200	2	200	2	200	2	200	2	200	2	200	Pariwisata
		Jumlah penyelenggaraan even seni, budaya dan pariwisata daerah	3	375	3	375	3	375	3	375	3	375	3	375	Pariwisata
		Jumlah pendukung even peningkatan Konvensi, Incentive, Even dan Minat Khusus	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	Pariwisata
18	Program pengembangan kemitraan	Pertumbuhan usaha pariwisata	95	17000	101	24700	104	28400	108	30600	111	32800	114	34500	
19	Program pengembangan kemitraan	Jumlah pengembangan hubungan lembaga pariwisata	0	0	1	300	1	325	1	350	1	400	1	425	Pariwisata
		Cakupan peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata	2	250	3	300	3	350	3	400	3	450	3	500	Pariwisata
20	Program penciptaan iklim usaha kecil, menengah yang kondusif	Persentase peningkatan formalisasi Usaha Mikro dan Kecil	8	346	8	640	8	653	8	666	8	678	8	691	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan industri
21	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil	Cakupan bina kelompok pengrajin	10	250	10	255	10	260	10	265	10	270	10	275	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Cakupan bina kelompok industri makanan dan minuman	3	300	3	306	3	312	3	318	3	324	3	330	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



		Cakupan fasilitasi permodalan untuk usaha UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	1,38	147	4	239	4	244	4	249	4	254	4	259	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase peningkatan pengembangan infrastruktur pemasaran produk UMKM	25	1.700	50	3.000	75	3.000	100	3.000	0	0	0	0	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah MoU dan atau ikatan dagang yang ditandatangani	2	734	2	800	2	816	2	834	2	849	2	866	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional yang higienis dan tepat ukur	5	2.500	3	2.500	3	2.500	3	2.500	3	2.500	3	2.500	Perdagangan
		Pembangunan dan operasionalisasi UPT kemetrolagian	0	0	5	50	50	2.500	80	1.500	90	250	100	275	Industri
24	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Mikro dan kecil	Cakupan penerima pengembangan sarana pengolahan dan pengemasan Usaha mikro dan kecil UMKM	16	500	35	550	55	600	75	650	85	700	100	750	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	56.85	318	62	350	66	375	70	400	74	425	80	450	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26	Program Penumbuhan koperasi sector riil	Pertumbuhan koperasi sector riil	3	318	3	324	3	331	2	337	3	344	3	351	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi pariwisata	2	10,000	3	45,000	3	57,000	4	55,000	3	55,000	3	50,000	Penanaman Modal
		Jumlah nilai investasi pertanian	1	5,000	2	20,000	1	20,000	1	25,000	1	25,000	1	20,000	
		Jumlah nilai investasi sektor lainnya	0	0	0	0	1	7,000	0	0	0	0	0	0	
28	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kesiapan sarana dan prasarana BLK menuju akreditasi	0	0	20	1,000	40	1,500	60	2,000	80	2,500	100	3,000	Tenaga Kerja
		Jumlah lulusan pelatihan berbasis kompetensi	0	0	30	75	30	75	30	75	30	75	30	75	Tenaga Kerja
		Jumlah lulusan pemagangan	0	0	5	75	5	75	5	75	5	75	5	75	Tenaga Kerja

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0	0	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	Tenaga Kerja
29	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pelaksanaan bursa kerja	0	0	1	250	1	250	0	0	1	250	1	250	Tenaga Kerja
		Pencari kerja yang di tempatkan	0	0	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	Tenaga Kerja
		calon wirausaha yang mengikuti inkubasi bisnis	1	100	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	Tenaga Kerja
		Jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	0	0	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	Tenaga Kerja
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 7			Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi												
30	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang Jalan Mantap	28 Km	40.252	20 Km	45.000	20 Km	50.000	20 km	55.000	20 km	60.000	20 Km	65.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jembatan Mantap	6		5		5		5		5		5		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang terpelihara	362 km	37.940	362 Km	39.000	362 Km	41.000	362 Km	43.000	362 km	45.000	362 km	47.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jembatan yang terpelihara	4 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit
32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Peralatan berat	1 Paket	886	1 Paket	1.000	1 Paket	1.100	1 Paket	1.200	1 Paket	1.300	1 Paket	1.400	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peralatan labor	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket
33	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah perbatasan dan tertinggal	daerah perbatasan dan Daerah Tertinggal	-	-	1	10.000	1	12.000	1	14.000	1	16.000	1	18.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Pembangunan Sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana transportasi	60 %	110	65 %	150	70 %	175	75 %	200	80 %	225	90 %	250	Perhubungan
35	Peningkatan Pelayanan Angkutan	% Pelayanan Angkutan	50 %	52	55 %	58	60 %	63	65 %	70	70 %	77	75 %	85	Perhubungan

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrik	Jumlah RT yang teraliri listrik	600 RT	456	300 RT	300	300 RT	300	300 RT	300	400 RT	600	400 RT	600	Energi dan sumber daya mineral
37	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah Kegiatan Pertambangan yang terawasi	63 IUP	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Energi dan sumber daya mineral
		Jumlah Nagari terfasilitasi pengelolaan energi pemanfaatan langsung	-	-	1 Nagari	100	1 Nagari	100	1 Nagari	100	1 Nagari	100	1 Nagari	100	Energi dan sumber daya mineral
38	Penertiban dan Pengawasan SPBU, BBM dan Gas	Jumlah Pengawasan SPBU Depot lokal dan kios pengecer BBM	80 Pangkalan minyak dan Gas 4 SPBU dan 1 SPBE	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Energi dan sumber daya mineral
39	Pembangunan infrastruktur penunjang sektor Pertanian	jalan usaha tani	3	600	6	1.200	6	1.200	6	1.200	7	1.400	7	1.400	Pertanian
		jalan produksi peternakan			1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	Peternakan
		Jalan produksi perikanan			2	400	2	400	2	400	2	400	2	400	Perikanan
		Jalan Perkebunan	2.7	417,85	5	1.000	7	1.400	9	1.800	11	2.200	13	2.600	Pertanian
40	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas areal irigasi yang berkondisi baik	17.875 ha	31.228	20.375 ha	32.000	22.875	33.000	25.375 ha	34.000	27.375 ha	35.000	29.375	36.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41	Pengembangan pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Jumlah rehabilitasi sungai	2 unit	509	2 unit	600	2 unit	700	2 unit	800	2 unit	900	2 unit	1000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah rehabilitasi embung dan bangunan penampung lainnya	U unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42	Pembangunan infrastruktur penunjang wisata	Jumlah Nagari disekitar fokus wisata yang terbangun infrastrukturnya			3	4000	3	4000	3	4000	3	4000	4	5000	Pariwisata

--	--

Tabel 8.4

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan

Misi 4 : Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												URUSAN
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 9			Membangun Karakter Masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh pemerintah nagari yang kuat dengan meningkatkan peran tungku tigo sajarangan												
1	Program Pengembangan nilai-nilai agama dan kebudayaan	% Masjid Aktif	10	5.000	20	5.000	25	5.500	15	5.500	15	5.500	15	5.500	Sosial
		% Masjid Paripurna	10		20		20		20		20		10		
2	Program Pengembangan Nilai budaya	% Penguatan Lembaga Adat	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	Kebudayaan



Tabel 8.5
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan

Misi 5 : Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih (good dan Celan Governace)

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												URUSAN
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan)	Target	Rp. (jutaan).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 10			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi												
1	Program Pelayanan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelayanan	100	45.030	100	46.200	100	47.500	100	48.800	100	50.000	100	51.000	Non Urusan
2	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum	% Pelayanan Pemerintah daerah	100	250	100	340	100	450	100	520	100	450	100	500	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	% Fasilitas Pelayanan Kedinasan	100	1.862	100	1.900	100	1.910	100	1.950	100	1.980	100	2.000	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
4	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	% Peningkatan Kapasitas trifungsi DPRD	100	25.000	100	27.000	100	27.000	100	27.000	100	27.000	100	27.000	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	% Penataan Adm Kependudukan	83	3.265	100	3.505	100	2.175	100	1.400	100	1.400	100	1.400	Adm Kependudukan dan Capil
6	Program Penyelamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah	% arsip yang diselamatkan	100	830	100	890	100	910	100	950	100	975	100	990	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
7	Program Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan	Jumlah SKPD yang ditingkatkan supra	2	4.500	2	4.500	2	4.500	2	4.500	2	4.500	2	4.500	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya	30	5.000	50	6.000	60	7.000	70	8.000	75	9.000	80	9.500	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

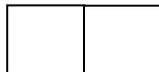
9	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% Penggunaan IT	100	1.000	100	1.200	100	1.400	100	1.500	100	1.500	100	1.500	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Pengelolaan Keuangan yang baik	100	6.550	100	7.200	100	8.000	100	8.800	100	9.600	100	10.600	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
11	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang mengikuti Diklat	100	300	100	400	100	400	100	500	100	500	100	500	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
12	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Pelaksanaan pengawasan	100	3.500	100	3.600	100	3.700	100	3.800	100	3.900	100	4.000	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
13	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% Penataan Peraturan Per UU	100	100	100	110	100	120	100	130	100	140	100	150	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
14	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	% Kerjasama Pemerintah daerah	80	200	85	250	90	300	95	350	100	400	100	400	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
15	Program Perencanaan Pembangunan daerah	% perencanaan yang baik	100	1.500	100	1.600	100	1.700	100	1.800	100	1.800	100	1.900	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
16	Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	% koordinasi	70	700	75	900	80	1.000	85	1.000	90	1.000	100	1.000	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
17	Program Perencanaan Pembangunan social dan budaya	% koordinasi	70	1.100	75	1.500	80	1.600	85	1.700	90	1.800	100	2.000	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
18	Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	% koordinasi	70	900	75	1.100	80	1.200	85	1.200	90	1.200	100	1.000	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
19	Program Perencanaan Pembangunan infrastruktur	% koordinasi	70	1.500	75	1.500	80	1.500	85	1.500	90	1.500	100	1.500	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
20	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan	% yang mengikuti diklat perencanaan	70	70	75	90	80	90	85	100	90	100	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
21	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	% pengembangan komunikasi	20	300	35	400	45	450	55	460	65	475	70	500	Komunikasi dan informatika
22	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	% optimalisasi teknologi	30	70	45	90	50	100	60	120	65	130	70	130	Komunikasi dan informatika
23	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi	% Peningkatan SDM	20	50	35	70	45	75	50	80	55	80	60	80	Komunikasi dan informatika
24	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	% Pengembangan komunikasi	20	50	350	70	45	75	55	80	70	80	80	80	Komunikasi dan informatika

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	% Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	100	887	100	950	100	960	100	970	100	980	100	990	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Jumlah Perda yang ditegakan	5	1.100	6	1.200	7	1.300	8	1.400	9	1.500	10	1.600	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
26	Program Pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal	% Pemeliharaan kantrabtibmas	100	300	100	350	100	370	100	380	100	385	100	390	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
27	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	% Pengembangan wawasan kebangsaan	60	40	70	65	80	75	85	100	90	100	100	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
28	Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah partai politik yang dibina	1	94,4	2	108,2	2	123	3	250	3	250	1	94	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
29	Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan serta anak	Penyelesaian kasus KDRT	100	50	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% Peraturan yang ditegakan	100	300	100	400	100	500	100	500	100	550	100	600	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	% Partisipasi Perempuan dalam pembangunan	30	40	35	50	40	60	45	70	50	70	50	70	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Program Peningkatan SDM dan kelembagaan nagari	% aparat nagari yang mengikuti diklat	50	2.343	60	2,400	70	2.500	80	2.700	90	2.900	100	3.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		% Organisasi pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan	40		60		70		80		90		100		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		% pengembangan lembaga ekonomi nagari	35		55		65		75		85		100		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari	% Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	30	690	40	700	50	720	60	750	70	770	75	800	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
34	Program Mitigasi, Tanggap Darurat dan Rehabilitasi/rekonstruksi penanggulangan bencana	Peningkatan ketahanan daerah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Level 2	14.261	Level 2	4.780	Level 3	5185	Level 3	5540	Level 3	5.995	Level 3	6.450	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.



BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Target capaian indikator makro pembangunan daerah dan indikator kinerja daerah yang mendukung pencapaian indikator makro pembangunan daerah sesuai dengan aspek fokus yang akan menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel 9-1 dan tabel 9.2 berikut:

Tabel 9-1
Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Solok 2016-2021

No	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,43	5,47	5,5	5,6	5,7	5,9	6,2
2.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	24,97	26,04	27,21	28,52	29,96	31,53	33,29
3.	Angka Kemiskinan	indeks	9,43	9	8,6	8,2	7,8	7,4	7
4.	Angka Pengangguran	Indeks	3,53	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10	3
5.	APK PAUD	%	81,31	81,32	85,00	91,00	97,00	98,00	100
6.	APK SD/MI	%	118,68	118,69	118,70	118,71	118,72	118,73	118,74
7.	APK SMP/MTSN/Paket B	%	99,56	99,65	99,74	99,82	99,91	99,97	100
8.	Persentase Penerapan SPM Bidang Pendidikan	%	NA	85	90	95	100	100	100
9.	Pesentase SD/SMP yang terakreditasi A	%	NA	40	45	50	55	60	65
10.	Persentase Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM	%	78,08	80	85	90	95	100	100
11.	Persentase layanan rujukan sesuai dengan SPM	%	78,08	80	85	90	95	100	100
12.	Indeks Pencemaran Lingkungan	%	0,75	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40
13.	Persentase Rumah Layak huni	%	68,66	68,66	68,94	69,27	69,65	70,12	70,73
14.	Ketersediaan pangan utama	%	581,66	593,29	599,22	605,22	611,27	617,38	623,55

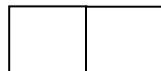


No	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
15.	Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks	NA	101,36	102,25	103,13	104,02	104,90	105,79
16.	Indeks Lama Tinggal	rasio	0,8	0,85	0,87	0,9	0,95	1	1,25
17.	Pertumbuhan industri	%	5,76	5,85	5,90	5,95	6,00	6,25	6,50
18.	Proporsi Panjang jalan dan jembatan mantap	rasio	0,59	0,61	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
19.	Jumlah investasi (PMDN dan PMA)	juta rupiah	308.781,00	412.306,50	466.569,25	520.832,00	575.094,75	629.357,50	683.620,25
20.	Mesjid Aktif	%	10	10	20	25	15	15	15
21.	Mesjid Paripurna	%	10	10	20	25	15	15	15
22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	3,10	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
23.	Komposisi Aparatur Fungsional dan Struktural diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Rasio	NA	10:90	30:70	40:60	50:50	70:30	80:20
24.	Rata-rata Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	D	C	CC	CC	B	B	B
25.	Rata-rata Nilai SAKIP Pemda	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	BB
26.	% SKPD yang menyelenggarakan SPIP	%	20	20	40	60	80	100	100
27.	Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan	Peringkat Provinsi	12	5	5	5	5	5	5
28.	Rasio KDRT	%	0,01212	0,012	0,01175	0,01150	0,01125	0,011	0,01095
29.	TFR per WUS	Anak	2,74	2,72	2,7	2,68	2,66	2,63	2,6



TABEL 9.2
INDIKATOR KINERJA DAERAH
TAHUN 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARKAT									
	INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
	Bidang Pendidikan									
	APK PAUD	%	81,31	81,32	85,00	91,00	97,00	98,00	100	100
	APK SD/MI	%	118,68	118,69	118,70	118,71	118,72	118,73	118,73	118,74
	APK SMP/MTs	%	99,56	99,65	99,74	99,82	99,91	99,97	100	100
	APK SMA/SMK/MA	%	59,16	60,25	61,35	62, 50	63, 45	64,65	65,75	65,75
	APM SD/MI	%	94,99	95,35	96, 50	97,75	98	99,25	100	100
	APM SMP/MTs	%	72,92	74,25	76, 50	78,75	80,00	82,50	84,75	84,75
	APM SMA/SMK/MA	%	48,44	50, 25	52, 75	54, 50	56, 75	58, 50	60, 40	60, 40
	APT SD/MI	%	28,49	30, 35	32, 46	34, 40	36, 50	38, 75	40, 45	40, 45
	APT SMP/MTs	%	17,37	18, 35	19, 45	20, 58	21, 74	22, 43	23, 22	23, 22
	APT SMA/SMK/MA	%	12,37	13, 34	14, 45	15, 48	16, 56	17, 47	18, 34	18, 34



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Bidang Kesehatan										
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	orang	983,53	984, 34	985, 35	986, 46	987, 40	988, 59	989, 50	989, 50	989, 50
	Angka Usia harapan Hidup	Tahun	70,02	70, 20	70, 44	70, 62	70, 85	71, 20	71,43	71,43	71,43
	Balita Gizi Buruk	%	0,024	0,023	0,022	0,021	0,020	0,019	0,018	0,018	0,018
	Bidang Ketenagakerjaan										
	Rasio penduduk yang bekerja	Orang	96,47	96,50	96,60	96,70	96,80	96,90	97,00	97,00	97,00
2	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga										
	Seni Budaya										
	Group kesenian Daerah yang dibina	Buah	177	10	10	10	10	10	10	10	237
	Kelembagaan adat yang terbina	%	30	40	60	80	100	100	100	100	100
	Olah Raga										
	Prestasi di setiap Pekan Olah Raga	Peringkat	5 Besar	5 Besar	-	5 Besar	-	5 Besar	-	-	5 Besar
3	Fokus Keagamaan										
	Pembinaan keluarga Sakinah	Keluarga	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000

--	--

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Mesjid yang berfungsi sebagai mesjid paripurna	%	-	10	20	20	20	20	10	100
	Mesjid aktif dalam melaksanakan didikan subuh, wirid pengajian TPA/TPSA	%	N/A	10	20	25	15	15	15	100
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	INDIKATOR KINERJA UTAMA									
I	Fokus Layanan Urusan Wajib									
01	PENDIDIKAN									
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah :									
	a. SD/MI	Rasio	1:131	1:130	1:129	1:128	1:127	1:126	1:125	1:125
	c. SMP/MTs	Rasio	1:210	1:208	1:206	1:204	1:202	1:201	1:200	1:200
	b. SMA/MA/SMK	Rasio	1:435	1:433	1:430	1:428	1:425	1:422	1:420	1:420
	Rasio Guru Terhadap murid									
	a. SD/MI dan SMP/MTs	Rasio	1:13	1:12	1:12	1:11	1:11	1:10	1:10	1:10
	b. SMA/MA/SMK	Rasio	1:17	1:16	1:15	1:14	1:13	1:12	1:10	1:10
	Fasilitasi Pendidikan :									
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik	%	83,82	84, 50	86, 34	87, 50	88, 75	89, 35	90,00	90,00

--	--

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi bangunan baik	%	76,91	78, 56	80. 50	85, 50	87, 25	90, 75	95,00	95,00
	Sekolah Pendidikan SMA/SMK /MA Kondisi bangunan baik	%	92,58	93,5	95, 57	97, 35	98, 75	99, 15	100	100
	Angka Putus Sekolah :									
	a. SD/MI	%	0,25	0, 20	0, 15	0,10	0, 8	0, 5	0,00	0,00
	b. SMP/MTs	%	0,15	0, 13	0, 11	0, 9	0, 7	0,5	0,00	0,00
	c. SMA/SMK/MA	%	0,29	0, 25	0, 22	0, 19	0. 14	0,12	0,10	0,10
	Guru yang bersertifikasi	Orang	3.610	3.860	4.110	4.360	4.610	4.860	5.210	5.210
	Angka Kelulusan									
	Tingkat Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Kelulusan SMP/MTs	%	99,92	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Kelulusan SMA/SMK/MA	%	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	100	100
	Sekolah SD dan SLTP Yang Telah Terakreditasi A	%	N/A	10	30	30	15	10	5	100
02	KESEHATAN									
	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	16,24	16,2	16,10	16,00	15,85	15,60	15,40	15,40

--	--

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Rasio puskesmas , poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	1,04	1,03	1,03	1,02	1,02	1,01	1,00	1,00
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,0069	0,0068	0,0067	0,0066	0,0065	0,0064	0,0063	0,0063
	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,098	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	1,32	1,36	1,40	1,43	1,45	1,47	1,50	1,50
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	69,10	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	76,46	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah tenaga relawan kesehatan yang ditingkatkan	Orang	0	50	50	50	50	50	50	300
	Bed OccupancyRate (BOR)	%	19,95	25,50	35,57	45,89	65, 50	70, ,00	85,00	85,00
	Cakupan kunjungan bayi	%	95,84	96,5	97,45	98,35	99,00	99,50	100	100
	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD/100.000 Pddk	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan jorong yang mencapai UCI	%	49,39	59,45	69,50	79, 45	89, 00	96,60	100	100
	Jumlah Angka kematian ibu melahirkan	Jumlah	7	6	5	4	3	2	1	1
03	PEKERJAAN UMUM									
	luas irigasi kabupaten solok dalam kondisi baik	Ha	22.495	22.545	22.595	22.645	22.695	22.745	22.795	22.795
	Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	0,59	0,61	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,75
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	%	1,49	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	1,55

--	--

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
04	PERUMAHAN									
	Rumah layak huni	%	68,66	68,66	68,94	69,27	69,65	70,12	70,73	70,73
	Rumah tangga pengguna air bersih	%	66,10	68,4	70,25	72,40	73,25	74,00	75,00	75,00
	Rumah tangga bersanitasi	%	67,40	68,40	70,40	71,35	73,50	74,30	75,00	75,00
05	PERHUBUNGAN									
	Rasio izin trayek	Rasio	0,00095	0,00096	0,00097	0,00098	0,00099	0,00100	0,00101	0,00101
	Jumlah uji Keur	Jumlah	7.190	7.262	7.335	7.482	7.632	7.785	7.941	7.941
06	LINGKUNGAN HIDUP									
	Persentase penanganan sampah	%	2,11	2,35	2,50	2,65	2,80	2,95	3,50	3,50
	Persentase jumlah sungai yang terpantau status mutunya	%	18,57	19,00	19,50	22,50	25,00	27,50	30,00	30,00
	Persentase jumlah danau yang terpantau status mutunya	%	75	77	80	82	85	87	90	90
07	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
	Rasio penduduk ber KTP Nasional (E-KTP)	Rasio	0,71	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00
	Rasio bayi ber akte kelahiran	Rasio	0,44	0,65	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00
	Rasio pasangan yang berakta nikah	Rasio	0,46	0,65	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00
	Rasio Penerbitan KK	Rasio	0,79	0,82	0,85	0,87	0,90	0,95	1,00	1,00

--	--

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	57,00	57,25	57,50	57,75	58,00	58,25	58,50	58,50
	Ratio KDRT	Rasio	0,01212	0,01200	0,01175	0,01150	0,01125	0,01100	0,01095	0,01095
09	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA									
	Rasio akseptor KB	%	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15
	Cakupan peserta KB Aktif	%	70,50	72,50	75,25	77,50	78,25	82,50	85,00	85,00
10	SOSIAL									
	Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberikan perlindungan sosial	%	80,82	82,50	85,00	87,50	92,50	97,50	100	100
11	KETENAGA KERJAAN									
	Persentase pekerja yang ditempatkan	%	3,53	4,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,50	65,00	62,25	64,50	66,25	68,50	70,00	70,00
12	KOPERASI, USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH									
	Persentase peningkatan formalisasi UMKM dan IKM	%	0	8	8	8	8	8	8	48
	Cakupan fasilitasi permodalan untuk usaha UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	%	0	5	5	5	5	5	5	30
	Persentase koperasi aktif	%	0	56,86	66,01	75,16	78,43	90,45	94,12	94,12

--	--

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
13	PENANAMAN MODAL									
	Jumlah Perusahaan yang menanamkan modalnya di Kab. Solok	Perusahaan	5	5	6	7	8	9	10	10
	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	Juta Rupiah	308,781,00	412.306,50	466.569,25	520.823,00	575.094,75	629.357,50	683.620,25	683.620,25
14	KEBUDAYAAN									
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	2	2	3	3	3	3	3	3
	Cakupan pemeliharaan benda, situs, budaya dan bersejarah	%	13,51	15,00	25	50	75	85	100	100
15	KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI									
	Jumlah Parpol yang mendapat pembinaan	Parpol	12	12	12	12	12	12	12	12
	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kali	5	5	5	5	5	5	5	5
16	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
	Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk	Rasio	2,80	2,81	2,82	2,83	2,84	2,85	2,85	2,85
	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	48,45	50,00	55,00	57,00	60,00	62,50	65,00	65,00
	Rasio Pos Siskamling per jumlah nagari	Rasio	4,00	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30	4,35	4,35
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0,001100	0,001101	0,001102	0,001103	0,001104	0,001105	0,001106	0,001106
	Penegakan Perda	%	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

--	--

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
17	KETAHANAN PANGAN									
	Ketersediaan pangan utama (beras)	kg/ka/thn	536,37	541,59	554,13	567,14	580,64	594,47	600,65	600,65
	Skor PPH	Skor	80,1	81,50	82,00	82,50	83,00	84,00	85,00	85,00
18	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Pokja	74	74	74	74	74	74	74	74
	Jumlah posyantek berprestasi	Posyantek	-	1	2	2	3	4	5	5
	Jumlah LPM Berprestasi	Pokja	4	5	6	7	8	9	10	10
19	KEARSIPAN									
	Pengelola arsip secara baku	%	14,81	15,00	17,00	20,00	22,00	25,00	50,00	50,00
	Jumlah pengelola kearsipan yang dilatih	Orang	100	50	50	50	50	50	50	400
20	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	79,42	79,75	80,00	80,25	80,50	81,00	82,00	82,00
	jumlah kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasikan	Kali	1.425	1.435	1.440	1.445	1.450	1.455	1.460	1.460
21	PERPUSTAKAAN									
	Jumlah Pengunjung perpustakaan (termasuk pustaka keliling)	Orang	11,64	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	25,00	25,00
	Jumlah Koleksi buku di perpustakaan	Judul	7.092	7.100	7.150	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500

--	--

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah Perpustakaan Nagari yang Dibina	Nagari	45	45	50	55	60	65	74	74
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
01	PERTANIAN									
	Produktifitas Padi	Ton/Ha	5,55	5,78	5,79	5,79	5,80	5,81	5,82	5,82
	Cakupan bina kelompok petani	%	82,99	83,00	85,00	87,00	90,00	95,00	100	100
	Luas Penangkaran Padi Sawah	Ha	187	190	200	210	220	235	250	250
	Luas Lahan Pertanian Organik	Ha	337	340	345	350	355	360	365	365
	Jumlah Populasi Ternak :									
	1. Sapi	Ekor	38.268	39.447	40.709	42,052	43.482	45.004	47.000	47.000
	2. Kambing	Ekor	16.080	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000	17.500	17.500
	3. Unggas	Ekor	871.246	880.000	900.000	925.000	950.000	975.000	990.000	990.000
02	KEHUTANAN									
	Kerusakan kawasan hutan	%	6,10	6,00	5,95	5,75	5,50	5,25	5,00	5,00
	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	125	200	200	200	200	200	200	200
03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	5,23	5,24	5,25	5,26	5,27	5,28	5,29	5,29
	Jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang ditertibkan	Titik	32,03	30,00	0	0	0	0	0	0

--	--

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
04	PARIWISATA									
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,67	0,67	0,68	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
05	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Jumlah Produksi Ikan	Ton	3.406,0	3.500	3.750	4.000	4.300	4.650	5.000	5.000
06	PERDAGANGAN									
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	9,87	9,87	9,88	9,88	9,89	9,89	9,90	9,90
	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	27,56	28,00	28,50	28,75	30,00	32,50	35,00	35,00
07	PERINDUSTRIAN									
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	4,99	5,00	5,01	5,02	5,03	5,04	5,05	5,05
	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	7,06	8	8,5	9,00	9,50	9,75	10,00	10,00
	Pertumbuhan Industri	%	5,76	5,85	5,90	5,95	6,00	6,25	6,50	6,50
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
	Sertifikasi dalam pemberian pelayanan (ISO9001:2008)	SKPD	1		1		1		1	4

--	--

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Solok untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Solok periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 dan RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJM Nasional.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.



10.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya; Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Solok berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
3. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Solok terhadap indikator kinerja, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Solok serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;
4. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Solok yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);



5. Penyusunan RKPD Kabupaten Solok dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Solok merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

BUPATI SOLOK,

Dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

Dto

M. SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

